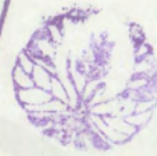


KEBIJAKAN PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PROSES
REUNIFIKASI DAMAI DI SEMENANJUNG KOREA

SKRIPSI



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Didik Fadlansyah

NIM : 970910101206

Pembimbing

Drs. Hlmawan Bayu Patriadi, MA

NIP. 131 975 313

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2002

Asal	Uraian	Kelas
Terima Daj.	19 OCT 2002	3275193
No. Induk :	sdm	FAD 5125
		K
		C-1

**KEBIJAKAN PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PROSES
REUNIFIKASI DAMAI di SEMENANJUNG KOREA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Didik Fadlansyah
NIM. 970910101206

Pembimbing

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA
NIP. 131 975 313

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2002

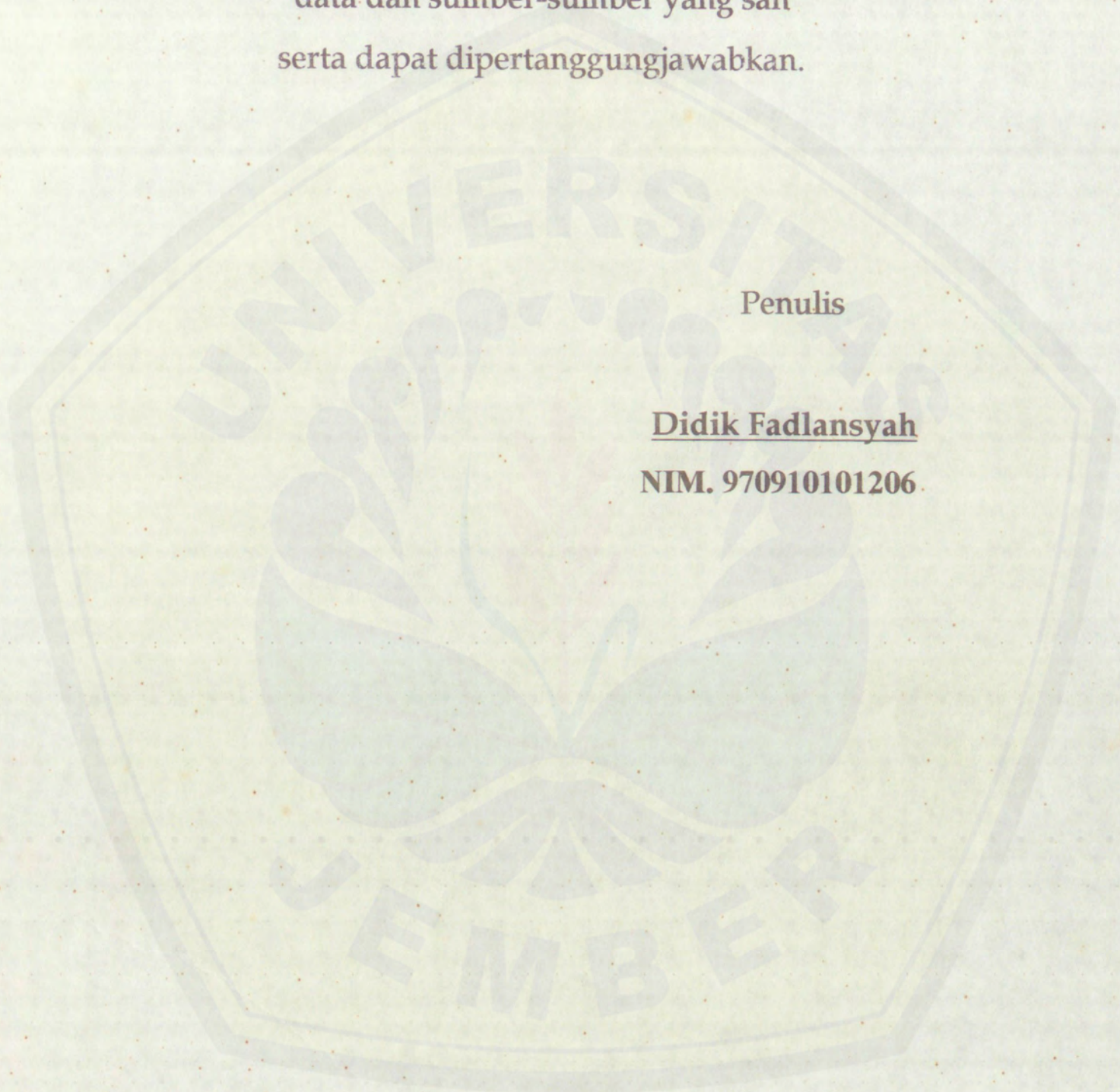
SURAT PERNYATAAN

Skripsi ini adalah asli karya penulis dengan menggunakan data dan sumber-sumber yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis

Didik Fadlansyah

NIM. 970910101206



MOTTO

Penasihat terpercaya berkata :

*"Carilah ilmu, maka keadaanmu akan menjadi tinggi, kedudukanmu akan terangkat, kemuliaanmu akan bertambah dan engkau akan terhitung dalam orang-orang terhormat."*¹

*"Carilah ilmu, karena jika engkau menjadi orang kecil, mungkin engkau tidak dibutuhkan, akan tetapi setelah engkau menjadi tokoh suatu bangsa, mereka akan membutuhkanmu."*²

Bung Karno pernah berkata :

"Kepada pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi, saya serukan : berjalanlah pula terus, cintailah tanah airmu, cintailah bangsamu, cintailah kemerdekaannya, cintailah cita-cita yang membuat bapak-bapakmu dan ibu-ibumu menderita dan berkorban. Berjalanlah terus, hari kemudian adalah milikmu, bukan milik orang tuamu. Matahari kemudian adalah mataharimu, bulan kemudian adalah bulanmu, bintang-bintang kemudian adalah bintang-bintangmu."

¹ Muhammad Ahmad, *Untuk Para Remaja*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hal. 19

² *Ibid.*

³ Iman Toto K. Rahardjo dan Herdianto W.K. (editor), *Bung Karno dan Tata Dunia Baru (Kenangan 100 Tahun Bung Karno)*, PT. Grasindo, Jakarta, 2001, hal. 138

PERSEMBAHAN

Untuk Ayah dan Ibu tercinta :

Mohammad Atimsyah dan Fadlun atas kesabaran
dan ketulusan mereka memberikan kasih sayang.

Begitu pula semua adikku tercinta :

Arif Ardiansyah, Badrunsyah, Dedi Rifkiansyah dan

Rachmi Yatun Nisah (*You're Greatful*).

Juga buat almamaterku Universitas Jember, serta
negaraku Republik Indonesia

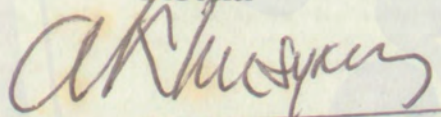
PENGESAHAN

Diterima dan Dipertahankan di Depan Panitia Penguji Skripsi
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Hari : Rabu
Tanggal : 02 Oktober 2002
Jam : 08.00 WIB

Panitia Penguji

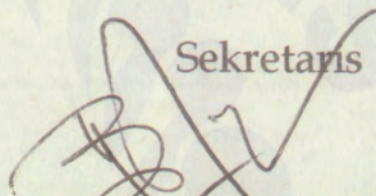
Ketua



Prof. Dr. A. Khusyairi, MA

NIP. 130 261 689

Sekretaris

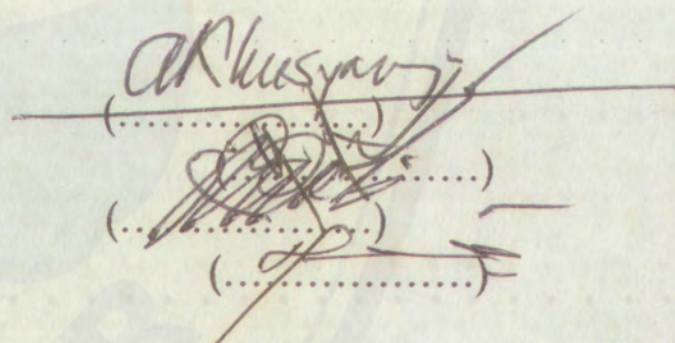


Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA

NIP. 131 975 313

Anggota :

1. Prof. Dr. A. Khusyairi, MA
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA
3. Drs. Umaid Radi, MA
4. Drs. Djoko Susilo, MSi



Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan,



Drs. H. Moch. Toerki

NIP. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT akhirnya penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Karya ilmiah ini berjudul : "KEBIJAKAN PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PROSES REUNIFIKASI DAMAI di SEMENANJUNG KOREA" adalah merupakan salah satu fenomena internasional yang menarik bagi penulis untuk dijadikan permasalahan dalam penulisan ilmiah ini. Berawal dari ide penyatuan kembali Semenanjung Korea sampai terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antar Korea pada 13-15 Juni 2000 di Pyongyang, serta berlanjutnya proliferasi nuklir dan senjata penghancur massa (*weapon of mass destructions-WMD*) Korea Utara lainnya seperti senjata biologi, kimia dan peluru kendali balistik yang kesemuanya itu menjadi bagian dari masalah penulisan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada mereka yang turut membantu selama penyusunan karya ilmiah ini hingga selesai, serta para pihak yang telah memberikan motivasinya kepada penulis, diantaranya :

- 1) Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 2) Bapak Drs. Sjoekron Sjah, SU selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

- 3) Bapak Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan *transfer of knowledge* dalam penyusunan karya ilmiah ini.
- 4) Bapak Prof. Dr. A. Khusyairi, MA selaku dosen wali yang turut memberikan pengarahan akademis selama studi.
- 5) Bapak Agus Tri Hartono, S.Sos sebagai dosen pembimbing seminar yang telah memberikan revisi awal penulisan ilmiah ini.
- 6) Lembaga Pendidikan Bahasa Asing (LPBA) "OXFORD" serta *Society of Oxford Students (SOS)* yang menjadi tempat pengembangan *skill of entrepreneurship* penulis selama di organisasi itu. *Merci beaucoup a l'Oxford.*
- 7) Semua keluarga yang ada di Bali terutama di Singaraja dan Klungkung serta keluarga di Jakarta (Ami Ayik dan Cik Atik) atas bantuan dan motivasinya selama ini. *This is my best pride for all of you.*
- 8) Keluarga di Malang (Pak Syakrani dan Pak Kadri), terima kasih atas kebaikannya semoga tali silaturahmi semakin mempererat hubungan keluarga. *Insya Allah*
- 9) Buat Feriyal Lindawati (E'i), hanya ini yang bisa kupersembahkan padamu semoga menjadi bagian dalam mengiringi aktivitas kamu serta, *thank's for your cares and kindness all the time, I'm so impressed, girl.*
- 10) Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Magang di PT. Telkom Kancatel Lumajang di antaranya : Alan, Yudi dan Kokok. *We're so close each other, man.*
- 11) Keluarga besar Hubungan Internasional (HI'97) yang tetap *cool* atas keceriaan dan kebersamaan selama ini. Buat Imam, Indra (Oyek), Andhika, Agus (Kohar), Rina, Praba, Debora, Winnie, Andi & Diana, Eli, Lia dll. *"Just keep in touch guys !"*

12) Serta segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) Universitas Jember

Demikianlah beberapa uraian pengantar dan ucapan terima kasih yang dapat penulis utarakan, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pengembangan disiplin Ilmu Hubungan Internasional.

Jember, September 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan	10
1.2.1. Batasan Waktu	10
1.2.2. Batasan Materi.....	11
1.3. Permasalahan	12
1.4. Kerangka Dasar Teori	14
1.4.1. Konsep Proliferasi Nuklir	15
1.4.2. Pemicu Terjadinya Proliferasi Nuklir	17
1.4.3. Konsep <i>The Security Dilemma</i>	24
1.5. Hipotesa.....	27
1.6. Metodologi Penelitian	28
1.6.1. Metode Pengumpulan Data	28
1.6.2. Metode Analisa Data	29
1.6.3. Pendekatan	30

BAB II KEBIJAKAN PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA

2.1. Program Senjata Nuklir Korea Utara Masa Kim Il-Sung	32
2.1.1. Pembangunan Reaktor Nuklir oleh Uni Soviet	37
2.1.2. Kerjasama Nuklir dengan Cina	43
2.2. Pengembangan Senjata Penghancur Massa Kim Jong-Il	47
2.2.1. Produksi Senjata Nuklir dan Peluru Kendali	49
2.2.2. Produksi Persenjataan lainnya	63
2.2.2.1. Senjata Biologi Korea Utara	63
2.2.2.2. Senjata Kimia Korea Utara	69
2.2.3. Persenjataan dalam menunjang Kekuatan Militer Korea Utara	74
2.3. Proliferasi Nuklir Korea Utara	83
2.3.1. Strategi Militer Korea Utara	87
2.3.2. Militer dalam Melaksanakan Kebijakan Proliferasi Nuklir.....	95
2.3.3. Reaksi Korea Selatan terhadap Ancaman Nuklir Korea Utara	101

BAB III UPAYA PROSES REUNIFIKASI DAMAI di SEMENANJUNG KOREA

3.1. Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan Sebelum KTT Pyongyang	107
3.1.1. Perjanjian <i>the "Basic Agreement"</i>	114
3.1.2. Perjanjian <i>the "Joint Declaration of Denuclearization of the Korean Peninsula"</i>	121

3.2. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pyongyang dan Reunifikasi Korea.....	131
3.2.1. Kebijakan Kim Dae-Jung Melalui <i>The Sunshine Policy</i>	139
3.2.2. Kebijakan Kim Jong-Il dengan <i>Juche Ideology</i>	154
3.2.3. Arti dan Peran KTT Pyongyang dalam Mendorong Kerjasama Kedua Korea	164

BAB IV IMPLIKASI PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA BAGI PROSES REUNIFIKASI KOREA

4.1. Faktor Domestik Mandeknya Reunifikasi Korea	171
4.1.1. Implikasi Penjualan Senjata Korea Utara terhadap Mandeknya Reunifikasi.....	173
4.1.2. Bertahannya <i>Status Quo</i> Pemerintahan Rejim Kim Jong-Il	185
4.1.3. Ancaman Nuklir Korea Utara	194
4.2. Faktor Regional Mandeknya Reunifikasi Korea	207
4.2.1. Diplomasi Nuklir Korea Utara	208
4.2.2. Belum Terciptanya Rejim Perdamaian	216
4.3. Faktor Internasional Mandeknya Reunifikasi Korea	225
4.3.1. Perspektif Amerika Serikat terhadap Reunifikasi ...	226
4.3.2. Perspektif Jepang terhadap Reunifikasi Korea	234
4.3.3. Perspektif Cina terhadap Reunifikasi Korea	239
4.3.4. Perspektif Rusia terhadap Reunifikasi Korea	244

BAB V KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran-1 Agreement on Reconciliation, Nonaggression, and Exchanges and Cooperation Between the South and North Korea.
- Lampiran-2, Joint Declaration of the Denuclearization on the Korean Peninsula.
- Lampiran-3, Chronology of Major Events Related to North Korean Nuclear Issues
- Lampiran-4, Peta Semenanjung Korea

DAFTAR TABEL

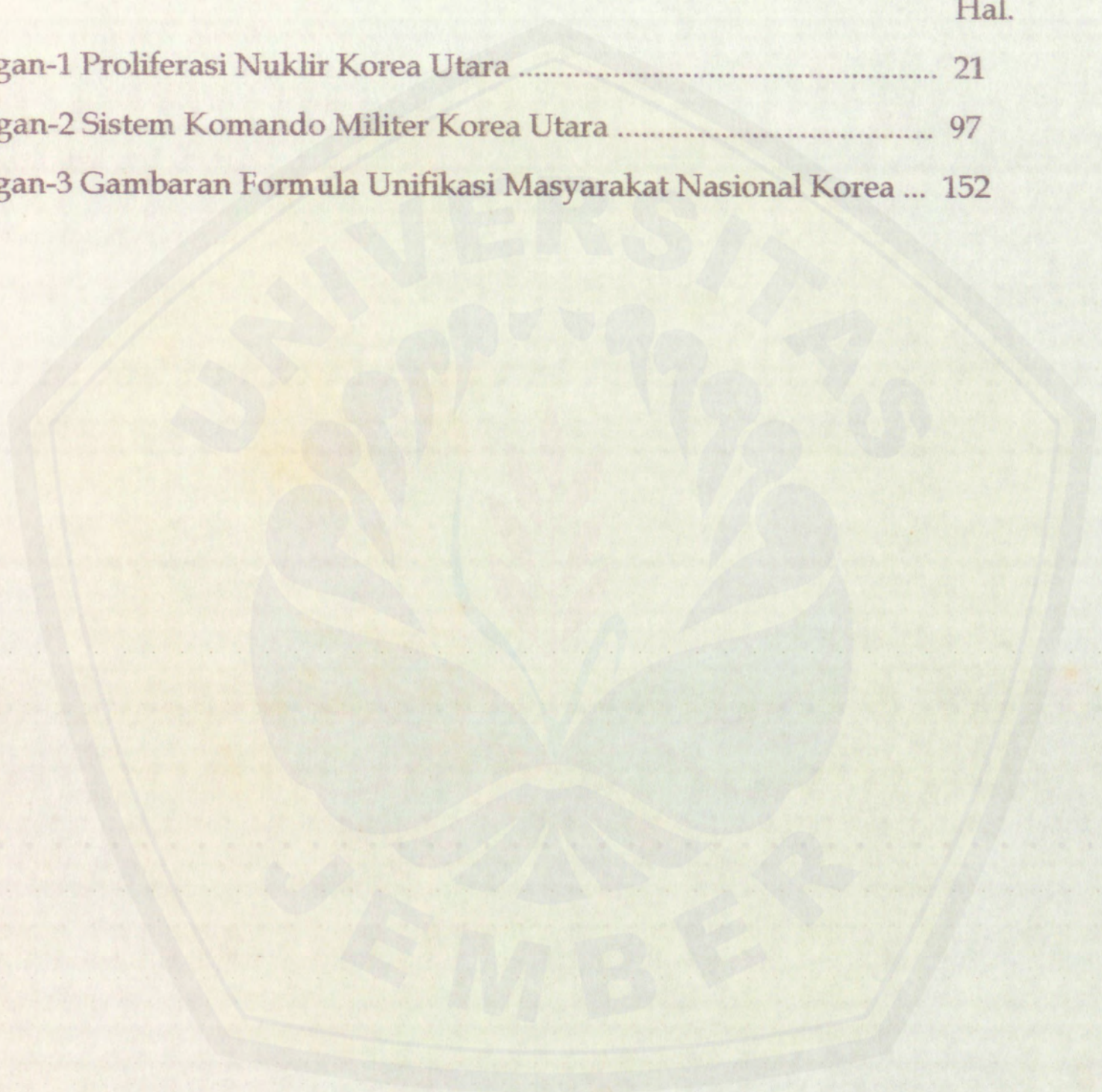
	Hal.
Tabel-1 Karakteristik Roket Artileri FROG	42
Tabel-2 Jangkauan Obyektif Peluru Kendali Balistik Korea Utara	46
Tebel-3 Karakteristik Rudal Balistik Korea Utara	51
Tabel-4 Kerusakan Pada Area Sempit dengan Hulu Ledak <i>High Explosive</i> yang Dihantarkan Peluru Kendali	61
Tabel-5 Kehancuran Kota dan Lapangan Udara dengan Hulu Ledak Nuklir yang Dihantarkan peluru Kendali Balistik	62
Tabel-6 Fasilitas Nuklir Korea Utara (Laporan Tim Inspeksi IAEA) ..	80
Tabel-7 Total Nilai Bantuan Korea Selatan Kepada Korea Utara	86
Tabel-8 Perbandingan Kapabilitas Militer Korut dan Korsel	91
Tabel-9 Potensi Sasaran Rudal Balistik Korea Utara	99
Tabel-10 Hasil Jajak Pendapat Mengenai Reunifikasi Korea	111
Tabel-11 Perbandingan Proposal Unifikasi Antara Korea Selatan dan Korea Utara Serta "Tiga Tahap Formula Unifikasi"	160
Tabel-12 Transfer Rudal Balistik Korut ke Negara Dunia Ketiga	179
Tabel-13 Perdagangan Korea Utara	181
Tabel-14 Transformasi Struktur Keamanan Warisan Perang Dingin antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Korea Utara	221
Tabel-15 Kapabilitas Militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea..	232

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar-1 Fasilitas Produksi, Penelitian dan Fasilitas Pendukung Senjata Kimia Korea Utara	72
Gambar-2 Fasilitas Nuklir Korea Utara	77
Gambar-4 Fasilitas Peluru Kendali Korea Utara	202

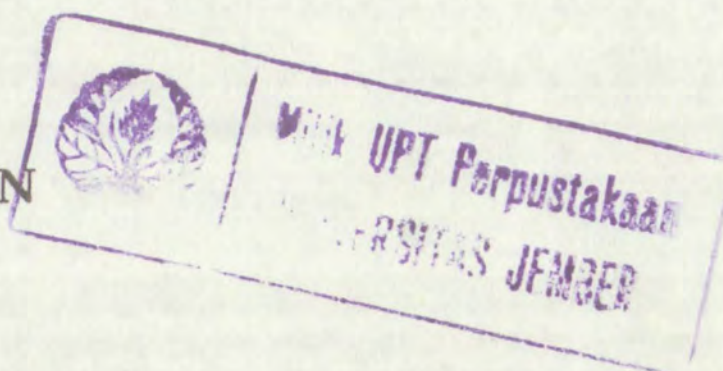
DAFTAR BAGAN

	Hal.
Bagan-1 Proliferasi Nuklir Korea Utara	21
Bagan-2 Sistem Komando Militer Korea Utara	97
Bagan-3 Gambaran Formula Unifikasi Masyarakat Nasional Korea ...	152





BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Selama lebih dari satu dekade sejak berakhirnya Perang Dingin¹ yang ditandai dengan runtuhnya Blok Komunis Uni Soviet akibat kegagalan sistem perimbangan kekuatan (*balance of power*) antara dua kekuatan besar yaitu AS sebagai pemimpin blok Barat yang Kapitalistis dengan Uni Soviet sendiri, maka dunia internasional pun dihadapkan pada perubahan radikal pasca Perang Dingin yaitu terjadinya hubungan antar negara yang lebih bersifat multipolar khususnya yang sekarang terjadi di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan yang merupakan warisan dari Perang Dingin lalu (*the legacy of the Cold War*).

Munculnya berbagai persoalan politik-keamanan di Semenanjung Korea adalah sebagai akibat dari dinamika hubungan kedua negara Korea yang menunjukkan bahwa berakhirnya Perang Dingin turut mendorong perubahan perilaku kedua Korea dari hubungan yang bersifat konfrontasi dan persaingan ideologi menuju kerjasama dalam menciptakan proses bagi reunifikasi damai di Semenanjung Korea. Persoalan mengenai senjata nuklir Korea Utara dan pengaruhnya terhadap keamanan regional menjadi masalah yang menarik dikaji terutama karena beberapa kontradiksi. *Pertama*, sukar dibantah bahwa tumbanganya Uni Soviet telah mengubah konstelasi politik internasional dan

¹ Perang Dingin adalah istilah yang diciptakan oleh seorang ahli keuangan AS Bernard Baruch pada April 1947. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan suatu keadaan tentang hubungan antar negara yang upaya-upayanya untuk mengalahkan dan menjegal pihak lawan termanifestasi dalam tekanan-tekanan ekonomi, propaganda, kegiatan-kegiatan rahasia, subversi aksi politik pertemuan-pertemuan organisasi internasional, langkah-langkah yang menghentikan segala macam pertempuran yang sebenarnya. Dikutip dari Michael A. Riff (ed.), *Kamus Politik Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal. 57

memperkecil terjadinya perang nuklir². Karena runtuhnya Uni Soviet mempunyai pengaruh politik yang sangat besar terhadap negara-negara Sosialis termasuk Korea Utara untuk kembali mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir untuk mencapai tujuan militer. Seiring dengan perubahan konstelasi politik internasional dari bipolar ke unipolar atau multipolar, maka senjata nuklir lebih banyak membawa konsekuensi pada *the politics of deterrence* (senjata nuklir sebagai instrumen politik) daripada *the relevance of deterrence* (senjata nuklir sebagai instrumen militer). Kedua, senjata nuklir adalah suatu instrumen militer untuk mencapai tujuan politik.³ Karena, berakhirnya Perang Dingin sesungguhnya lebih bersifat politik daripada militer, maka senjata nuklir seperti halnya dengan kategori senjata lainnya sesungguhnya merupakan instrumen militer untuk memenuhi tujuan politik⁴. Tujuan politik suatu negara nuklir berbeda satu sama lain, dalam konteks ini nuklir bagi Korea Utara bertujuan untuk menyatukan Semenanjung Korea dalam proses reunifikasi melalui kekuatan militer yang dapat memberikan keunggulan diplomasi Korea Utara baik di tingkat regional maupun internasional.

Dengan berakhirnya Perang Dingin, apapun alasannya, pengembangan dan pemilikan senjata nuklir masih tetap merupakan opsi terbuka, bagi negara "ambang nuklir" (*nuclear treshold*) baik karena pertimbangan militer, politik maupun ekonomi. Kasus pengembangan nuklir di Semenanjung Korea memperlihatkan betapa ketimpangan dalam kemampuan konvensional⁵ antara

² Kusnanto Anggoro, "Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Keamanan Pasca Perang Dingin", dalam *Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1996, hal. 70

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hal. 74

⁵ Kemampuan konvensional Korea Utara dan Korea Selatan mengacu pada perbedaan jumlah kekuatan personel militer kedua Korea serta persenjataan pendukung lainnya seperti senjata biokimia yang dapat dipergunakan untuk membantu sistem pertahanan. Dikutip dalam *ibid.*, hal. 139

Korea Selatan dan Korea Utara merupakan faktor yang mendorong pihak Pyongyang untuk mengembangkan senjata nuklir.⁶

Menguatnya isu nuklirisasi Korea Utara di Semenanjung Korea dapat ditinjau dari beberapa motivasi yang berhubungan dengan faktor strategis, ekonomi dan politik. Beberapa analis mengungkapkan bahwa motivasi strategis bagi program nuklir Korea Utara menjadi lebih signifikan terutama setelah berakhirnya Perang Dingin. Runtuhnya Uni Soviet serta menurunnya rasa solidaritas diantara negara-negara sosialis telah menyebabkan DPRK (*Democratic Peoples Republic of Korea*) terisolasi dari masyarakat internasional dimana perubahan tersebut berimplikasi pada tidak adanya jaminan keamanan yang diberikan di bawah hubungan aliansi lama Korea Utara dengan bekas Uni Soviet dan juga Cina. Dengan demikian Korea Utara lebih mengkonsentrasikan pada kemampuan konvensionalnya untuk mengimbangi secara strategis kemampuan Korea Selatan dan AS dalam hal senjata nuklir.

Motivasi ekonominya adalah munculnya krisis dalam negeri seperti kelangkaan sumberdaya, kelaparan serta kesulitan melakukan hubungan perdagangan secara internasional khususnya *partner* dagang DPRK seperti Cina dan Rusia serta kesulitan investasi asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menyebabkan Korea Utara lebih memilih mempertahankan senjata nuklirnya daripada keterbukaan ekonomi pasar yang dapat menghancurkan rejim Pyongyang. Indikatornya adalah besarnya anggaran pertahanan sekitar 22 % dari GNP (*Gros National Product*) Korut dibandingkan 3,8 % GNP Korsel⁷, Selain itu pengembangan senjata nuklir seringkali merupakan pilihan yang lebih murah dibandingkan dengan pengeluaran senjata konvensional karena senjata konvensional dianggap memiliki kekurangan terutama waktu dan biaya yang

⁶ Kusnanto Anggoro, "Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara : Relevansi Peluang dan Kendala Implementasinya", dalam Bantarto Bandoro (ed.), *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1996, hal. 138

diperlukan sangat banyak untuk dapat diproduksi secara besar-besaran dibandingkan dengan produksi senjata nuklir yang dapat dilakukan melalui fase penelitian, pengayaan dan pengembangan sudah mampu menghasilkan senjata nuklir yang lebih ekonomis. Untuk itu Korea Utara mampu memperoleh devisa cukup besar dari transfer teknologi senjata nuklir balistik ke Iran dan Pakistan yang menunjukkan bahwa pengembangan (*development*) kemampuan nuklir membuka peluang untuk memperoleh manfaat ekonomi.⁸

Motivasi terakhirnya adalah para analis memfokuskan pada situasi politik domestik di Korea Utara sendiri yaitu sejak transisi kepemimpinan dari Kim Il Sung kepada Kim Jong-Il serta tidak adanya kepastian dan kejelasan mengenai masa depan politik Korea Utara pasca Perang Dingin, sistem birokrasi yang sentralistis di tangan Kim Jong-Il telah mengakibatkan rejim tersebut lebih mendorong pengembangan senjata nuklir untuk mempertahankan status quo maupun demi masa depan kekuasaannya.⁹

Menurut Ramesh Thakur¹⁰ terdapat empat kategori negara-negara yang sensitif menyebarkan (*proliferation*) yang termasuk di ambang negara senjata nuklir (*Nuclear Weapons States*)-NWS dimana suatu negara NWS adalah :

- 1) Tidak mengklaim memiliki senjata nuklir,
- 2) Tidak mengakui pilihan senjata nuklir,
- 3) Memproduksi secara signifikan bahan-bahan dan perlengkapan nuklirnya sendiri,
- 4) Menolak untuk Menerima penyelidikan internasional mengenai bahan dan perlengkapannya tersebut.

⁷ Darryl Howlett, "Nuclearization or Denuclearization on The Korean Peninsula ?" dalam, Colin Mc Ines and Mark G. Rolls (eds.), *Post Cold War Issues in the Asia Pacific Region*, Frank Cass, Great Britain, 1994, p. 183

⁸ Kusnanto Anggoro, *op.cit.*, hal. 139

⁹ Darryl Howlett, *op.cit.*, hal 184

¹⁰ Ramesh Thakur, "Introduction", dalam Ramesh Thakur, (ed.), *Keeping Proliferation at Bay*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1998, p. 5-6

Sementara itu fluktuasi hubungan kedua Korea lebih mudah dipengaruhi melalui isu-isu seputar ancaman militer Korea Utara, *arms build-up*,¹¹ perlombaan senjata¹². Korea Utara sangat sensitif terhadap isu-isu yang berhubungan dengan program senjata nuklirnya. Selama ini masyarakat internasional mencurigai Korea Utara telah mengembangkan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya. Banyak tekanan dari luar yang menginginkan agar Korea Utara mengizinkan IAEA melakukan penyelidikan mengenai dugaan yang dilontarkan oleh dunia internasional. Namun hal itu tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Korea Utara.¹³

Adanya upaya-upaya untuk terus mendorong implementasi kesepakatan *Basic Agreement* telah mendapatkan momentumnya pada bulan Juni tahun 2000. Berlangsungnya pertemuan tingkat tinggi (KTT) pertama dan bersejarah antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il dan Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung di Pyongyang tanggal 13-15 Juni 2000 dinilai akan melapangkan jalan bagi upaya rekonsiliasi dan reunifikasi di Semenanjung Korea.

Pemimpin kedua Korea itu sepakat meningkatkan hubungan baik antara sesama negara Korea dan mengupayakan terwujudnya penyatuan Korea dengan cara damai. Menyatakan hal-hal penting sebagai berikut:¹⁴

1. Setuju untuk memecahkan masalah reunifikasi di negeri masing-masing secara independen dengan upaya terpadu bangsa Korea.

¹¹ *Arms build-up* didefinisikan sebagai peningkatan secara spiral kemampuan militer suatu negara yang terlihat antara lain dari peningkatan belanja militer, peningkatan personel militer dan modernisasi sistem persenjataan. Dikutip dalam Kusnanto Anggoro, *op.cit.*, hal. 93

¹² Perlombaan senjata didefinisikan sebagai "penyesuaian kemampuan mesin perang secara berulang, kompetitif dan timbal balik (*reciprocal*) antara dua negara atau dua kelompok negara". Dikutip dalam *ibid.*

¹³ *Gatra*, 1 Juni 1996

¹⁴ *Kompas*, 16 Juni 2000

2. Mengetahui adanya usulan federasi yang diajukan pihak Utara dan konfederasi yang diajukan pihak Selatan untuk penyatuan Korea di masa datang
3. Setuju menyelesaikan isu-isu kemanusiaan, termasuk diantaranya pertukaran kelompok kunjungan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga yang terpisah sekian lama, serta pemulihan nara pidana kedua belah pihak sesegera mungkin.
4. Setuju memajukan pembangunan berimbang ekonomi nasional melalui kerjasama ekonomi serta membangun rasa saling percaya kedua belah pihak dengan menggiatkan kerjasama dan pertukaran di semua bidang, diantaranya bidang sosial, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, lingkungan dan sebagainya.
5. Setuju menyelenggarakan dialog antara penguasa kedua belah pihak sesegera mungkin untuk membicarakan implementasi hal-hal di atas.

Kedua Korea diharapkan memperlihatkan komitmen dan ketulusan dalam mendorong proses rekonsiliasi dan reunifikasi. Korea Utara misalnya harus memperlihatkan kesungguhan dengan mengakhiri program peluru kendali yang selama ini meresahkan Korea Selatan. Sebaliknya Korea Selatan harus menunjukkan sikap percaya diri kepada Korea Utara dengan merelakan kepulauan pasukan AS. Kehadiran sekitar 37.000 tentara Amerika Serikat di Korea Selatan tentu menimbulkan kecurigaan bagi Korea Utara. Dengan menyingkirkan segala halangan, jalan menuju rekonsiliasi menjadi sangat terbuka.¹⁵

Namun, diakui oleh para pengamat bahwa proses reunifikasi kedua Korea masih akan mendapatkan rintangan khususnya dari pihak Korea Utara mengenai konsep reunifikasi itu sendiri. Korea Utara secara tradisional

¹⁵ *Kompas*, Sabtu 17 Juni 2000

menyebut reunifikasi dengan istilah " *Konfederasi Koryo Korea*"¹⁶ dengan konsep dasar sebuah pemerintahan sentral dengan otoritas diplomatik dan militer, serta pemerintahan regional yang secara administratif mengendalikan dua wilayah konfederasi.

Sebaliknya Korea Selatan mengajukan sebuah formula berupa tiga tahap reunifikasi yang disebut dengan rencana membangun masyarakat tradisional Korea berupa rekonsiliasi, kerjasama dan konfederasi Utara-Selatan penyatuan Korea. Korea Selatan mendasarkan konsepnya itu pada tiga prinsip yaitu kepercayaan diri, perdamaian dan demokrasi liberal (*human centered*) dibandingkan dengan Korea Utara yang lebih menekankan ideologi *Juche*¹⁷, perdamaian dan penyatuan nasional yang lebih besar yang dianggap kurang realistis.¹⁸ Karena ideologi *Juche* memiliki tiga prinsip dasar yaitu ideologi (*class centered*), *Peace, Grand National Unity* yang dijadikan dasar bagi pemerintah Korea Utara untuk menyatukan Semenanjung Korea kedalam konsep *Konfederasi Koryo* yang oleh pemerintah Korea Selatan dipandang kontradiksi dengan keadaan dan kondisi yang terjadi di dalam negeri Korea Utara sendiri dimana sebagian besar rakyatnya dilanda kelaparan dan krisis pangan serta kekacauan ekonomi lainnya. Karena itu pula akar yang paling fundamental dari krisis pangan di Korea Utara adalah ideologi *Juche* khususnya prinsip *self-reliance*¹⁹ yang telah diadopsi pada akhir tahun 1950-an lalu. Suatu kebijakan ekonomi

¹⁶ *Konfederasi Koryo* adalah konsep yang ditawarkan oleh Korea Utara dalam proses reunifikasi untuk menyatukan kedua Korea kedalam satu kesatuan pemerintahan berdasarkan otoritas militer. Dikutip dalam *Korea and World Affairs*, Vol. XXIV, No. 2, Summer 2000, p. 310

¹⁷ *Ideologi Juche* menunjukkan paham nasionalisme ekstrim Korea Utara yang didasarkan pada *self-reliance* atau *autarky* dalam ekonomi Korea Utara dan lebih menekankan keagungan atau kebesaran rejim juga negara yang berlebihan, dikutip dalam *Korea and World Affairs*, Vol. XXI, No. 4, Winter, 1997, p. 35

¹⁸ Untuk lebih lengkapnya lihat appendix I : "Comparison between the Unification Proposal of South and North and the Three Unification Formula" dalam *Korea and World Affairs*, Vol. XXIV, No. 2, Summer 2000, p. 315

¹⁹ *Self-reliance* yaitu satu dari tiga prinsip ideologi *Juche* yang bertujuan membangun ekonomi Korea Utara berdasarkan sistem ekonomi sosialis yang sangat terpusat, dikutip dalam Young-Ho Park, "North Korea Under Kim Jong Il and South Korea's Policy toward North Korea", *Korea and World Affairs*, Vol. XXI, No. 4, Winter 1997, p. 516

yang tertutup selama lebih dari empat dekade yang menghasilkan stagnasi ekonomi dan kemiskinan bagi rakyat Korea Utara sendiri.

Kedua Korea juga sedang mengembangkan kemampuan peluru kendali dengan tujuan yang berbeda. Bagi Korea Selatan, hal itu lebih ditujukan untuk konsentrasi pembangunan industri dan komersialisasi rudal berteknologi tinggi termasuk industri ruang angkasa. Sedangkan bagi Korea Utara dalam hal ini pengembangan senjata nuklir dan rudal jarak jauhnya memainkan peran penting sebagai "pengimbang strategis" (*strategic equalizer*) yaitu suatu senjata untuk menetralkan keunggulan konvensional pihak lawan atau yang dianggap potensial sebagai lawan.

Sementara "konfrontasi" Korea Utara dan Korea Selatan tetap merupakan perjuangan kedua belah pihak untuk mendapatkan legitimasi politik. Politik unifikasi kedua belah pihak mencerminkan perjuangan ini. Sampai sekarang tujuan politik unifikasi pihak Pyongyang adalah menyangkal legitimasi sistem Korea Selatan yang dianggapnya menghalangi keinginan Korea Utara untuk menjadi kekuatan militer yang dominan di Semenanjung Korea. Sedangkan politik pihak Seoul adalah mengakui realitas yang ada di Semenanjung Korea dan mendorong Pyongyang mengadakan dialog sehingga dapat tercapai perdamaian dan kepercayaan yang perlu untuk unifikasi.²⁰

Di lain pihak, Korea Utara yang sulit ditebak perilakunya memegang prinsip reunifikasi harus dilakukan melalui kekuatan militer, artinya Korea Utara lebih menekankan keunggulan persenjataan strategisnya seperti peluru kendali, nuklir, senjata kimia dan biologi sebagai isu yang dapat mempengaruhi Korea Selatan maupun negara lainnya. Buktinya negara itu telah menguji coba peluru kendali tiga tingkat pada Agustus 1998 yang sebagian melewati Jepang sehingga memicu spekulasi Korea Utara sedang menyiapkan lagi peluncuran rudal jarak jauh lain. Sementara pihaknya berjanji tidak akan melanjutkan uji

coba atas rudal balistik jarak jauh *Taepodong*-nya sambil tetap mengekspor rudal balistiknya ke Pakistan, Iran, Irak dan Suriah meskipun negara itu dilanda kelaparan akibat kekurangan pangan di dalam negeri.²¹

Tindakan lainnya yaitu Korea Utara telah melipatgandakan penyebaran rudal balistik *Rodong-1* menjadi lebih dari seribu buah dalam dua tahun terakhir ini, juga masih sedang membangun dua pangkalan rudal untuk menyimpan rudal *Rodong-1*, *Taepodong-1* dan *Taepodong-2* di daerah Yonglim, Provinsi Jagang dan Sangnamri di Provinsi Hamkyong Selatan. Para pengamat mengatakan Korea Utara sedang menyebarkan gaya retorika sebagai bentuk diplomasi yang menyerempet bahaya. Karena itu ada yang mengartikan ancaman itu sebagai percobaan untuk mendapatkan kembali pengaruhnya di Semenanjung Korea.²²

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan penjualan peluru kendali dan teknologi persenjataannya, meskipun telah memberikan komitmen untuk menghentikan sementara (*moratorium*) pengujian rudalnya. Kepada delegasi Uni Eropa (UE) Kim mengatakan penjualan itu merupakan "*bagian dari perdagangan*", Kim berjanji akan tetap mematuhi komitmen menghentikan percobaan rudal sekurangnya sampai tahun 2003, namun dalam soal ekspor teknologi Kim akan menjualnya apabila ada pihak yang ingin membelinya.²³

Dengan mempelajari perkembangan kondisi di Semenanjung Korea serta permasalahan yang dihadapi kedua Korea, khususnya proliferasi nuklir Korea Utara yang berimplikasi pada reunifikasi saat ini, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul :

²⁰ Byung Joon-Ahn, "Semenanjung Korea dan Keamanan Asia Timur", dalam Robert A. Scalapino, Seizaburo Sato dan Jusuf Wanandi (penyunting), *Masalah Keamanan Asia*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1990, hal. 187

²¹ *Kompas*, 23 Februari 2001

²² *Kompas*, 3 Maret 2001

²³ *Kompas*, 5 Mei 2001

**“KEBIJAKAN PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA SERTA
IMPLIKASINYA TERHADAP PROSES REUNIFIKASI DAMAI
di SEMENANJUNG KOREA “**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Permasalahan dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah akan selalu ada , sebab permasalahan itulah yang sebenarnya ingin dijawab dan dicarikan solusinya baik untuk membuat keputusan maupun sebagai tambahan pengetahuan dari disiplin ilmu tersebut. Pembahasan masalah menurut Sutrisno Hadi adalah:

"Sekali suatu persoalan telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberi formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan tersebut. Bagi penyelidikan sendiri, penegasan batasan ini akan menjadi pedoman kerja, dan bagi orang lain kepada siapa laporan ini hendak diajukan atau diserahkan. Penegasan selalu berfungsi mencegah timbulnya perencanaan." ²⁴

Berdasarkan hal di atas untuk mempermudah pembahasan, maka diperlukan batasan-batasan yang jelas agar tidak terjadi nantinya perluasan terhadap permasalahan yang diambil dan untuk itu pula ruang lingkup pembahasan dibagi menjadi dua aspek yaitu :

1.2.1 Batasan Waktu

Penulisan ilmiah ini memfokuskan rentang waktu antara tahun 1994 sampai dengan tahun 2000. Pada tahun 1994 adalah merupakan tonggak bersejarah pergantian kepemimpinan dari Kim Il-Sung kepada Kim Jong-Il serta

awal mula terjadinya krisis politik, ekonomi dan kepemimpinan pasca Kim Il-Sung. Kebijakan proliferasi nuklir Kim Jong-Il selanjutnya lebih menekankan aspek keamanan-militer semata daripada aspek ekonomi untuk mengurangi krisis pangan yang dihadapi rakyatnya.

Sedangkan tahun 2000, adalah peristiwa terselenggaranya KTT Pyongyang yang pertama dan sangat bersejarah bagi kedua Korea untuk mulai meredakan ketegangan-ketegangan di Semenanjung Korea pasca Perang Korea 1950-1953 lalu yang disadari bahwa perang tersebut tidak pernah diakhiri secara formal melalui traktat perlucutan senjata oleh kedua Korea. Konferensi Tingkat Tinggi tersebut berusaha mencapai pemahaman mengenai cara pelaksanaan proses rekonsiliasi dan juga reunifikasi damai di kawasan itu, dimana hasil-hasilnya tersebut dituangkan dalam deklarasi Pyongyang untuk diimplementasikan lebih lanjut.

1.2.2 Batasan Materi

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis berusaha membatasi materi hanya pada hal-hal yang menyangkut kebijakan proliferasi nuklir Korea Utara yang dapat mengancam dan berimplikasi terhadap proses reunifikasi yang sedang terjadi di Semenanjung Korea kini . Proliferasi nuklir itu merupakan masalah besar yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan minimal pasca KTT Pyongyang lalu, oleh karena itu upaya-upaya kedua negara untuk mencari jalan pemecahan masalah proliferasi sangat erat berkaitan dengan perilaku Korea Utara dalam berhubungan dengan Korea Selatan yang tercermin melalui sikap pemimpinnya Kim Jong-Il yang bergaya kontroversi dan penuh ketidakpastian.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal. 9

1.3. Permasalahan

Dalam memberikan permasalahan terhadap tulisan kali ini, penulis berusaha mengajukan bentuk pertanyaan yang bersifat eksplanatif artinya lebih menfokuskan pada upaya deskripsi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan eksplanasi dari fakta dan data yang berkembang saat ini berhubungan dengan kebijakan proliferasi nuklir Korea Utara sendiri. Adapun pengertian permasalahan menurut Winarno Surakhmad yaitu :

"Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai suatu rintangan yang harus dilalui dengan (dengan ilmu mengatasinya) apabila akan berjalan terus".²⁵

Proliferasi nuklir Korea Utara adalah ancaman terhadap stabilitas serta keamanan di Semenanjung Korea dalam konteks ini dapat mengancam reunifikasi yang sedang dilakukan kedua negara. Bagaimanapun juga proliferasi nuklir mempunyai motivasi militer, politik serta ekonomi bagi Korea Utara yang mengalami krisis di dalam negerinya yang masih jauh dari penyelesaian. Persoalan proliferasi ini menguat ketika Kim Jong-Il menegaskan pihaknya tidak akan membekukan kebijakan pembangunan program nuklirnya serta tetap akan menjual senjata dan teknologinya tersebut kepada negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Irak, Pakistan juga Suriah. Hal itu dikatakannya "bagian dari perdagangan" Korea Utara dengan mitra dagang asing yang selama ini mau membeli persenjataan rudal -nuklir Pyongyang untuk dijadikan bagian dari sistem pertahanan militer mereka²⁶

Munculnya proliferasi horisontal (Korea Utara dan negara lain di luar klub nuklir) menjadi satu kekhawatiran mengenai masa depan proses reunifikasi

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik*, CV Tarsito, Bandung, 1994, hal. 34

²⁶ *Kompas*, *op.cit.*

sendiri, di satu sisi Korea Utara telah mengambil sikap bahwa nuklir selain merupakan prestise juga sebagai pengimbang strategis (*strategic equilibrium*) kemampuan konvensional Korea Selatan dan Amerika Serikat yang selama ini menjadi penghalang hegemoni Korea Utara. Di sisi lain, implikasi proliferasi besar akibatnya dalam mendorong kedua Korea untuk mau bersungguh-sungguh mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea pasca Perang Korea lalu serta mulai mengupayakan langkah-langkah rekonsiliasi bersama. Ketakutan munculnya perlombaan senjata baru di Semenanjung Korea dan konfrontasi militer kedua Korea terus berkembang seiring perubahan yang terjadi di Korea Utara.

Kebijakan Proliferasi Kim Jong-Il mendapatkan "tandingan" dari presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung yang dikenal dengan "*The Sunshine Policy*"²⁷ atau kebijakan Sinar Matahari pada awal pemerintahannya. Kim Dae -Jung berusaha menekankan aspek ekonomi dan kemanusiaan dalam mendekati Korea Utara untuk mau melakukan reunifikasi damai, buktinya tahun 2000 lalu telah terselenggara KTT Pyongyang yang bersejarah sebagai upaya pengurangan ketegangan di Semenanjung Korea selama lebih dari setengah abad lalu. Upaya Kim Dae-Jung ini terus ditingkatkan untuk menciptakan perdamaian terlebih dahulu sebagai syarat reunifikasi Korea (*peace first unification later*).

Prinsip "*peace first unification later*" merupakan langkah penting bagi Kim Dae-Jung dalam mengupayakan terciptanya perdamaian terlebih dahulu antara Korea Utara dan Korea Selatan, setelah itu bersama-sama mencari cara untuk mewujudkan rekonsiliasi serta reunifikasi damai yang selama ini menjadi target pemerintah Korea Selatan. Sehingga apapun kebijakan yang diambil pihak

²⁷ "*The Sunshine Policy is a strategy with which to forge an environment suitable for leading the North to voluntarily opt for a path leading to changes and reform. Toward this end, the government came up with two core tasks : first, by adopting the principle of separating business from politics, it allowed the private sector to invest in the North; and second, by promoting projects based on a rather flexible principle of reciprocity. According to the South Korean Government, this policy is inspired by a détente strategy expecting the emergence of a North Korean Gorbachev, a regime shift in the North, and end to the Cold War on the Peninsula*". Ministry of Unification, Republic of Korea, Policy towards North Korea for Peace

Seoul atas Pyongyang selalu mengutamakan kerjasama dan dialog seperti yang tercermin dalam kebijakan *the Sunshine Policy* di atas.

Namun kedua kebijakan pemimpin negara Korea itu masih harus dibuktikan apakah proliferasi nuklir dapat menghambat reunifikasi sendiri ataukah perubahan perilaku Korea Utara dari konfrontasi menuju kerjasama membuahkan keberhasilan reunifikasi setidaknya dalam jangka pendek ini. Untuk mengetahui hal itu penulis berusaha mengajukan bentuk pertanyaan sebagai berikut :

“Mengapa kebijakan proliferasi nuklir Korea Utara berimplikasi terhadap proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea ?”

1.4. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan landasan berpijak dalam pemikiran mengenai isu atau pendapat dengan menggunakan teori untuk memecahkan dan menganalisa permasalahan. Charles Mc. Clelland mendefinisikan teori sebagai berikut :

“Teori merupakan kerangka dasar untuk mengatur fakta-fakta; teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan; teori merupakan seperangkat pernyataan mengenai keadaan yang diharapkan; teori merupakan pikiran yang spekulatif, bebas dari ikatan dari dunia nyata; teori merupakan abstraksi.”²⁸

Dalam kaitannya dengan pokok permasalahan di atas, maka peran teori sangat penting karena ia menjembatani pemikiran kita untuk berusaha

Reconciliation and Cooperation 1999, dikutip dalam Oknim Chung, “The Sunshine Policy,” *Korea and World Affairs*, Vol. XXIV, No. 1, Spring 2000, hal. 12

²⁸ Charles Mc. Clelland, *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Sistem*, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 10.

menjawab mengapa proliferasi nuklir Korea Utara berimplikasi terhadap proses reunifikasi di Semenanjung Korea. Untuk itu penulis menggunakan konsep proliferasi.

1.4.1. Konsep Proliferasi Nuklir

Untuk menjelaskan permasalahan di atas, maka penulis menggunakan konsep proliferasi yang merupakan *variabel independen* (penyebab) terhadap keberhasilan atau kegagalan proses reunifikasi di Semenanjung Korea (*variable dependen*). "Variabel independen yaitu konsep yang dipakai untuk menjelaskan dan meramalkan konsep lain dan yang terjadi sebelum terjadinya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen yaitu konsep yang hendak dijelaskan dan diramalkan kejadiannya dan yang terjadi sebagai akibat dari variabel lain."²⁹ Jadi variabel independen yang hendak dijelaskan adalah proliferasi nuklir Korea Utara dan variabel dependennya sebagai akibat dari proliferasi nuklir itu adalah proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea. Menurut Kamus ringkas Oxford yang dikutip dalam K. Subrahmanyam, proliferasi berarti "*memproduksi sendiri, menumbuhkan dengan menggandakan bagian-bagian mendasar serta meningkatkannya dengan cepat.*"³⁰ Dalam konsep proliferasi nuklir terkandung dua pengertian dasar yaitu : proliferasi vertikal dan proliferasi horisontal.³¹

Proliferasi vertikal diartikan sebagai peningkatan jumlah dan kualitas persenjataan nuklir yang dimiliki oleh negara-negara yang telah menguasai jenis persenjataan ini. Hal ini terjadi misalnya pada peningkatan jumlah wahana peluncur (ICBM, SLBM) serta jumlah hulu ledak (*war head*) baik secara keseluruhan maupun yang dipasang pada wahana peluncur seperti dalam sistem MIRV (*Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle*). Biasanya

²⁹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, hal. 110

³⁰ K. Subrahmanyam, "The Real Proliferation," dalam K. Subrahmanyam (ed.), *Nuclear Proliferation and International Security*, Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA), Washington, D.C., 1985, p. 54

proliferasi vertikal dikaitkan dengan upaya-upaya negara besar, khususnya super power dalam meningkatkan ketangguhan sistem-sistem persenjataan nuklir mereka.³² Dengan kata lain proliferasi vertikal mengacu pada pengembangan dan multiplikasi kategori senjata nuklir yang lebih baru termasuk perbaikan kualitasnya.³³

Proliferasi horisontal diartikan sebagai meluasnya kemampuan membuat, atau kemampuan persenjataan nuklir oleh lebih banyak negara lagi dari jumlah yang telah ada. Dewasa ini sulit ditemui adanya negara yang secara terbuka menyatakan bahwa ia sedang mengembangkan penelitian untuk membuat persenjataan nuklir sebagai bagian dari sistem persenjataannya.³⁴ Proliferasi horisontal juga merujuk pada akuisisi senjata nuklir oleh suatu negara yang sampai sekarang tidak memiliki begitu banyak senjata nuklir.³⁵

Proliferasi horisontal pada umumnya dapat diperkirakan terjadi melalui dua cara yaitu dengan cara langsung dan cara tidak langsung. Selain itu mungkin juga suatu negara dapat memiliki persenjataan nuklir dengan cara memperolehnya dari pihak lain. Yang dimaksud dengan cara langsung adalah usaha yang dilakukan suatu negara melalui penelitian-penelitian dan pengembangannya sendiri atau dengan bantuan pihak luar untuk membuat senjata nuklir baik melalui kilang-kilang pemurnian uranium maupun reaktor-reaktor yang dimiliki.³⁶

Adapun melalui cara tidak langsung dianggap lebih murah, karena dapat membuat senjata nuklir dengan memanfaatkan hasil sampingan dari reaktor-reaktor nuklir yang dimilikinya yang fungsi utamanya adalah untuk tujuan-tujuan damai. Pengoperasian reaktor-reaktor nuklir misalnya untuk pembangkit tenaga listrik yang kini dimiliki oleh berbagai negara di dunia, dengan

³¹ Sutopo, dikutip dalam Agus Tri Hartono, *Proliferasi Nuklir dan Implikasinya di Asia Selatan Studi Kasus : India dan Pakistan*, Depdikbud, Lembaga Penelitian Unej, Jember, 1997, hal. 14

³² *Ibid.*

³³ K. Subrahmanyam, *op.cit.*

³⁴ Sutopo, dalam Agus Tri Hartono, *op.cit.*

³⁵ K. Subrahmanyam, *op.cit.*

menggunakan bahan uranium akan menghasilkan plutonium sebagai hasil sampingan. Pada gilirannya plutonium ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar reaktor ataupun sebagai bahan baku senjata nuklir setelah melalui proses pengolahan lebih lanjut.³⁷

1.4.2. Pemicu Terjadinya Proliferasi Nuklir

Keputusan suatu negara untuk memiliki persenjataan nuklir tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan-pertimbangan *politik-diplomatik, militer-strategis dan ekonomi*. Karena itu alasan-alasan yang merangsang suatu negara untuk memiliki senjata nuklir juga bisa berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Kasus proliferasi nuklir Korea Utara misalnya dipandang memiliki pertimbangan tidak hanya strategis, politik dan ekonomi tetapi juga pertimbangan energi domestik dalam hal ini pembangkit listrik tenaga nuklir. Krisis energi listrik yang dialami Korea Utara telah menyebabkan negara itu mempertahankan reaktor-reaktor nuklirnya untuk dijadikan tempat pemrosesan energi listrik bagi kebutuhan rakyat dan industrinya di sana.³⁸

Menurut Kenneth N. Waltz³⁹ ada tujuh alasan mengapa suatu negara menginginkan senjata nuklir. *Pertama*, negara-negara besar selalu ingin menandingi senjata yang dimiliki oleh negara besar lainnya, biasanya melalui peniruan senjata baru untuk dikembangkannya. *Kedua*, suatu negara menginginkan senjata nuklir karena takut aliansi kekuatannya tidak akan membalas jika terjadi serangan oleh kekuatan besar lainnya. Maka dari itu suatu negara lebih memilih mandiri dalam kepemilikan senjata nuklir dan tidak bergantung pada aliansi keamanan lainnya. *Ketiga*, suatu negara tanpa aliansi

³⁶ Sutopo, dalam Agus Tri Hartono, *op.cit.*, hal. 15

³⁷ *Ibid.*, hal. 16

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Kenneth N. Waltz, "The Spread of Nuclear Weapons : More May Be Better," *Adelphi Papers*, No. 171, The International Institute for Strategic Studies (IISS), London, 1981, p. 7-8

nuklir akan menginginkan senjata nuklir lebih banyak lagi jika beberapa darinya telah dimiliki. Seperti Cina dan India, menjadi kekuatan nuklir karena tidak termasuk dalam aliansi nuklir dengan negara lainnya. *Keempat*, suatu negara menginginkan senjata nuklir karena keberadaannya terancam oleh kepemilikan senjata-senjata konvensional saat ini dan juga di masa yang akan datang. *Kelima*, beberapa negara meyakini memiliki senjata nuklir lebih murah dan aman sebagai alternatif perbaikan secara ekonomi dan secara militer adanya bahaya perlombaan senjata konvensional. *Keenam*, senjata nuklir untuk tujuan offensif. *Terakhir*, yaitu dengan membangun senjata nuklir suatu negara dapat meningkatkan pengaruh serta prestisenya secara internasional, sehingga hal inilah yang menjadi konsekuensi pengembangan senjata nuklir oleh suatu negara.

Lebih lanjut, motivasi suatu negara untuk mengembangkan senjata nuklir dari segi *politik-diplomatik* adalah, terdapat sejumlah pertimbangan yang dapat dikaitkan dengan usaha-usaha suatu negara untuk memiliki senjata nuklir. *Pertama*, yaitu keinginan yang dilandasi oleh pertimbangan untuk mendapatkan pengakuan dan prestise internasional, regional maupun dalam lingkungan domestik. Kemampuan membuat senjata nuklir merupakan prestise tersendiri sekurang-kurangnya dari kemampuan penguasaan teknologi negara tersebut⁴⁰. Seperti yang telah dilakukan oleh Korea Utara sampai saat ini. Pyongyang telah berhasil memproduksi senjata nuklir jarak sedang maupun jarak jauh seperti *Taepodong-1 dan 2* juga *Rodong-1 dan 2* yang merupakan keberhasilan pengembangan (*development*) teknologi nuklir yang canggih.

Kedua, keinginan untuk turut berperan serta lebih nyata dalam usaha-usaha kebijaksanaan internasional maupun regional dengan menggunakan kemampuan membuat senjata nuklir sebagai salah satu alat diplomasinya.⁴¹

⁴⁰ Sutopo, dalam Agus Tri Hartono, *op.cit.*, hal. 18

⁴¹ *Ibid.*, hal. 19

Ketiga, bagi negara-negara yang secara teknologis menunjukkan kemampuannya, baik karena kemajuan teoritis dan rekayasanya maupun karena bukti nyata melalui percobaan peledakan nuklir, kemampuan itu bisa dipakai sebagai isyarat kepada lawan agar yang terakhir ini tidak memaksanya benar-benar melanjutkan pada pilihan untuk mempergunakan senjata nuklir⁴². Korea Selatan dan Korea Utara adalah dua negara yang masing-masing mempunyai kemampuan nuklir dan tujuan yang berbeda, tetapi secara politik Korea Utara lebih menguntungkan karena disertai dengan ancaman kepada negara lain apabila ingin menekan negara tersebut. Pihak Pyongyang tidak segan-segan untuk menguji coba nuklirnya sebagai peringatan kepada negara lain supaya tidak ikut campur atas urusan senjatanya itu. Buktinya tahun 1998 lalu Pyongyang berhasil menguji coba peluru kendali *Rodong-1* yang sebagian melintasi Jepang. Sehingga membuat khawatir negara-negara lain yang menilai Korea Utara akan terus menyebarkan (*proliferation*) senjata nuklir canggihnya.⁴³

Sementara itu dari segi *militer-strategis*⁴⁴, terdapat sejumlah alasan dimana senjata nuklir dijadikan pilihan sebagai salah satu komponen persenjataannya. *Pertama*, Keinginan untuk mencapai keunggulan militer terhadap musuh atau negara yang secara potensial akan menjadi musuh. *Kedua*, untuk membangun suatu kekuatan penangkal, baik terhadap kekuatan lawan yang telah memiliki terlebih dahulu senjata nuklir, maupun untuk menghadapi ancaman kekuatan konvensional yang lebih besar dari negara tetangganya. *Ketiga*, Keinginan untuk lebih mandiri dalam pertahanan sehingga tidak terlalu menggantungkan diri pada perlindungan nuklir (*nuclear umbrella*) dari negara sekutunya atau sahabatnya dalam menghadapi ancaman militer lawan yang lebih kuat. *Keempat*, keinginan untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi militer sehingga

⁴² *Ibid.*, hal. 20

⁴³ Kompas, *op.cit.*

⁴⁴ Sutopo, dalam Agus Tri Hartono, *op.cit.*

tidak terlalu tergantung pada pasokan senjata negara-negara besar, selain dari tetap terbukanya kemungkinan untuk memiliki persenjataan nuklir sendiri.

Dengan demikian tujuan proliferasi nuklir Korea Utara adalah sebagai pengimbang strategis (*strategic equalizer*) atas kemampuan konvensional Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggapnya sebagai musuh potensialnya atau setidaknya mencegah hegemoni Amerika Serikat di Semenanjung Korea. Pyongyang telah menetapkan pilihan nuklirnya sebagai instrumen militer untuk mencapai kepentingan politik (*the politics of deterrence*) dalam konteks ini adalah mengancam proses reunifikasi yang sedang berjalan apabila Korsel tetap mendukung kebijakan AS untuk membekukan program senjata nuklirnya itu.

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi⁴⁵ pilihan tersebut berdasarkan : *pertama*, penggunaan nuklir untuk maksud-maksud damai khususnya sebagai pembangkit listrik, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih mantap di masa depan. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan percobaan-percobaan ledakan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun jalan-jalan. *Kedua*, dengan anggapan bahwa senjata nuklir akan lebih mampu memberikan bobot penangkalan dan strategis yang lebih besar. Pemilikan senjata nuklir menjadi alternatif yang lebih menarik daripada pembangunan suatu kekuatan konvensional modern yang biayanya sangat besar dan mahal.

Korea Utara secara ekonomispun mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata serta teknologi nuklirnya itu kepada negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Mesir, Pakistan dan Suriah. Negara-negara Timur Tengah merupakan pelanggan persenjataan nuklir Korut yang dapat dibeli kapan saja apabila mereka membutuhkannya. Kim Jong-Il telah menyatakan dengan tegas bahwa penjualan senjata itu adalah "*bagian dari perdagangan*" Korea Utara dengan mitra dagangnya. Disamping itu, penggunaan nuklir sebagai pembangkit listrik di Korut telah memberikan manfaat yang besar terhadap industri dalam negeri serta penerangan rakyatnya. Karena diketahui krisis

energi sedang melanda Korea Utara dan juga sebagian besar negara-negara di Asia Timur Laut lainnya yang secara masif menggantungkan kebutuhan minyak sebagai sumber energi utama negaranya. Berikut diuraikan beberapa indikator untuk menjelaskan proliferasi nuklir Korea Utara di atas sebagai kerangka konseptual penjelasan, seperti yang terlihat dalam bagan-1 di bawah ini.

Bagan-1.

Proliferasi Nuklir Korea Utara



Sumber: Kent E. Calder, *Asia's Deadly Triangle (Segitiga Maut Asia)*, Bambang Sayaka (alih bahasa), PT. Prenhallindo, Jakarta, 1996. Data diolah oleh Penulis dalam Konteks Proliferasi Nuklir Korea Utara yang Berimplikasi Terhadap Proses Reunifikasi Damai di Semenanjung Korea.

Berdasarkan Bagan-1, Korea Selatan dapat saja meningkatkan kemampuan militernya melalui pertumbuhan ekonominya yang sangat baik dibandingkan dengan Korea Utara. Jumlah GNP Korsel tahun 1998 tercatat 426 miliar dollar AS dengan pendapatan perkapita sebesar 12.400 dollar AS, sedangkan Korea Utara pada tahun yang sama GNP-nya berjumlah 14 miliar dollar AS dan pendapatan perkapitanya yaitu 900 dollar AS.⁴⁶

Dari sudut pandang yang lain, bahwa *military means* adalah masalah yang semata-mata bersifat militer. Seperti terlihat dari dinamika persenjataan, peningkatan kemampuan persenjataan suatu negara juga meningkatkan kadar

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Untuk lebih lengkapnya lihat The International Institute for Strategic Studies (IISS), *The Military Balance*, London, 2000, p. 35

ancaman yang mungkin dirasakan oleh negara lain. Selama tingkat pemilikan persenjataan masih tinggi, selama itu penyelesaian melalui saluran politik mungkin akan selalu menemui jalan buntu. Pengurangan senjata tidak mungkin terjadi selama hubungan politik belum baik. Sebaliknya hubungan politik tidak akan semakin baik kalau dalam suatu sistem yang anarkis tidak ada saling percaya antara negara satu dengan negara lain. Dalam keadaan seperti itu memiliki senjata yang canggih dianggap sebagai cara terbaik untuk meningkatkan keamanan nasional.⁴⁷

Menurut Kanti Bajpai,⁴⁸terdapat tiga faktor dalam proliferasi nuklir yaitu *supply*, *demand* dan *idiosyncratic*. Pertama, faktor *supply* yaitu perubahan struktural yang mempengaruhi kemampuan negara-negara yang anti proliferasi untuk mencegah para proliferator (penyebar) dari kepemilikan senjata penghancur massa. Secara luas, kekuatan global dan perubahan kepemimpinan serta berakhirnya konfrontasi ideologi-politik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet juga merupakan faktor *supply* ini.

Kedua, faktor *demand* menagcu pada perilaku terhadap kepemilikan WMD secara militer yang dapat mempengaruhi para proliferator menyadari pengaruh kepemilikan senjata yang berlebihan. Liberalisasi ekonomi dan demokratisasi politik serta instabilitas nyata dalam mempengaruhi tuntutan WMD tersebut. Jadi proliferator mungkin menghalangi atau mendukung senjata tersebut.

Ketiga, apakah faktor *supply* dan *demand* mendukung atau menolak proliferasi, sepertinya bergantung pada faktor *idiosyncratic*, setidaknya terdapat tiga kunci yaitu : konseptualisasi proliferasi terhadap masalah

⁴⁷ Kusnanto Anggoro, *op.cit.*, hal. 89

⁴⁸ Kanti Bajpai, "Proliferation Challenge Today and the Consequences International Study," dalam Ramesh Thakur (ed.), *Keeping Proliferation at Bay*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1998, hal. 28

keamanannya sendiri, besarnya pemikiran politik luar negeri khususnya negara-negara WMD yang diasosiasikan dalam kekuatan dan prestise diplomatik serta pengaruh koalisi persenjataan dalam politik domestik.⁴⁹

Bagi Korea Utara, faktor *demand* dan *idiosyncratic* adalah untuk meningkatkan ambisi proliferasi nuklir secara horisontal, tidak jelas apakah kalkulasi senjata nuklir tetap berpengaruh dalam instabilitas politik dalam negeri Korea Utara pasca kematian Kim Il-Sung, namun di Korea Selatan satu kenyataan bahwa pemerintahan sipil enggan menambah persenjataan nuklirnya untuk inventaris angkatan bersenjata.⁵⁰

Dengan demikian, berkaitan dengan proliferasi nuklir tersebut beberapa hal penting yang harus diingat : (1) sebenarnya, semua bangsa memelihara angkatan bersenjata; (2) intensitas kekerasan dalam tindakan-tindakan militer mungkin berbeda-beda dengan sekala yang luas; (3) sumber-sumber ketidakstabilan internasional sama sekali tidak terbatas pada tindakan dan perselisihan negara-negara nuklir; (4) walaupun telah mempunyai dampak revolusioner atas beberapa aspek hubungan internasional, banyak pengamatan mengenai kekuatan sebagai suatu sarana politik sama-sama absah bagi senjata nuklir maupun senjata konvensional.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 31-32

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 36-37

⁵¹ K.J. Holsti, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, (edisi keempat jilid dua), M. Tahir Azhari (alih bahasa), Erlangga, Jakarta, 1998, hal. 40

1.4.3. Konsep *The Security Dilemma*

Permasalahan mengapa proliferasi nuklir Korea Utara berimplikasi terhadap proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea, maka *konsep the security dilemma* bisa dipakai menjelaskan permasalahan tersebut. Berdasarkan fakta yang terjadi di Semenanjung Korea dimana proses reunifikasi damai mengalami kemandekan akibat peningkatan kapabilitas militer Korea Utara, maka konsep *the security dilemma* menjadi kerangka analisa menjelaskan persepsi ancaman militer yang dimiliki Korea Selatan dan meragukan keseriusan Korea Utara dalam melaksanakan reunifikasi damai.

Menurut Dr. Ernest Klein,⁵²dilema adalah suatu pilihan di antara dua alternatif yang sama-sama tidak menyenangkan. Sedangkan *The Chambers Twentieth Century Dictionary*,⁵³mendefinisikan dilema yaitu : "*as a form of argument in which the maintainer of a certain proposition is committed to accept one of two propositions each of contradicts his original contention ; a position where each of two alternative courses (or of all feasible courses) is eminently undesirable.*" Berkaitan dengan masalah keamanan teritorial suatu negara dan hubungan keamanan negara satu dengan negara lain, maka kata dilema tersebut dimasukkan kedalam konsep *the security dilemma*.

Adapun Charles Glaser,⁵⁴mendefinisikan *the security dilemma* sebagai : "*a situation in which the military forces required by a state to protect itself threaten the forces other states need to protect themselves; in that situation states seeking security cannot avoid threatening each other's military capabilities.*" Begitu pula Barry Buzan mendefinisikan konsep *the security*

⁵² Klein, dikutip dalam Alan Collins, "The Security Dilemma," dalam M. Jane Davis (ed.), *Security Issues in the Post-Cold War World*, Edwar Elgar Publishing Ltd., United Kingdom, 1996, hal. 181

⁵³ *The Chambers Dictionary* 1972, dalam *ibid.*

⁵⁴ Glaser 1992, dalam *ibid.*, hal. 183

dilemma lebih realistis dan pragmatis yang mendasarkan pada kekuasaan, menurutnya konsep tersebut mengacu pada : “ *in seeking power and security for themselves, states can easily threaten the power and security aspirations of other states.*”⁵⁵

Dengan demikian, inti dari konsep *the security dilemma* adalah adanya peningkatan kapabilitas militer oleh suatu negara baik untuk meningkatkan keamanannya sendiri maupun mempertahankan hegemoni militernya, akan ditanggapi sebagai upaya provokatif sehingga meningkatkan persepsi ancaman militer negara lainnya. Terlebih upaya itu dilakukan atas pertimbangan mendapatkan prestise dan meningkatkan *power* suatu negara baik di tingkat regional maupun internasional. Sehingga pada akhirnya semakin memperburuk situasi keamanan seiring tidak adanya jaminan keamanan bersama di kawasan itu untuk mengurangi tingkat ancaman militer oleh suatu negara.

Berangkat dari konsep *the security dilemma*, maka proliferasi nuklir Korea Utara secara horisontal itu bisa dilihat sebagai bagian dari *the politics of deterrence* (senjata nuklir sebagai instrumen politik). Dilema keamanan tidak hanya dialami oleh Korea Selatan tapi juga Amerika Serikat. Washington merasa terancam dengan proliferasi nuklir Korea Utara yang secara potensial diarahkan untuk menjangkau teritorial Amerika Serikat dan juga menyerang pasukan negara adidaya itu di Seoul.

Penyebaran senjata nuklir Korea Utara secara horisontal pada akhirnya juga membuat khawatir para pemimpin Amerika Serikat, terlebih Presiden George W. Bush telah mengambil kebijakan garis keras (*hard line*) pada awal pemerintahannya untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara dan juga negara-negara lain yang dianggap “bandel” terus mengembangkan senjata pemusnah massal sebagai sponsor teroris

⁵⁵ Buzan 1991, *ibid.*

internasional.⁵⁶ Dalam konteks ini, Washington tetap mengupayakan pengembangan sistem Pertahanan Rudal Nasionalnya (*National Missile Defense-NMD*) dan sistem Pertahanan Rudal Mandala (*Theatre Missile Defense-TMD*) untuk meng-*counter* ancaman nuklir potensial negara Komunis tersebut.⁵⁷

Kebijakan garis keras Amerika Serikat semakin menguat ketika George W. Bush terus memusuhi rejim Komunis dan belum menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Pyongyang. Meningkatnya proliferasi nuklir Korea Utara di satu sisi menimbulkan kekhawatiran Korea Selatan apabila reunifikasi terjadi melalui paksaan secara militer, di sisi lain juga semakin menegaskan kebijakan garis keras Amerika Serikat yang tidak akan berubah selama Korea Utara tetap mengembangkan senjata penghancur massa tersebut untuk menyerang teritorial AS dan pasukan negara itu di Korea Selatan. Sehingga pada akhirnya, *the security dilemma* yang dihadapi Amerika Serikat semakin memperburuk hubungan Pyongyang-Washington yang mengarah pada berkurangnya dukungan negara itu terhadap perbaikan hubungan Korea Utara-Korea Selatan. Dengan demikian, proses reunifikasi damai menjadi semakin tidak jelas bahkan mengalami kemandekan seiring hubungan Amerika Serikat-Korea Utara terus memanas.

Kondisi saling mengancam antara Korea Utara dan Korea Selatan juga semakin memperburuk hubungan kedua Korea. Keinginan Kim Dae-Jung untuk mengajak Kim Jong-Il keluar dari ketertutupannya dan menghilangkan rasa curiga terhadap negaranya untuk sementara ini masih belum berhasil. Karena, Kim Jong-Il juga mempunyai persepsi ancaman militer dari pasukan Amerika Serikat yang berada di Seoul

⁵⁶ *Jawa Pos*, 6 Juni 2000

⁵⁷ *Ibid.*

untuk menyerang Pyongyang, juga memandang Korea Selatan sebagai bagian dari sekutu Amerika Serikat untuk menghancurkan rejim Komunis di negaranya. Dari paparan di atas, dapat dilihat bagaimana persepsi ancaman militer yang menjadi persepsi kedua Korea ditambah kehadiran pasukan Amerika Serikat, pada akhirnya menyebabkan mandeknya proses reunifikasi Korea.

1.5. Hipotesa

Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan tentang hubungan di antara konsep-konsep. Sesudah diuji dengan bukti-bukti yang ada berdasarkan metode saintifik, generalisasi itu bisa diterima atau ditolak. Hipotesa sementara bisa menjadi pedoman dalam penelitian dan diuji dengan fakta-fakta. Pada saat hipotesa sementara ini dapat dan selesai diverifikasi dengan fakta-fakta atau gabungan dan kaitan antar fakta, maka hasilnya kita sebut kesimpulan. Dalam penelitian ilmiah, maka konklusi itu merupakan hipotesa yang lebih kuat dan stabil, tetapi belum mutlak.⁵⁸

Dengan berpedoman pada fakta yang terjadi serta seperangkat pengetahuan yang penulis miliki sebelumnya mengenai isu nuklir Korea Utara dalam hubungannya dengan proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea, maka disusunlah bentuk hipotesa sebagai berikut :

⁵⁸ Suffri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1984, hal. 53

"Semakin tinggi tingkat proliferasi nuklir Korea Utara akan mendorong kebijakan garis keras Amerika Serikat, dan peningkatan program senjata penghancur massa Korea Utara akan juga meningkatkan persepsi ancaman militer terhadap Korea Selatan yang membuat khawatir Seoul atas keseriusan Pyongyang dalam melaksanakan reunifikasi damai, sehingga pada akhirnya proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea mengalami kemandekan dan mengarah pada ketidakpastian."

1.6. Metode Penelitian

Sudah menjadi syarat dalam penulisan ilmiah untuk mengadakan penelitian yang sebelumnya harus disertai dengan dasar-dasar pemikiran terhadap obyek yang diteliti. Hal ini penting dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri sehingga penulisan tersebut mempunyai bobot ilmiah yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut The Liang Gie :

*"Metode adalah cara yang berulang-ulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya merupakan langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya untuk memeriksa kebenaran pernyataan-pernyataan mengenai gejala tersebut."*⁵⁹

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data-data sebagai bahan penunjang dimana data yang diperoleh adalah data sekunder berupa

⁵⁹ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1979, hal. 82

buku-buku, karya ilmiah, terbitan berkala, kliping surat kabar. Adapun tempat-tempat yang menjadi pengumpulan data tersebut adalah :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
3. Perpustakaan CSIS di Jakarta
4. Perpustakaan Balitbang Departemen Luar Negeri di Jakarta
5. Internet

1.6.2. Metode Analisa Data

Dari data-data yang diperoleh tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa berbagai data itu untuk dijadikan bahan pembahasan melalui teori atau konsep yang dipakai. Generalisasi dapat dilakukan dengan menghubungkan konsep-konsep tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau diuji kebenarannya. Metode analisa data ini berkaitan dengan cara berpikir deduktif yang dipakai penulis untuk mengembangkan teori dengan cara menarik deduksi dari prinsip umum (faktor ekonomi, politik dan militer) yang menghasilkan prinsip-prinsip lebih rendah (peningkatan anggaran pertahanan memicu proliferasi nuklir; peningkatan kapabilitas militer menciptakan *security dilemma* terhadap negara lain). Sesudah itu masing-masing proposisi tersebut bisa diuji dengan peristiwa-peristiwa khusus untuk melihat apakah kasus-kasus khusus itu bisa dijelaskan atau diramalkan oleh teori tersebut.⁶⁰

Cara berpikir deduktif ini berkaitan dengan strategi "teori-dahulu, kemudian-penelitian" yang dipakai penulis. Menurut Kenneth Waltz,⁶¹ bahwa tidak mungkin melakukan penelitian dengan strategi induktif, karena

⁶⁰ Mohtar Mas' oed, *op.cit.*, hal. 80

⁶¹ Kenneth Waltz, dikutip dalam *ibid.*, hal. 83

tanpa suatu teori kita tidak akan tahu dimana mau memulainya, data apa yang akan kita cari, dan sebagainya." Dari paparan di atas, berpikir deduktif ini adalah bagian dari siklus keilmuan yang berawal dari teori lalu dideduksi secara logis menuju pada hipotesa setelah itu diverifikasi terhadap fakta atau data yang menjadi sumber penelitian di lapangan. Sehingga pada akhirnya, berpikir deduktif berangkat dari hal yang umum (teori) menuju generalisasi khusus (fakta dan data).

1.6.3. Pendekatan

Pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini juga merupakan kelanjutan dari metode penelitian yang diuraikan di atas, untuk memilih suatu pendekatan yang relevan guna menjelaskan fenomena dan permasalahan yang diajukan dalam rangka mencapai derajat kebenaran yang dapat diverifikasi. Pendekatan menurut Vernon Van Dyke :

*"Pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan, dengan kata lain, pendekatan mencakup standar atau tolok ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang dikesampingkan."*⁶²

Lebih lanjut penulis menggunakan pendekatan sejarah-politik yang dianggap relevan untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam tulisan ilmiah ini. Adapun pendekatan sejarah mengacu pada konstruksi masa lalu dari kebijakan proliferasi nuklir yang dikeluarkan oleh Kim Jong-Il sekarang. Artinya, sejarah Korea Utara yang telah mengembangkan dan membangun kemampuan nuklir dari masa Kim Il-Sung sampai Kim Jong-Il menunjukkan kesamaan pola-pola sejarah yang

⁶² Vernon Van Dyke, dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 4

terulang yaitu kebijakan yang berorientasi mempertahankan kekuasaan dan menunjukkan hegemoni serta prestise regional maupun internasional dari senjata nuklir yang dimiliki sebagai bagian dari sistem pertahanan Pyongyang. Dengan demikian, penulis berusaha mengkaji pola-pola yang sama dalam kebijakan proliferasi nuklir Kim Jong-Il sebagai pengganti kepemimpinan Kim Il-Sung mengenai program nuklirnya.

Sedangkan pendekatan politik penulis digunakan untuk membantu menjelaskan kepentingan politik di balik kebijakan proliferasi nuklir Korea Utara. Berlangsungnya proses reunifikasi di Semenanjung Korea sekarang tentunya membawa konsekuensi politik bagi Kim Jong-Il untuk menunjukkan prestise regional maupun internasional pemerintahannya.



BAB II

KEBIJAKAN PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA

2.1. Program Senjata Nuklir Korea Utara Masa Kim Il-Sung

Kemampuan suatu negara untuk mengembangkan senjata nuklir dapat dilakukan melalui dua cara yaitu cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung adalah usaha yang dilakukan suatu negara melalui penelitian-penelitian atau pengembangannya sendiri atau dengan bantuan pihak luar untuk membuat senjata nuklir baik melalui kilang-kilang pemurnian uranium maupun reaktor-reaktor yang dimiliki.¹ Sedangkan cara tidak langsung yaitu suatu negara dapat membuat senjata nuklir dengan memanfaatkan hasil sampingan dari reaktor-reaktor nuklir yang dimilikinya yang fungsi utamanya adalah untuk tujuan-tujuan damai.²

Bagi negara-negara maju yang tergabung kedalam klub nuklir seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis dan Cina pengembangan nuklir melalui cara langsung lebih memberikan prestise tersendiri, karena teknologi untuk menghasilkan senjata nuklir melalui proses yang disebut siklus bahan bakar nuklir (*the nuclear fuel cycle*) telah mereka miliki. Disamping itu terdapatnya reaktor-reaktor serta kilang-kilang pemurnian uranium alam U-235 untuk diproses menjadi plutonium Pu-239 sebagai materi membuat senjata nuklir juga tersedia. Melalui penelitian dan pengkajian secara terus menerus dimungkinkan negara-negara maju tetap menghancurkan senjata

¹ Sutopo, dikutip dalam Agus Tri Hartono, *Proliferasi Nuklir dan Implikasinya di Asia Selatan : Studi Kasus India dan Pakistan*, Lembaga Penelitian Universitas Jember, Jember 1997, hal. 15

² *Ibid.*, hal. 16

nuklir).⁴ Senjata fissi murni 10-20 kiloton merupakan senjata nuklir yang paling praktis dan mudah membentuknya, sedangkan senjata yang beratnya kurang dapat menggunakan reaksi fissi dan fussi yang walaupun secara prinsip senjata fussi murni (pemaksaan temperatur tinggi untuk reaksi fussi) tidak diperoleh dari satu ledakan fissi yang belum dikembangkan selama ini.⁵

Sejarah program senjata nuklir Korea Utara telah dimulai pada tahun 1950-an pasca Perang Korea. Pada masa itu Korea Utara baru saja mengalami pertempuran dengan Korea Selatan untuk memperebutkan hegemoni kawasan dari perbedaan ideologi yang melatarbelakanginya. Aktivitas nuklir Korea Utara bermula pada tahun 1955 ketika perwakilan dari Akademi Ilmu Pengetahuan berpartisipasi dalam suatu konferensi di Eropa Timur mengenai penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Setahun kemudian Korea Utara menandatangani dua perjanjian dengan Uni Soviet perihal penelitian nuklir bersama.⁶

Berkaitan dengan program nuklir tersebut, maka Kim Il-Sung sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral (CC) Partai Pekerja Korea (*Korean Worker's Party*) dan Presiden Republik Demokratik Rakyat Korea (*Democratic People's Republic of Korea*), berambisi untuk mengembangkan senjata nuklir. Menurut Alexandre Y. Mansourov,⁷ setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakangi ambisi nuklir Kim Il-Sung yaitu : *pertama*, bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Jepang tahun 1945 membuat suatu ingatan yang

³ Ted Greenwood, George W. Rathjens and Jack Ruina, "Nuclear Power and Weapons Proliferation," *Adelphi Papers*, No. 130, The International Institute of Strategic Studies, London, 1977, hal. 2

⁴ *Ibid.*, hal. 3

⁵ *Ibid.*

⁶ Foreign Association Scientist (FAS), "The Nuclear Option," dalam <http://www.fas.org/> Juni 1993

⁷ Alexandre Y. Mansourov, "The Origins, Evolution and Future of the North Korean Nuclear Program," *Korea and World Affairs*, Vol. XIX, No. 1, Spring 1995, hal. 46

tidak dapat dilupakan Kim Il-Sung. Karena pada waktu itu, terjadi dua peristiwa dimana Korea Utara yang telah bertempur melawan tentara kolonial Jepang dan mengalami kekalahan hampir setiap pertempuran secara tiba-tiba melepaskan diri dari penjajahan Jepang selama lima puluh tahun. Disamping itu, bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat mengakibatkan kehancuran di pihak Jepang sehingga menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dari peristiwa pengeboman itulah, Kim Il-Sung akhirnya meyakini bahwa kekuatan senjata nuklir dapat digunakan untuk mengatasi kehebatan musuh dalam hal ini Jepang dengan cepat.

Kedua, adalah pengalaman penting pasukan Korea Utara selama dan pasca Perang Korea dimana ancaman intervensi militer Amerika Serikat dan penggunaan bom atom untuk melawan Korea Utara dapat terjadi secara tiba-tiba. Kim Il-Sung meyakini Amerika Serikat tidak akan menggunakan bom atom untuk memukul pasukan Korea Utara selama Perang Korea, tetapi pemerintah Harry S. Truman (Presiden Amerika Serikat pada waktu itu) menyatakan bahwa *Democratic People's Republic of Korea (DPRK)* adalah negara yang masuk "*black list*" Amerika Serikat untuk dihancurkan dengan senjata nuklir. Sehingga membuat Kim Il-Sung marah, terkejut sekaligus takut seandainya ancaman nuklir Amerika Serikat itu benar-benar terjadi pada negaranya.⁸

Berangkat dari ketakutan ancaman nuklir itulah, Kim Il-Sung memutuskan melakukan hubungan kerjasama dengan sekutu tradisionalnya Uni Soviet untuk mengembangkan program senjata nuklir bagi Korea Utara. Pada tahun 1961, Kim Il-Sung menandatangani perjanjian yang disebut *Alliance Treaties on Friendship, Mutual Assistance and Cooperation* dengan Soviet

⁸ *Ibid.*

dan Cina untuk memperoleh perlindungan di bawah payung nuklir (*nuclear umbrella*) mereka.⁹

Keputusan politik Kim Il-Sung untuk mengembangkan program senjata nuklir tentu saja dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan kapabilitas militer serta politik-diplomatik Korea Utara di tingkat regional maupun internasional. Hal ini terbukti dengan diadopsinya ideologi *Juche*¹⁰ sebagai landasan bagi suatu doktrin militer yang independen termasuk komponen nuklirnya. Dalam suatu pidato pada sidang pertama Majelis Rakyat Tertinggi (*Supreme People's Assembly*) yang keempat tanggal 16 Desember 1967, Kim Il-Sung menyatakan bahwa :

*"The government of the Republic will thoroughly implement the line of independence, self-subsistence and self defense to consolidate the political independence of the country, further strengthen the foundations of an independent national economy capable of ensuring the complete reunification, independence and prosperity of our nation, and increase the defense capabilities of the country so as to reliably safeguard its security on the basis of our own forces, by excellently materializing our Party's idea of Juche in all fields."*¹¹

Doktrin nuklir Kim Il-Sung ini lebih jauh diimplementasikan ke dalam doktrin dan strategi militer Korea Utara agar menjadi prosedur operasi standar yang dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan isu nuklir. Akan tetapi, doktrin itu tidak pernah tertulis dalam berbagai peraturan militer Korea Utara atau secara eksplisit dikembangkan dalam suatu kerja mengenai masalah militer dari Pemimpin

⁹ *Ibid.*, hal. 46-47

¹⁰ "Juche was an ideology originally introduced as a derivative of Stalinist Communism, allegedly developed through a "creative application" of Marxist-Leninist communism to North Korea primarily to serve as an ideological foundation of a monarchy in the making, featured by a dynastic political succession for the transfer of power," dikutip dalam Dong-Bok Lee, "Remembering and Forgetting": The Political Culture of Memory in Divided Korea," *Korea and World Affairs*, Vol. XIX, No. 3, Fall, 1995, hal. 429

Besar Korea Utara itu. Doktrin nuklir itu hanya sebagai "*hidden away*" dalam pemikiran dan tindakan Kim Il-Sung, sehingga doktrin nuklir Kim Il-Sung merupakan sesuatu yang tidak bisa diraba (*intangible*) bagi Tentara Rakyat Korea (*Korean People's Army-KPA*). Sebab, militer hanya tinggal melaksanakan doktrin dan strategi yang telah digariskan oleh Pemimpin Besar mereka.¹²

2.1.1. Pembangunan Reaktor Nuklir oleh Uni Soviet

Aktivitas nuklir Korea Utara pada awalnya bukanlah timbul atas kemampuan negara itu sendiri untuk mengembangkan dan memproduksi senjata penghancur massa (*weapons of mass destruction*), karena jauh sebelumnya Kim Il-Sung pada tahun 1940-an sebelum Perang Korea pecah telah melakukan upaya-upaya penting terutama mengajak sekutu tradisionalnya yaitu Uni Soviet untuk ekerjasama di bidang nuklir. Secara garis besar evolusi program nuklir Korea Utara dibagi menjadi empat tahap utama yaitu : 1) permulaan pada tahun 1950-an, 2) akumulasi pengetahuan dan keahlian teknis yang dikembangkan Korea Utara, awal tahun 1960-an sampai pertengahan tahun 1970-an, 3) implementasi bentuk dan model serta perluasan dengan cepat program senjata nuklir, akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1990-an dan 4) percepatan bentuk melalui proses pematangan mulai tahun 1994.¹³

Pada tahap pertama program senjata nuklir Korea Utara, ditandai dengan kegiatan-kegiatan penting di bawah ini :¹⁴

¹¹ Dikutip dalam Alexandre Y. Mansourov, *op.cit.*, hal. 48

¹² *Ibid.*, hal. 49

¹³ *Ibid.*, hal. 41

¹⁴ *Ibid.*, hal. 42

1. Tahun 1947, setahun sebelum DPRK berdiri pada 9 September, Uni Soviet mengirimkan suatu tim ke Korea Utara untuk melakukan penelitian tambang *monazite*¹⁵ dari akhir tahun 1949 sampai pecahnya perang Korea, Korea Utara telah mengekspor bahan-bahan *monazite*, *tantalum*, *niobium* dan *uranic* ke Uni Soviet dengan imbalan pengiriman peralatan militer dan senjata ke Pyongyang tahun 1949-1950.
2. Tahun 1952, ketika tentara Cina sedang bertempur mempertahankan garis paralel sepanjang tiga puluh delapan derajat, Cina mengirimkan Dr. Wang Gan-Chang ke Korea Utara untuk meneliti serta mengumpulkan bahan-bahan radio aktif.
3. Pertengahan 1950-an, pemerintah DPRK menetapkan Departemen Fisika Nuklir pada Universitas Nasional Kim Il-Sung dan Sekolah Industri Kim Ch'aek.
4. Tahun 1955, Uni Soviet dan Korea Utara menandatangani perjanjian kerjasama dalam proyek penelitian nuklir, dimana para ilmuan Korea Utara mulai mendapatkan pelatihan profesional di bidang fisika nuklir pada komplek pusat nuklir Dubna Uni Soviet. Juga pada tahun yang sama Korea Utara mengirim beberapa ahli ilmuan nuklirnya ke Cina untuk pelatihan nuklir pada fasilitas nuklir Cina.
5. Tahun 1959, Uni Soviet dan Korea Utara menandatangani perjanjian kedua mengenai kerjasama di bidang penelitian nuklir, serta mentransfer sebuah reaktor nuklir penelitian yang kecil ke Pyongyang.

Ketika generasi pertama ilmuan nuklir Korea Utara menyelesaikan studi dan penelitiannya pada komplek penelitian nuklir Dubna terpadu Uni

¹⁵ *Monazite* adalah sejenis *thorium* yang digunakan untuk memproduksi senjata nuklir, *ibid.*

Soviet dan kembali ke Korea Utara awal tahun 1960-an, maka pemerintah Korea Utara memutuskan untuk membangun sebuah kompleks penelitian nuklir yang sama yang dikenal dengan kompleks penelitian nuklir Yongbyon sekitar sembilan puluh mil utara Pyongyang. Alasan Uni Soviet membantu program nuklir Korea Utara pada waktu itu adalah menjadikan kemampuan militer dan senjata nuklir Uni Soviet untuk menandingi kapabilitas nuklir Amerika Serikat yang ternyata pihak AS telah terlebih dahulu mengembangkan program nuklirnya. Uni Soviet memosisikan Amerika Serikat sebagai pesaing strategisnya (*the strategic competitor*) secara global dalam hal perlombaan senjata nuklir (*the nuclear arms race*) pasca Perang Dunia II. Rivalitas kedua negara mengakibatkan berbagai konflik regional di Asia Timur Laut khususnya di Semenanjung Korea. Disamping itu pula, Uni Soviet memanfaatkan Korea Utara sebagai agen pelaksana kepentingannya atas penyebaran ideologi Sosialis-Komunis internasional melalui kekuatan militer di Semenanjung Korea.

Aktivitas nuklir Korea Utara berlanjut ketika pada tanggal 3 Agustus 1963, Brigadir Jenderal Kang Hyong-su, Atase Militer Tentara Rakyat Korea di Moskow menghubungi Deputy Pertama Menteri Pertahanan Uni Soviet, Andrey A. Grechko, untuk merundingkan kemungkinan kerjasama dalam pelatihan dan akuisisi teknologi pengembangan peluru kendali.¹⁶ Dalam bulan Agustus 1965, Uni Soviet mengirimkan sebuah reaktor penelitian 2-4 MWT (IRT 2000) dimana transfer tersebut atas kesepakatan perjanjian kerjasama nuklir tahun 1959. Selama tahun 1965, Kim Il-Sung menyatakan bahwa basis infrastruktur militer Korea Utara yaitu Akademi Militer

¹⁶ Centre for Non Proliferation Studies (CNS), *Monterey Institute of International Studies (MIIS)*, "A History of Ballistic Missile Development in the DPRK (Early Developments, 1960-1979)," dalam <http://cns.miis.edu/> tahun 1999

Hamhung (*the Hamhung Military Academy*) untuk mendukung pengembangan senjata modern termasuk peluru kendali nuklir. Dalam menetapkan organisasi tersebut, Kim mengatakan :

*"If war breaks out, the US and Japan will also be involved. In order to prevent their involvement, we have to be able to produce rockets which fly as far as Japan. Therefore it is the mandate of the Military Academy to nurture those personnel which are able to develop mid and long-range missiles."*¹⁷

Dari pernyataan Kim Il-Sung di atas, dapat dilihat bahwa karakteristik nuklir Korea Utara adalah untuk tujuan defensif (*defensive weapons*). Senjata defensid adalah senjata untuk menghancurkan sasaran militer, dalam hal ini berbeda dengan senjata ofensif yaitu senjata yang dapat digunakan untuk menghancurkan sasaran non-militer.¹⁸ Strategi defensif Kim Il-Sung ini diyakini secara kuat untuk menghantam kehadiran pasukan militer Amerika Serikat di Korea Selatan, untuk mencapai tujuan itu, Kim Il-Sung mengerahkan 1,1 juta tentaranya pada garis depan sepanjang perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Namun jika pecah perang total, Kim tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk melawan saudaranya di Selatan, hal ini berkaitan dengan pengalaman dan sejarah Perang Korea lalu. Kim Il-Sung akan mengarahkan sasarannya pada tentara Amerika Serikat beserta arsenal nuklirnya di Korea Selatan yang dianggapnya imperialis terhadap bangsa Korea.

Pada tahap ketiga yaitu tahun 1975, Korea Utara berinisiatif membangun sebuah reaktor nuklir lokal 30 MW pada fasilitas nuklir Yongbyon dan pada saat yang sama menetapkan infrastruktur yang

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kusnanto Anggoro, "Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Militer Pasca Perang Dingin," dalam *Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hal. 78

Sebagai bagian dari perjanjian bantuan militer dengan Uni Soviet tahun 1965 dan 1967, Korea Utara menerima sekitar 27 sampai 63 roket artileri FROG-5 (3R10 Luna-2), 9 TEL (*transponder-erector-launcher*) dan sejumlah perlengkapan lainnya. Sistem persenjataan itu ditambah dengan 12 FROG-6. Adapun FROG-5 dilengkapi dengan sebuah pengangkut peluncur tegak yang didasarkan pada chasis roket artileri 3R 10 yang berbahan bakar padat dengan jangkauan maksimum 55 km beserta hulu ledak (*warhead*) 408 kg berkekuatan tinggi (*high explosive*). Roket ini memiliki kemungkinan kesalahan sirkular (*circular error probable-CER*) atau kemampuan tembak terhadap sasaran sekitar 40 km, adapun data teknisnya lihat tabel-1 di bawah ini.

Tabel-1
Karakteristik Roket Artileri FROG

	3R 10 Luna-1 (FROG-5)	9M21E Luna-M (FROG-7 B)
Berat (ton)	1,9	2,5
Berat Hulu Ledak (kg)	400-450	420-457
Panjang (m)	9,1	9,4
Diameter (m)	0,4	0,54
Jangkauan Maksimum (km)	55	65
Jangkauan Minimum (km)	15	15
Kemungkinan Kesalahan (m)	800	400
Jenis Hulu Ledak	Ledakan Tinggi	Ledakan Tinggi

Sumber : Centre for Non Proliferation Studies (CNS), "A Ballistic Missile Development in the DPRK (Early Development, 1960-1979)," dalam <http://cns.miis.edu/1999>

Melalui penetapan program pekluru kendali balistik itu dipastikan Pyongyang membuat keputusan untuk menambah serta meluaskan kekuatan FROG dimana upaya ini diyakini terdiri dari tiga subkomponen yaitu

akuisisi 9M21E Luna-M (FROG 7-B), FROG-5, mengembangkan hulu ledak kimia bagi sistem tersebut. Dengan demikian, mulailah usaha untuk mengembangkan model dan bentuk rudal balistik dengan hulu ledak nuklir baru berdasarkan kemampuan dan teknologi Korea Utara sendiri.²³

2.1.2. Kerjasama Nuklir dengan Cina

Karena hubungan Korea Utara-Uni Soviet pada akhir tahun 1960-an mulai memburuk atas penolakan Moskow untuk menyediakan sistem missil tambahan kepada Korea Utara, maka pihak Pyongyang berusaha mencari cara lain untuk memodernisasi peralatannya guna mempertahankan kapabilitasnya. Bulan September 1971, Korea Utara menandatangani suatu perjanjian militer skala luas dengan Cina untuk akuisisi, pengembangan dan produksi sistem senjata modern. Perjanjian tersebut termasuk akuisisi rudal Cina, transfer teknologi pengembangan dan penelitian rudal serta pelatihan personel Korea Utara dengan Cina. Hasil pertama yang dapat dirasakan dari kerjasama ini adalah bantuan Cina untuk mereorganisasi perakitan yang telah dibangun Uni Soviet dan memperbaharui program SA-2, SS-N-2 styx, SSC-2b.²⁴

Alasan Korea Utara mengadakan kerjasama militer dengan Cina adalah karena keikutsertaan Tentara Sukarelawan Rakyat Cina (*Chinese People's Volunteer Army*) yang mempunyai pengalaman tempur untuk menyerbu Korea Selatan sehingga mengakibatkan pecahnya Perang Korea tahun 1950-1953. Bantuan dan dukungan Cina pada waktu itu menjadi motivasi pendukung Korea Utara untuk menguasai dan menjadikan Korea

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Selatan bagian dari ideologi Komunis. Atas dasar solidaritas sesama negara Sosialis itulah, pihak Pyongyang mengalihkan hubungan strategisnya kepada Cina yang disebutnya "*big brother*".

Segera setelah bantuan reorganisasi Cina itu, Korea Utara memperoleh peluru kendali seperti HQ-1 dan HQ-2 (CSA-1) SAMs serta rudal jelajah anti kapal (*anti-ship cruise missile*) jenis SY-1 (CSS-N-1). Rudal HQ-1 adalah sebuah rudal jelajah jenis SA-2 yang telah ditambahkan kemampuan mesin baru, sedangkan HQ-2 yaitu rudal jelajah jenis HQ-1 yang telah disempurnakan jangkauan serta ketepatannya, lalu SY-1 adalah rudal jenis SS-N-2 styx Uni Soviet yang memperoleh izin produksi yang kesemuanya itu diyakini telah dikirimkan secara langsung oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina (*People's Liberation Army*) kepada rejim Kim Il-Sung.²⁵

Selama tahun 1970-an itulah, Korea Utara terus meningkatkan kapabilitas program peluru kendali nuklirnya dengan meningkatkan pelatihan, pemrosesan bahkan diyakini mampu memproduksi jenis HQ-2 dan HY-1 buatan lokal, walaupun pada taraf tertentu masih mengandalkan bantuan serta komponen rudal Cina.²⁶ Dalam perkembangan selanjutnya, Korea Utara mengalami masalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil serta teknologi yang dibutuhkan untuk membuat suatu peluru kendali balistik juga keahlian yang relevan dengan program roket artileri serta rudal jelajah anti kapal. Untuk itulah Korea Utara mulai melihat peran Mesir guna membangun hubungan strategis-diplomatik melalui perjanjian kerjasama dalam pengembangan peluru kendali kedua negara.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Selain Mesir, pemerintah Iran juga pada tahun 1980 bekerjasama dengan Korea Utara mengenai akuisisi rudal balistik taktis dan teknologi rudal. Kedua negara juga sepakat untuk pertukaran rudal, untuk itu Iran siap menyediakan dana bagi proyek rudal balistik Korea Utara.²⁸ Bulan Juni 1987 sebagai tindak lanjut dari perjanjian di atas, Iran menyediakan dana sebesar 500 juta dollar AS untuk membeli sekitar 90-100 rudal Scud-B. Dengan demikian berarti Iran menerima Scud siap tempur pertamanya dari Korea Utara. Menurut Joseph Bermudez, *"hal ini merefleksikan tidak hanya arti kontrak yang ditandatangani Korea Utara dan Iran, tapi yang paling penting adalah dana Iran kepada program rudal Scud-B khususnya dan Korea Utara umumnya."*²⁹

Begitu pula dalam perjanjian kerjasama pengembangan rudal antara Korea Utara dan Mesir, fokus utamanya adalah penyempurnaan rudal jenis R-17 E Uni Soviet (versi Scud-B yang diekspor Mesir) sebagai langkah awal menuju pada produksi rudal balistik dalam negeri di masa yang akan datang dengan jangkauan dan ketepatan yang lebih sempurna. Pada bagian kerjasama tersebut dilakukan pertukaran ilmuan dan teknisi kedua negara.³⁰ Adapun alasan Korea Utara mengadakan kerjasama pengembangan rudal balistik dengan Mesir adalah karena kapabilitas negara tersebut yang mampu memproduksi rudal balistik jarak jauh segera setelah perang melawan Suriah bulan Oktober 1973. Sedangkan aspek yang paling signifikan dari perjanjian Korea Utara-Mesir yaitu Mesir mentransfer

²⁸ Joseph S. Bermudez, Jr. and Seth Carus, "The North Korean 'Scud B' Programme," *Jane's Soviet Intelligence Review*, April 1989, dikutip dalam Michael Ertman, *op.cit.*, hal. 615

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Centre for Non Proliferation Studies (CNS), Monterey Institute of International Studies (MIIS), "A History of Ballistic Missile Development in the DPRK (First Ballistic Missiles, 1979-1989)," dalam <http://cns.miis.edu/1999>

beberapa rudal R-17 E Soviet, MA2-543 TELs, juga pertukaran insinyur, teknisi dan personel militer kedua negara selama tahun 1980-an.³¹

Segera setelah itu Korea Utara secara gemilang mampu mengadopsi teknologi rudal jenis R-17 E Soviet dengan memproduksi aplikasi jenis terbaru bernama Hwasong-5 (prototipe Scud Model A). Proyek ini di bawah pengawasan Divisi Rudal Terpadu Akademi Ilmu Pertahanan dan Biro Industri Mesin keempat, dimana kedua organisasi ini bagian dari Komite Ekonomi Kedua. Karakteristik Hwasong-5 yaitu mempunyai jangkauan 280-320 km dengan sebuah hulu ledak 1000 kg.³² Dengan hasil ini, maka sekali lagi menunjukkan ambisi nuklir Kim Il-Sung tidak pernah berhenti walaupun itu dipandang kontradiksi dengan kondisi internal rakyatnya yang sedang menderita. Pyongyang juga menyadari bahwa tujuan program pengembangan senjata nuklir pada awalnya adalah untuk menyatukan Semenanjung Korea kedalam kekuasaan rejim Kim Il-Sung serta meningkatkan prestise dan pengaruh baik di tingkat regional maupun internasional.³³

Program senjata nuklir Korea Utara ini selalu dihubungkan dengan isu reunifikasi berupa penyatuan menyeluruh Semenanjung Korea kedalam satu pemerintahan sentralistis-militeristis. Karena sampai saat ini Pyongyang masih menganggap Seoul sebagai musuh utamanya (*the main enemy*) yang harus ditundukkan. Maka dari itu, strategi militer Korea Utara terhadap Korea Selatan adalah serangan kilat (*blitzkrieg*) yaitu menciptakan kepanikan yang luar biasa di Korea Selatan pada tahap awal peperangan dengan melancarkan serangan secara simultan di garis depan dan belakang,

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ The Ministry of National Defense Republic of Korea, *Defense White Paper 1999*, hal. 36

mengacaukan dengan cepat secara menyeluruh daerah di Selatan melalui manuver angkatan bersenjata dengan tank, kendaraan lapis baja serta peluncuran artileri untuk mengambil inisiatif perang. Setelah itu menyapu seluruh tempat di Selatan sebelum pasukan Amerika Serikat datang.³⁴

2.2. Pengembangan Senjata Penghancur Massa Pada Masa Kim Jong-Il

Korea Utara adalah salah satu negara Duni Ketiga yang paling berambisi untuk masuk kedalam klub nuklir yang diyakini mampu meningkatkan status negara itu di tingkat regional maupun internasional. Masalah proliferasi nuklir horisontal Korea Utara secara regional dipandang membawa implikasi yang sangat komplek terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Timur secara keseluruhan. Proliferasi nuklir horisontal, dalam kontek ini kapabilitas nuklir Korea Utara mungkin akan menempatkan dunia dalam situasi yang lebih berbahaya oleh karena makin banyaknya negara yang menguasai persenjataan nuklir, maka makin besar pula resiko terjadinya perang nuklir.³⁵ Tetapi di lain pihak, sampai batas-batas tertentu proliferasi nuklir juga dianggap akan mempertahankan stabilitas keamanan, karena pada dasarnya senjata nuklir berfungsi sebagai alat untuk menangkal (*deterrent*).³⁶

³⁴ The Ministry of National Defense Republic of Korea, *Defense White Paper 1998*, hal. 35

³⁵ Sutopo, dalam Agus Tri Hartono, *op.cit.*, hal. 23

³⁶ Penangkalan didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara menggunakan ancaman kekuatan militer untuk mencegah negara lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dengan meyakinkannya bahwa biaya yang harus dibeusnya jauh lebih besar dibanding peluang keuntungan politik yang diraihnya. Thomas C. Schelling dan Morton H. Halperin, *Strategy and Arms Control*, Washington : Pergamon Brassey's, 1985, hal. 3, dikutip dalam Kusananto Anggoro, *op.cit.*, hal. 72

1. Mengindoktrinasi semua anggota militer dengan ideologi *Juche*,
2. Menjamin kepemimpinan tunggal partai,
3. Memperkuat dan melatih aktivitas anggota partai dalam militer,
4. Mengumpulkan semua anggota partai dalam militer
5. Memperkuat aktivitas Liga Pemuda Pekerja Sosialis⁴⁰ dalam militer,
6. Memperkuat aktivitas Komite Partai Angkatan Bersenjata Rakyat untuk mengimplementasikan kebijakan militer partai.

2.2.2. Produksi Senjata Nuklir dan Peluru Kendali

Penggunaan energi nuklir sipil dan militer terkait dengan dua titik kritis dalam siklus bahan bakar nuklir. *Pertama*, ketika digali dari tambang, uranium sama sekali tidak sesuai untuk reaktor nuklir, harus diperkaya menjadi sekitar tiga persen (U-235) untuk mempertahankan reaksi rantai terkendali. Kapasitas untuk memproduksi uranium yang sedikit diperkaya (LEU) semacam itu tidak secara otomatis menciptakan kapasitas untuk memproduksi uranium yang sangat diperkaya (HEU) yang sesuai untuk digunakan sebagai inti bom atom eksplosif. Kapasitas tersebut merupakan langkah teknis berikutnya yang sangat dekat dengan proses pembentukan plutonium.⁴¹

Titik kritis kedua dalam siklus bahan bakar nuklir dimulai setelah uranium yang diperkaya itu dikonsumsi, limbah nuklir atau sisa abu,

³⁹ *Ibid.*, hal. 641

⁴⁰ *The Socialist Workers' Youth League* (Liga Pemuda Pekerja Sosialis) adalah organisasi politik lainnya yang ada dalam militer yang terdiri dari semua anggota militer yang tidak termasuk anggota partai. Liga ini bertugas di bawah pengawasan Departemen Politik dan Komite Partai untuk mengumandangkan "semangat revolusi" dalam melaksanakan tugas partai yang diberikan kepada mereka. *Ibid.*, hal. 643

sebagian diantaranya bisa dipisahkan secara kimia atau diproses ulang dan digunakan lagi sebagai bahan bakar. "Pemrosesan kembali" ini menghasilkan plutonium, bahan utama bom atom. Plutonium mempunyai dua manfaat dimana plutonium dapat dipisahkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar sipil yang tidak berbahaya. Tetapi plutonium juga dapat menjadi salah satu di antara dua bahan dasar yang diperlukan untuk menciptakan bom atom.⁴²

Adapun peralihan kekuasaan dari Kim Il-Sung kepada Kim Jong-Il di Korea Utara turut mempengaruhi kebijakan proliferasi nuklir pemerintahan selanjutnya. Politik nuklir Kim Jong-Il adalah menetapkan organisasi komando dan kontrol terhadap program nuklirnya yang mempunyai dua aspek tujuan, baik sipil maupun militer. Sistem komando dan kontrol aspek militer program nuklir Korea Utara ditangani oleh Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Rakyat Korea di bawah Biro Pertahanan Nuklir dan Kimia (*Nuclear and Chemical Defense Bureau-NCDB*) yang mengatur aplikasi militer strategi penelitian dan pengembangan nuklir oleh *Korean People's Army* dalam perang nuklir. Biro ini mengoperasikan sebuah Pusat Analisa Atom Tandingan (*Counter Nuclear and Atomic Analysis Centre-CNAAC*) yang mengkoordinasikan kerja bentuk dan pengembangan nuklir bagi KPA melalui sejumlah laboratorium penelitian nuklir yang tersebar di seluruh negara tersebut.⁴³

Sedangkan aspek sipil dari program nuklir Korea Utara diatur oleh Kementerian Industri Energi Atom (*Ministry of Atomic Energy Industry*) beserta Departemen Jenderal Energi Atom untuk menangani kebutuhan akan

⁴¹ Central News Agency, 11 Mei 1995, dikutip dalam Kent E. Calder, *Asia's Deadly Triangle (Segitiga Maut Asia)*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 1996, hal. 86

⁴² *Ibid.*

energi listrik domestik bagi rakyatnya yang sebagian besar terancam kekurangan akibat krisis energi khususnya minyak bumi sebagai energi utama di Korea Utara.⁴⁴ Korea Utara juga mengalokasikan senjata nuklir dan peluru kendali balistiknya pada semua angkatan dalam KPA seperti *the Ground Forces (AD)*, *the Air Forces (AU)* dan *the Navy (AL)* serta *the Air Defense Forces* (pasukan elite AU). Saat ini, KPA memiliki tiga sistem penghantar rudal yaitu : peluncur mobil untuk menghantarkan rudal jenis No Dong-1, peluncur melalui pesawat MIG-23 dan peluncur dari kapal selam klas Gulf untuk rudal No Dong-2.⁴⁵

Peran *the KPA Air Forces* lebih penting daripada *the Army* atau *the Navy* sebagai komando dan kontrol program nuklir Korea Utara dari aspek militer, karena sejak awal aplikasi militer program nuklir tersebut menyertakan program pengembangan rudal dengan tujuan utama adalah menghantam Jepang dan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di sana, jika penangkalan (*deterrent*) nuklir pecah di Semenanjung Korea. Tujuan utama ini ditambah dengan kapabilitas serangan jarak jauh dari hulu ledak yang dimiliki oleh Korea Utara.⁴⁶

Apabila pecah perang di Semenanjung Korea, maka penggunaan senjata nuklir Korea Utara juga diarahkan kepada sasaran seperti kota-kota utama di Korea Selatan (Seoul, Pusan, Taegu), hal ini dikenal dengan strategi kontra nilai (*counter value*) atau kontra kota (*counter city*) yaitu serangan yang dikonsentrasikan kepada pusat-pusat perkotaan yang utama.⁴⁷ Berbeda dengan *counter force* (penghancuran kekuatan perang lawan) yang

⁴³ Alexandre Y. Mansourov, *op.cit.*, hal. 53

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 55

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 54

⁴⁶ *Ibid.*

menunjukkan bahwa targetnya adalah fasilitas-fasilitas militer dan industri yang ada di pihak lawan.⁴⁸ Adapun strategi militer Korea Utara yang didasarkan pada pemikiran ideologi *Juche* adalah menyatukan Semenanjung Korea melalui revolusi kekerasan atas kekuatan militer pada saat peristiwa penting tiba. Peristiwa itu adalah ketika situasi yang tidak menguntungkan secara politik dan militer yang disebabkan oleh ketidakadilan di Korea Selatan serta penarikan pasukan Amerika Serikat, melalui teknik propaganda, anti pemerintah serta serangan kilat.⁴⁹ Kapabilitas rudal Hwasong-6 (Scud Mod.C, Scud-C dan Scud PIP) kelanjutan dari Hwasong-5 diyakini mampu menjangkau daerah-daerah sasaran selain Korea Selatan (lihat tabel-2) yang jelas merupakan bukti pengembangan (*development*) senjata penghancur massa Korea Utara secara gemilang.

Tabel-2
Jangkauan Obyektif Peluru Kendali Balistik Korea Utara

Target	Perkiraan Jangkauan
Seluruh Korea Selatan	500 km
Pangkalan Militer AS dan kota-kota utama di Jepang	1.000-1.500 km
Pangkalan Militer AS di Asia Timur	1.500-2.000 km
Pangkalan Militer AS di Alaska dan Samudra Pasifik	4.000-4.600 km
Daratan Amerika Serikat	6.000 km +

Sumber: CNS, "A History of Ballistic Missile Development in the DPRK (Longer Range Designs, 1989-Present)," dalam <http://cns.miis.edu/1999>

⁴⁷ Theodore A. Coulombis and James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional (Keadilan dan Power)*, Mercedes Marbun (alih bahasa), Putra Abardin, 1999, hal. 227

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Defense White Paper 1998, *op.cit.*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan para pemimpin Korea Utara menetapkan program peluru kendali balistik jarak jauh (termasuk Hwasong-6, No Dong, Taepo Dong-1 dan Taepo Dong-2) secara komprehensif yaitu : *pertama*, berakhirnya Perang Iran-Irak yang segera memfokuskan kembali produksi Hwasong-5 untuk digunakan dalam berbagai tujuan. *Kedua*, keinginan Korea Utara untuk menyerang sasaran Korea Selatan dan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang. *Ketiga*, keinginan Korea Utara untuk mengembangkan kekuatan rudal strategis yang mampu menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Asia Timur dan daratan AS secara keseluruhan. *Keempat*, mampu meningkatkan prestise internasional dengan memproduksi dan mengakuisisi rudal balistik untuk mempertahankan serta memperkuat kepemimpinan rejim Kim Jong-Il di Korea Utara.⁵⁰

Perlu dibedakan pengertian rudal balistik (*a ballistic missile*) dengan rudal jelajah (*a cruise missile*)⁵¹ yang belakangan juga dikembangkan Korea Utara . Rudal Hwasong-6 dengan hulu ledak nuklir seberat 770 kg merupakan pengembangan dari rudal Hwasong-5 yang lebih dulu menggunakan hulu ledak kimia, jangkauan maksimum rudal balistik ini adalah 550 km yang mampu mencapai sasaran bagian utara Korea Selatan. Hwasong-6 ini dikategorikan kedalam sistem rudal SRBM (*short range ballistic*

⁵⁰ Centre for Nonproliferation Studies (CNS),” (A History of Ballistic Missile Development in the DPRK Longer Range Designs, 1989-Present),” dalam <http://cns.miis.edu/1999>

⁵¹ Rudal balistik adalah salah satu rudal yang muatannya mampu mencapai sasaran dengan cara ditembakkan melalui peluncur sehingga terbang bebas sepanjang jalur tembakan. Bagian dari tembakan rudal balistik jarak jauh terjadi di luar atmosfer dan membawa serta hulu ledak atau rudal sendiri. Sedangkan rudal jelajah seperti yang didefinisikan dalam Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah, adalah sebuah rudal yang mempunyai kendaraan peluncur sendiri dan mampu terbang menggunakan aerodinamis dengan membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Rudal seperti ini contohnya rudal jelajah anti kapal (*anti-ship cruise missile*), rudal jelajah serangan darat, rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan rudal jelajah dari kapal selam. Dikutip dalam *World Missile Chart*, USA, 1999

missile)⁵². Kim Jong-Il juga mengalokasikan rudal balistik ini kedalam resimen Hwasong-6 di bawah kontrol staf jenderal yang markas besarnya berada di daerah Chiha-ri (sekitar 80 km tenggara Pyongyang dan 50 km utara DMZ).⁵³

Selain rudal Hwasong-5 dan Hwasong-6 masih ada Scud-B, DF-61, SA-2/HQ-2 yang masuk kedalam sistem rudal SRBM. Bagi Korea Utara, rudal-rudal jarak dekat ini bertujuan menepaia sasaran Korea Selatan yang berbatasan dengan zona demiliterisasi yang merupakan tempat paling panas di dunia, karena pasukan Korea Utara dan Korea Selatan saling berhadapan untuk saling serang apabila pecah perang baru di Semenanjung Korea dengan upaya berupa propaganda, provokasi dan agitasi militer kedua belah pihak. Adapun sistem rudal yang kedua yaitu MRBM (*medium range ballistic missile*)⁵⁴ yang terdiri dari rudal No Dong-1 satu tingkat berhulu ledak 700 kg dengan jangkauan maksimal 1.500 km, rudal Taepo Dong-1 dua tingkat hulu ledaknya 700-1000 kg yang mampu menjangkau daerah sejauh 2.500 km, masih ada lagi Rodong-1, No Dong-2 dan Rodong-2 (lihat tabel-3) yang semuanya itu masih dalam tahap pengembangan (*development*).

Pada bulan Mei 1993, Korea Utara untuk pertama kali berhasil meluncurkan tiga peluru kendali permukaan-ke-permukaan (*surface-to-surface missile/SSM*) Rodong-1 masuk kedalam laut Jepang. Rodong-1 mampu membawa hulu ledak biologi, kimia bahkan nuklir yang semuanya itu dimiliki oleh Korea Utara dengan daya jangkau 630 mil yaitu mampu menyerang Osaka, kota terbesar kedua Jepang.⁵⁵Pyongyang juga sedang

⁵² SRBM yaitu rudal balistik jarak dekat yang mempunyai jangkauan kurang dari 1.000 km, dikutip dalam <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/missile/> 14 Agustus 2001

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ MRBM yaitu rudal balistik jarak menengah yang mempunyai jangkauan antara 1.000-2.500 km, *ibid.*

⁵⁵ Kent E. Calder, *op.cit.*, hal. 37

Tabel-3
Karakteristik Rudal Balistik Korea Utara

Klas	Nama	Jangkauan Mak. (km)	Hulu Ledak (kg)	Tahap	Panjang (m)	Diameter (m)	Berat (ton)	DPRK IOC*	
SRBM	SA-2/HQ-2 SSM	60-160	190	2	10,7	65115	2,287	1976	
	DF-61	600	1.000	1	9,0	1,0	6,0	n.a	
	Scud-B (R-17 E)	300	1.000	1	11,2	884	5,86	1961	
	Hwasong-5 Prototype (Scud Mo. A)	300	1.000	1	11,2	884	5,86	1984	
	Hwasong-5 (Scud Mod.B)	320-340	1.000	1	11,2	884	5,88	1985	
	Hwasong-6 (Scud Mod.C, Scud-C, Scud PIP)	500	770	1	11,3	884	5,93	1989	
	MRBM	No-Dong (Nodong-1, Rodong-1, Scud Mod.D, Scud D)	1.350	1.200	1	16,0	1,32	16,25	1993
		Taepodong 1 (Daepodong 1, Nodong 2, Scud X, Scud Mod. E, Rodong-2)	2.500	700-1.000	2	26,5 (13,7/11,8)	1,32/884	20,7	1998
IRBM		Taepodong-1 SLV	4.000	50-100	3	26,0	1,32/884/884	18,7	1998
	CBM	Taepodong-2 (Daepodong-2, Nodong-3)	6.700	700-1.000	2	32	2,4/1,32	64,3	2000
(Three Stage)		6.000 +	100-500		(16/14)				
Taepodong-2, Taepodong-3)		10.000 12.000	500-1.000	3	?	?	?	?	

Sumber : Centre for Nonproliferation Studies (CNS), Monterey Institute of International Studies, "A History of Ballistic Missile Development in the DPRK (Longer Range Design, 1989-Present)." Dalam <http://cns.miis.edu/1999>

*DPRK IOC : *Initial Operation Capability* yaitu sistem rudal yang ditempatkan oleh Korea Utara kedalam tahap pengembangan lebih awal dibandingkan dengan apa yang dilakukan negara lainnya.

Sedangkan penggunaan senjata nuklir untuk aplikasi militer merupakan tujuan utama rejim Kim Jong-Il untuk menyatukan Semenanjung Korea kedalam Komunis melalui kekuatan militer secara revolusioner. Karena, Korea Utara memandang keberadaan 37.000 pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan adalah penghalang terbentuknya masyarakat Sosialis-Komunis seperti yang diamanatkan dalam Konstitusi Partai Pekerja Korea yang kelima, November 1970 yaitu : *"tujuan utama Partai Pekerja Korea adalah menjamin kejayaan sosialisme di bagian utara Republik dan membawa serta program revolusioner demokratik yang anti-imperialis dan anti-feodal di seluruh negara dan sementara tujuan akhirnya adalah untuk membangun suatu masyarakat Komunis."*⁶⁰ Maka dari itu, satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan itu adalah penggunaan kapabilitas senjata penghancur massa (seperti senjata nuklir, biologi, senjata kimia dan rudal balistik) untuk "membebaskan Korea Selatan dari imperialis Amerika Serikat yang pada akhirnya membangun rejim pro-Komunis di Selatan.

Dengan demikian, ancaman militer Korea Utara terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Korea Selatan dan dalam skala yang lebih luas menghantam Jepang merupakan sumber ketidakstabilan di Semenanjung Korea saat ini. Adapun upaya nyata Kim Jong-Il adalah pihaknya terus mengembangkan kapabilitas produksi ICBM (rudal balistik antar benua) Taepo Dong-1 dan Taepo Dong-2 yang mampu membawa hulu ledak nuklir seberat 1.000 kg yang diperkirakan selesai awal tahun 2004. Jika Korea Utara mampu menghasilkan 5 sampai 10 rudal pertahun, maka

⁶⁰Dikutip dalam Baek, Jong-Chun," A Comparative Study of South and North Korea, *National Unification Board*, Seoul, 1988, hal. 290

kehancuran dengan 1000 kg *unitary*.⁶⁴Berikutnya akurasi lebih baik 'better' dengan CEP 0,1 km mampu menghancurkan 85,0 % kerusakan untuk 1000 kg *submunisi* dan 19,0 % pada 1000 kg *unitary*, 12,4 % dari 500 kg *unitary* sampai pada 2,8 % kehancuran dengan hulu ledak 50 kg *unitary*.

Dari tabel-4, dapat dilihat bahwa akurasi baik atau 'good' diukur berdasarkan CEP 0,25 km dengan kemampuan menghancurkan sasaran 30,2 % pada 1000 kg hulu ledak *submunisi* dan 3,9 % kerusakan pada 1000 kg *unitary*. Begitupun akurasi menengah, rendah sampai sangat rendah kesemuanya itu diukur berdasarkan kemampuan CEP dan berat masing-masing hulu ledak (HE) yang dibawanya, dari 1000 kg *submunisi*, 1000 kg *unitary*, 500, 200 sampai terkecil yaitu 50 kg *unitary*. Hal ini berarti, semakin ringan hulu ledak serta semakin kecil CEP-nya, maka daya hancurnyapun semakin berkurang. Jadi kesimpulannya adalah hulu ledak tinggi (*high explosive*) mempunyai kapabilitas terbatas apabila digunakan untuk menghancurkan sasaran yang sangat kuat seperti hangar dan bunker, karena hal itu berkaitan dengan kemampuan isi (cair atau padat) dari jenis hulu ledak itu sendiri dibandingkan dengan hulu ledak nuklir.

⁶⁴ *Unitary* yaitu hulu ledak tunggal dari HE dan CW, *ibid*.

Tabel-4
Kerusakan Pada Area Sempit* dengan Hulu Ledak *High Explosive*
Yang Dihantarkan Peluru Kendali

Akurasi	CEP (km)	Jenis Hulu Ledak		Berat (HE)		
		Submunisi 1000 kg	Unitari 1000 kg	Unitari 500 kg	Unitari 200 kg	Unitari 50 kg
Ekselen	0,05	99,2 %	41,7 %	28,8 %	16,8%	7,1 %
Lebih Baik	0,1	85,0 %	19,0 %	12,4 %	7,0 %	2,8 %
Baik	0,25	30,2 %	3,9 %	2,5 %	1,4 %	0,5 %
Menengah	0,5	8,8 %	1,0 %	0,6 %	0,4 %	0,1 %
Rendah	1,0	2,3 %	0,3 %	0,2 %	0,1 %	0,0 %
Sangat Rendah	2,0	0,6 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Sumber : Bruce Bennett, *op.cit.*, hal. 98

*Kalkulasi ini merefleksikan kerusakan pada area dengan jarak 100 m dari lapangan udara

Saat ini Korea Utara memiliki akurasi pada tingkat "fair" atau menengah sampai "very poor" sangat rendah dan masih akan meningkatkan akurasinya sampai pada akurasi "good" atau "better". Dikatakan pula Korea Utara mempunyai probabilitas kerusakan pada area yang kecil (*small area*) sampai pada area luas.⁶⁵

Sementara itu, pada tabel-5 menunjukkan pengaruh hulu ledak nuklir secara potensial terhadap kota atau lapangan uadar dimana senjata nuklir secara substansial meningkatkan area kerusakannya terhadap sasaran lemah (*soft target*) seperti *bunker* dan gudang-gudang pesawat masih mampu merusak, tentu dengan persentase berbeda. Sebagai perbandingan satu senjata nuklir dengan hulu ledak 5 megaton yang merupakan tonase terbesar yang diledakkan di Seoul mampu membunuh jutaan orang, bahkan senjata nuklir dengan hulu ledak 10 kiloton (10 kt) juga mampu menyebabkan

⁶⁵ *Ibid.*

kematian 85.000 orang jika diledakkan di Seoul dengan angka (per 1000 orang).⁶⁶

Dijelaskan pula kematian oleh hulu ledak nuklir di Seoul hanya terjadi pada sasaran lemah (*soft target*) dari tiap-tiap 5 Mt sampai 10 kt yang semakin menurun akibat berat hulu ledaknya yang berkurang. Pada area kerusakan (km) hulu ledak 5 Mt menghancurkan area seluas 314,0 km, 1 Mt dengan luas 107,0 km, sedangkan untuk 10 kt (hulu ledak paling ringan) mematikan 85 orang dan menghancurkan area seluas 5,0 km. Dengan demikian, walaupun ini sebatas perkiraan yang bisa benar dan salah, tapi kesemuanya itu jelas menunjukkan begitu luasnya daerah dan banyaknya korban kematian apabila terjadi serangan peluru kendali balistik berhulu ledak nuklir oleh Korea Utara ke Seoul yang sangat mengerikan bagi penduduknya.

Tabel-5
Kehancuran Kota dan Lapangan Udara dengan Hulu Ledak Nuklir yang Dihantarkan Peluru Kendali Korea Utara

	5 Mt	Sasaran Kuat					Sasaran Lemah				
		1 Mt	250 kt	50 kt	10 kt	5 Mt	1 Mt	250 kt	50 kt	10 kt	
Area Kehancuran (km)	21,5	7,3	2,9	1,0	0,3	314,0	107,4	42,6	14,6	5,0	
Kematian di Seoul (1000)	-	-	-	-	-	5.500	1.900	533	250	85	
Akurasi CEP (km)	Persentase Kehancuran Pada Lapangan Udara yang Diharapkan										
Ekselen	0,05	99 %	83 %	51 %	21 %	8 %	100 %	100 %	100 %	97 %	70 %
Lebih Baik	0,1	99 %	83 %	50 %	21 %	8 %	100 %	100 %	100 %	97 %	69 %
Baik	0,2	99 %	81 %	48 %	20 %	7 %	100 %	100 %	100 %	96 %	67 %
Menengah	0,5	98 %	75 %	43 %	17 %	6 %	100 %	100 %	100 %	94 %	61 %
Rendah	1,0	92 %	57 %	29 %	11 %	4 %	100 %	100 %	99 %	81 %	44 %
Sangat Rendah	2,0	62 %	28 %	12 %	4 %	2 %	100 %	99 %	85 %	45 %	20 %

Sumber : Samuel Gladstone and Philipe J. Dolan (eds.), *The Effects of Nuclear Weapons*, dikutip dalam *ibid.*, hal. 200

⁶⁶ Dalam memperkirakan kematian dapat digunakan asumsi sekitar 70 persen manusia dalam serangan nuklir pasti mati. Hal ini merupakan bentuk kematian dari senjata nuklir yang lebih rendah. Dikutip dalam *ibid.*

Persentase kehancuran pada lapangan udara dari (*soft target*) menunjukkan hulu ledak nuklir 5 Mt menyebabkan 100 % kehancuran, 1 Mt hampir 100 %, 250 kt hanya pada akurasi rendah dan sangat rendah terdapat 99 % dan 85 % kehancuran. Sedangkan data pada sasaran (*hard target*) menunjukkan setiap akurasi memiliki kehancuran yang berbeda dari yang paling tinggi 99 % (5 Mt) sampai 2 % (10 kt) paling rendah, dibandingkan 100 % (5 Mt) kehancuran paling tinggi (*soft target*) sedangkan terendah hanya 20 % (10 kt).

Dengan demikian, kesimpulannya adalah daya ledak nuklir lebih dahsyat pada sasaran yang berwujud gedung, rumah atau lapangan udara dibandingkan pada hangar, *bunker* maupun gudang pesawat. Maka dari itu, fokus perhatian Korea Utara saat ini adalah ancaman rudal ICBM dengan hulu ledak nuklir yang sampai sekarang terus dikembangkannya untuk memberikan prestise maupun taktik diplomasi di tingkat regional dan internasional.

2.2.2. Produksi Persenjataan Lainnya

2.2.2.1. Senjata Biologi Korea Utara

Setelah menjelaskan kapabilitas senjata nuklir beserta peluru kendali balistik Korea Utara, maka sekarang dijelaskan kapabilitas lainnya yang masih tergolong senjata penghancur massa (*weapons of mass destruction*) yaitu senjata biologi dan senjata kimia. Senjata biologi dan senjata kimia sebagai bagian dari kebijakan proliferasi Kim Jong-Il yang sangat membahayakan kehidupan umat manusia khususnya di Semenanjung Korea, karena dari ketiga jenis senjata penghancur massa, urutan dari yang paling berbahaya

yang paling berbahaya beserta agen kimia beracun sudah diketahui dan secara praktis digunakan sebagai senjata perang. Untuk tujuan praktis itulah agen-agen biologi seharusnya bekerja dengan cepat dan mampu bertahan cukup lama di air maupun udara untuk membunuh korbannya serta tidak mudah dipengaruhi oleh obat-obat biasa yang diberikan dokter. Sehingga secara teori kemampuan mengatur struktur molekul organik yang kompleks akan mempermudah kerja agen-agen biologi tersebut.⁷⁰

Ketiga, bioteknologi juga menyediakan cara-cara untuk memproduksi molekul organik dengan mudah seperti fermentasi bagi pertumbuhan bakteri kedalam molekul organik yang diinginkan.⁷¹ Adapun Korea Utara telah mengembangkan ilmu dan fasilitas untuk memproduksi mikroorganisme melalui penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan senjata biologi sejak tahun 1960-an. Dengan infrastruktur biologi yang dimilikinya dapat digunakan untuk memproduksi toxin dalam jumlah yang terbatas seperti agen-agen biologi. Korea Utara kemudian mendirikan Akademi Medis dan Institut Penelitian Pertahanan Nasional (*The National Defense Research Institute and Medical Academy-NDRIMA*) termasuk studi-studi penyakit patogen seperti *anthrax*, kolera, pes, cacar.⁷²

Tujuan Korea Utara merealisasikan senjata biologi sebagai suatu senjata yang membahayakan adalah menyerang Korea Selatan dan pasukan Amerika Serikat yang ada di sana jika pecah perang nantinya. Maka dari itu, Korea Utara dapat menggerakkan agen seperti *anthrax*, pes juga cacar yang tersedia pada air dan makanan untuk menyerang Korea Selatan secara

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 69

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Foreign Association of Scientist (FAS)*, "Biological Weapons Program," dalam <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/bw/19998>

keseluruhan.⁷³ Proliferasi senjata biologi inilah menyebabkan Korea Selatan tetap mempertahankan kehadiran pasukan Amerika Serikat di dekat DMZ kedua negara sebagai penyeimbang kapabilitas militer termasuk senjata WMD Korea Utara.

Lebih jauh lagi menurut W. Seth Carus,⁷⁴ terdapat beberapa motivasi mengapa suatu negara mengembangkan senjata pemusnah massal khususnya senjata biologi. *Pertama*, untuk mengembangkan kemampuan militer, suatu negara membutuhkan senjata biologi sebagai suatu program yang biayanya paling efektif dengan solusi yang paling rendah. Sehingga senjata biologi dipandang sebagai murah dengan daya serang yang sangat mematikan manusia.

Kedua, pada dasarnya seluruh teknologi yang digunakan untuk mendukung program senjata biologi mempunyai dua tujuan, pada satu sisi sebagai perlengkapan untuk meneliti, mengembangkan serta menghasilkan agen biologi yang tergolong bidang medis. Sedangkan di sisi lainnya, banyak dari teknologi itu dibutuhkan untuk mempersenjatai agen-agen biologi secara komersial. Sekarang ini banyak sistem yang diciptakan untuk menyebarkan agen biologi telah diadopsi bagi tujuan militer.⁷⁵

Ketiga, bagi negara-negara proliferasi memandang program senjata biologi sebagai cara akuisisi senjata penghancur massa yang murah, bahkan dibandingkan dengan program senjata nuklir masih lebih murah terutama dalam memperoleh materialnya. Jelasnya, upaya pengembangan kapabilitas senjata biologi jauh lebih murah dari senjata nuklir dan kimia, karena

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ W. Seth Carus, "The Proliferation of Biological Weapons," dalam Brad Roberts (ed.), *op.cit.*, hal. 22

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 23

dengan menggunakan senjata penghancur massa, dipastikan Korea Utara akan membalasnya dengan cara yang sama pula sehingga akan menghancurkan kehidupan manusia. Bagi Korea Selatan, proliferasi ini merupakan peringatan untuk tidak sekali-kali mendukung kebijakan bermusuhan dari Amerika Serikat terhadap Korea Utara, karena Korut sebagai negara penganut paham komunis dapat bertindak apa saja apabila mendapatkan tekanan dari negara lain, termasuk penggunaan kekerasan senjata.



2.2.2.2. Senjata Kimia Korea Utara

Kini, beralih pada kapabilitas senjata kimia Korea Utara yang dikembangkan atas bantuan Uni Soviet dan Cina pada tahun 1940-an yang telah mentransfer teknologi khusus kepada Tentara Rakyat Korea (KPA) seperti agen-agen kimia sebagai perlindungan dari serangan Jepang dalam Perang Dunia II. Program senjata kimia ini termasuk berbagai jenis gas seperti *sarin (GBI)*, *tabun (GA)*, *phosgene*, *adamsiete* dan *mustard (h, HD, HT)*. Gas *sarin* yaitu gas syaraf yang bekerja cepat terserap melalui paru, mata, kulit sehingga mengakibatkan kelumpuhan paru. *Adamsite* yaitu bahan penyebab muntah mengandung arsen (*warangan*) dipakai pada Perang Dunia I. *Tabun* merupakan gas pertama yang dapat merusak senyawa kimia tubuh pengendali reaksi otot menyebabkan korban menggigil, menggeliat-geliat dan mati. Sedangkan *mustard* bila mengenai kulit menyebabkan kulit melepuh dan pecah bernanah yang melarutkan selaput mukosa kerongkongan.⁷⁶

Korea Utara diyakini oleh para pengamat mampu memproduksi dan menggunakan senjata kimia dengan sistem pendukung termasuk artileri, peluncur roket ganda (*multiple rocket launchers tipe CHAHO*) serta mortar. Beberapa bom dari Angkatan Udara Korea Utara juga menghantarkan agen-agen kimia seperti rudal FROG (*Free Rocket Over Ground*) dan rudal Scud dengan tujuan menyerang pasukan Korea Selatan di zona demiliterisasi melalui kekuatan udara untuk mengepung dan mengurung Semenanjung Korea.⁷⁷

⁷⁶ Kompas, 8 Oktober 2001

⁷⁷ FAS, "Chemical Weapons Program," dalam <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/cw> 28 Nopember 1998

- c) Alat yang khusus dirancang bagi penggunaannya yang langsung berkaitandengan digunakannya bahan peledak dan alat peledak yang disebutkan pada butir (b)."

"Bahan-bahan kimia beracun adalah:

Setiap bahan kimia yang karena pengaruh kimianya terhadap proses kehidupan dapat menyebabkan kematian, cacat sementara atau bahaya pada manusia atau binatang. Kategori ini mencakup semua bahan kimia tersebut, tidak pandang asalnya atau teknik pembuatannya, dan tidak pandang apakah bahan itu dihasilkan dalam instalasi, dalam senjata atau yempat lainnya."⁸⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, Korea Utara memiliki delapan fasilitas industri yang menghasilkan agen-agen kimia seperti gas sarin, tabun, phosgene, adamsite dan mustard juga dilaporkan Korea Utara mempunyai tiga sampai empat fasilitas penelitian yang berlokasi di Hamhung, Kanggye, Pyongson dan Shinniju dekat Hungnam (lihat gambar-1). Sedangkan fasilitas produksi berjumlah tujuh sampai delapan yang berlokasi di Aoji, Chonjin, Manpo, Sinhug, Hungnam, Sunchon, Auju dan Shinuiju.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ FAS, "Chemical Weapons," dalam <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/facility/cw.htm> 1Maret 2000



Sumber : FAS, "Chemical Weapons," dalam
<http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/facility/cw.htm> 2000

Semua fasilitas senjata kimia yang ada dalam gambar di atas sebenarnya ditujukan untuk “membangun negara yang besar dan kuat,” bagi Kim Jong-Il kebijakan yang terpenting adalah mengutamakan militer daripada ekonomi “*military first policy*”, karena suatu negara dengan ideologi dan militer yang kuat, akan menjadikan negara itu disegani oleh kawan maupun lawan. Sehingga hanya kekuatan militer saja yang dapat membangun kejayaan suatu negara.⁸²

Untuk itulah, maka Pyongyang terus memperkuat angkatan bersenjata untuk persiapan perang dan provokasi berbahaya kepada Seoul, bahkan propaganda di perbatasan yang di surat kabar diberitakan telah dihentikan untuk menghormati hasil pertemuan puncak tersebut dalam kenyatannya hanya berhenti beberapa hari saja dan selanjutnya berlangsung seperti biasa.⁸³ Kegiatan provokasi itu dilakukan melalui pengeras-pengeras suara kedua negara yang dipancang di perbukitan sepanjang DMZ selama puluhan tahun, dari pengeras suara itu keluar penghinaan dan komentar yang mencoba melemahkan semangat tentara musuh yang berada empat kilometer di seberang. Zona Demiliterisasi (DMZ) merupakan wilayah tak bertuan sepanjang 242 kilometer yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan.⁸⁴

⁸² Dikutip dalam Defense White Paper 1998, *op.cit.*

⁸³ Laporan Tahunan 1999/2000 Kedutaan Besar Republik Indonesia-Seoul, hal. 120

⁸⁴ *Kompas*, 14 Juni 2000

2.2.3. Peran Persenjataan dalam Menunjang Kekuatan Militer

Semenanjung Korea yang terdiri dari Korea Utara dan Korea Selatan selalu menjadi perhatian masyarakat internasional khususnya isu nuklirisasi kedua Korea. Baik Korea Utara dan Korea Selatan sama-sama mempunyai kapabilitas nuklir dengan tujuan yang berbeda. Bagi Korea Selatan yang telah memiliki tiga reaktor penelitian dan sembilan pabrik pembangkit yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik, program nuklir Korea Selatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dalam negeri dimana empat puluh sembilan persen dari kebutuhan itu bersumber dari pembangkit tenaga listrik.⁸⁵

Kapabilitas nuklir Korea Selatan sangat terbatas, karena pihak Seoul terikat dengan perjanjian bilateral Amerika Serikat-Korea Selatan tentang pembatasan jumlah dan jangkauan rudal. Korea Selatan hanya memiliki 300 rudal *Nike-Hercules* dengan jarak sekitar 100 km juga 100 jet tempur F-16 jangkauan 960 km. Lebih dari jangkauan itu, Korea Selatan dilarang untuk mengembangkannya.⁸⁶

Sementara nuklir bagi Korea Utara bertujuan untuk mengimbangi secara strategis (*strategic equalizer*) kemampuan senjata konvensional Korea Selatan juga pasukan Amerika Serikat yang ada di sana, di samping itu meningkatkan status Korea Utara di tingkat regional maupun internasional. Nuklir sebagai instrumen militer untuk mencapai tujuan politik, dalam konteks ini diplomasi nuklir Korea Utara seperti yang diucapkan oleh Hyon

⁸⁵ Yong-Sup Han, *Nuclear Disarmament and Non-Proliferation in North East Asia*, United Nations, New York and Geneva, 1995, hal. 27

⁸⁶ *Ibid.*

Song Il seorang mantan diplomat Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan tahun 1996, yaitu :

*"North Korea's diplomatic objectives are to cope with economic problems while maintaining its current regime. Normalization of relation with the United States and Japan was a means to the end. Nuclear diplomacy contributed to achieving both objectives. It paved the way for the direct, bilateral talks with the United States and attainment of economic aid. It was not necessarily a premediated plan. Rather, the North Korean came to recognize the effectiveness of the "nuclear card" in the process."*⁸⁷

Dalam upayanya mencari keuntungan ekonomi dan diplomasi itulah, Korea Utara tanpa ragu-ragu akan menggunakan kekuatan dan senjata nuklirnya. Menyadari bahwa kekuatan militer adalah suatu cara yang paling ampuh untuk memelihara rejim politiknya dan mengkomunikasikan seluruh Semenanjung Korea, Korea Utara telah dan terus memperkuat angkatan bersenjataanya dengan menekankan pada prioritas utama pada pembangunan pangkalan militer, fasilitas nuklir dan peluru kendali juga menumbuhkan semangat tempur pada setiap prajuritnya.⁸⁸

Dengan angka pertumbuhan ekonomi Korea Utara pada tahun 1998 dan 1999 tercatat -1,1, % dan 6,2 % dari GNI (*Gross National Income*), serta *Gross National Product (GNP)* untuk tahun yang sama masing-masing 12,6 milyar dollar dan 15,8 milyar dollar AS.⁸⁹Data ini termasuk rendah apabila di dibandingkan dengan indikator ekonomi Korea Selatan dengan GNP tahun 1998 dan 1999 dari 133 milyar dollar meningkat menjadi 402,1 milyar dollar walaupun angka pertumbuhannya -6,7 % pada tahun 1998 lalu naik 10,7 %

⁸⁷ Dikutip dalam Narushige Michishita, "Role of Force in North Korean Diplomacy," *Korea and World Affairs*, Vol. XXI, No. 2, Summer 1997, hal. 227

⁸⁸ Laporan Tahunan 1997/1998 Kedutaan Besar Republik Indonesia-Seoul, hal. 108

⁸⁹ The Ministry of National Defense (The Republic of Korea), *Defense White Paper 2000*, hal. 271.

setahun berikutnya.⁹⁰Keburukan ekonomi ini jelas karena pengaruh krisis ekonomi yang dihadapi Korea Utara seperti krisis pangan, kelaparan sampai "sistem ransum" sebagai cara mendistribusikan kebutuhan makanan sehari-hari rakyatnya, namun bagi rejim Kim Jong-Il hal itu tidak mempengaruhi keinginan elite politik Korea Utara untuk tetap mempertahankan kebijakan "military-first policy" selama ini.

Bukti nyata kebijakan itu adalah makin diperkuatnya fasilitas serta infrastruktur nuklir sebagai bagian terpenting dari proliferasi nuklir Korea Utara, karena infrastruktur nuklir adalah elemen paling krusial dari struktur senjata nuklir yang ada di dunia. Seperti yang dinyatakan Arkin dan Field sebagai berikut :

*"Nuclear forces are only one part of the nuclear infrastructure, a complex made of hundreds of obscure research, testing, electronic and command facilities. Virtually every laboratory, test range, military base, or communications transmitter contributes to preparation for nuclear warfare. Military exercises and maneuvers, communications, surveillance and testing keep the system alive."*⁹¹

Melalui infrastruktur penyebaran nuklir tersebut, suatu negara dapat meningkatkan kemungkinan perang nuklir, disamping itu melalui uji coba rudal nuklir saja negara tersebut mampu meningkatkan target dan jangkauan terhadap sasarannya. Korea Utara diyakini memiliki 22 fasilitas nuklir di 18 lokasi termasuk tambang uranium, pabrik bahan bakar nuklir, reaktor nuklir, pabrik pemrosesan ulang dan fasilitas penelitian di seluruh Korea Utara (lihat gambar-2).

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Dikutip dalam C. Raja Mohan, "Global Nuclearisation," K. Subrahmanyam (ed.), *Nuclear Proliferation and International Security*, Institute for Defense Studies and Analysis (IDSA), Washington, D.C., 1985, hal. 134



Gambar. 2

Fasilitas Nuklin Korea Utara

Sumber : <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/facility.htm> 1998

dan teknologi yang akan diselesaikan sampai tahun 2000.⁹⁵ Maka dari itu, Pyongyang memandang NPT sebagai taktik Amerika Serikat untuk menghalangi Korea Utara membangun fasilitas nuklirnya melalui isi perjanjian yang mengikat setiap peserta, dimana NPT terdiri dari 11 pasal yang terpenting adalah pasal-2 dan pasal-3 mengatur sebagai berikut :

Article II

"Each non-nuclear weapon State Party to the Treaty under takes not to receive the transfer from whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices."

Article III

"Each non-nuclear State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set for in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of International Atomic Energy Agency's safeguard system, for the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices."⁹⁶

Berdasarkan isi dua pasal di atas, maka Badan Energi Atom Internasional (IAEA) akhirnya dapat mendesak Korea Utara untuk melaporkan beberapa dari fasilitas nuklirnya. Kebanyakan dari fasilitas itu berlokasi di Yongbyon seperti reaktor penelitian (IRT-2000) dibangun tahun 1965, kemudian reaktor 5 MW selesai tahun 1986 dan selebihnya berupa pabrik pengayaan uranium dan beberapa pembangkit nuklir yang masih dirahasiakannya (lihat tabel-6).

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 86

⁹⁶ *Ibid.*

Tabel-6
Fasilitas Nuklir Korea Utara
(Laporan Tim Inspeksi IAEA)

Klasifikasi	Lokasi	Tahun Pembangunan	Catatan
Reaktor Penelitian (IRT-2000)	Yongbyon	1965	Bantuan Uni Soviet
Perakitan Kritis	Pyongyang	Tidak Diketahui	Inspeksi IAEA 1978
Perakitan Quasi-Kritis	Pyongyang	Tidak Diketahui	-
Fasilitas Penyimpanan & Produksi B.B. Nuklir	Yongbyon	Tidak Diketahui	Lengkapnya tdk. Dila porkan tim inspeksi
Reaktor (5 MW)	Yongbyon	1986	-
Lab. Radiokimia	Yongbyon	Tidak Diketahui	Dalam Pembangunan Mulai tahun 1987
Pabrik Tenaga Nuklir (50 MW)	Yongbyon	Tidak Diketahui	Dalam Pembangunan Mulai tahun 1996
Pabrik Tenaga Nuklir (200 MW)	Taechon	Tidak Diketahui	Dalam Pembangunan Mulai tahun 1996
Tiga Reaktor Pabrik Tenaga Nuklir	Pyongyang	Tidak Diketahui	Direncanakan
Pabrik Peng. Uranium	Pyongsan	Tidak Diketahui	Direncanakan
Pabrik Peng. Uranium	Bakchon	Tidak Diketahui	Direncanakan
Tambang Uranium	Pyongsan	Tidak Diketahui	Direncanakan
Tambang Uranium	Sunchon	Tidak Diketahui	Direncanakan

Sumber : Joong-ang Daily News, February 24, 1993, dikutip dalam Ik-Sang Lee, *op.cit.*, hal. 88

Yongbyon merupakan kompleks nuklir utama Korea Utara yang terdiri dari tiga reaktor termasuk reaktor penelitian 5 MW, sebuah reaktor penelitian 8 MW serta reaktor tenaga 50 MW. Masih ada fasilitas pemrosesan ulang (*reprocessing facilities*) yang mampu menghasilkan 200 ton bahan bakar nuklir setahun serta fasilitas penelitian yang mempekerjakan sekitar 2.000 orang.⁹⁷

⁹⁷ Michael Ertman, "North Korean Arms Capabilities and Implication," *Korea and World Affairs*, Vol. XV, No. 1, Winter 1993, hal. 605

Disamping itu, masih diperkirakan ada empat reaktor tenaga nuklir (440 MWX4) yang berlokasi di Shinpo di bangun awal tahun 2000 serta dua tempat yang dicurigai penyimpanan sampah nuklir di Yongbyon, yang tidak termasuk dalam laporan IAEA di atas. Selama ini Korea Utara menggunakan berbagai macam taktik dan strategi untuk tetap mendapatkan konsesi dari Amerika Serikat dan Jepang perihal program senjata nuklirnya itu. Salah satu taktik yang digunakan adalah *tactic of brinkmanship* yaitu taktik Pyongyang untuk mendapatkan konsesi berupa pembangunan dua reaktor air ringan (*light water reactor-LWR*) seperti yang dijanjikan Amerika Serikat dalam kerangka kesepakatan "*Agreed Framework*" yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Korea Utara tanggal 21 Oktober 1994, dimana Amerika Serikat sepakat untuk :⁹⁸

- 1) Berjanji tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk melawan Korea Utara,
- 2) Menghapuskan berbagai halangan dalam hubungan politik dan ekonomi antara Amerika Serikat dan Korea Utara,
- 3) Membangun dua reaktor air ringan sampai tahun 2003 dimana dana lebih dari 4 milyar dollar akan dibayarkan oleh Korea Selatan, 2 milyar dollar oleh Jepang dan negara lainnya seperti (Amerika Serikat, Jerman dan Rusia) 1 milyar dollar,
- 4) Pengiriman 500.000 metrik ton minyak untuk mengatasi kelangkaan energi sementara Pyongyang,
- 5) Mengadakan kunjungan pertukaran pejabat antara Washington dan Pyongyang untuk mengimplementasikan kesepakatan ini.

⁹⁸ Jing Huang, "Why is Pyongyang so Defiant on the Nuclear Issue?," *Korea and World Affairs*, Vol. XX, No. 3, Fall 1996, hal. 401

penghancur massalnya. Disamping itu, Pyongyang menyadari melalui kemampuan ilmiah dan teknologi nuklirnya itu memberikan kedaulatan dan kemerdekaan negaranya dari intervensi pihak luar yang ingin mengganggu integritas wilayahnya, sehingga Korea Utara tidak ingin dipandang sebagai negara "kelas dua" apabila menuruti keinginan negara *super power*.

Konsesi kedua, yang lebih berkaitan dengan perekonomian Korea Utara yaitu mendapatkan minyak bumi sebagai alternatif kebutuhan energi domestiknya. Karena, krisis energi yang melanda sebagian besar negara Asia Timur Laut termasuk Korea Utara berakibat pada menurunnya kemampuan berbagai komoditas ekspornya. Melalui minyak bumi ini diharapkan kelangkaan energi dalam jangka pendek bisa diatasi melalui pengiriman 500.000 metrik ton minyak Amerika Serikat kepada Korea Utara sehingga mampu meningkatkan pertumbuhannya yang memang mengalami penurunan pasca runtuhnya Uni Soviet awal tahun 1990-an.

2.3. Proliferasi Nuklir Korea Utara

Persoalan proliferasi nuklir dan peluru kendali telah menjadi isu global pasca Perang Dingin yang mempunyai dampak sangat luas terhadap stabilitas dan perdamaian internasional. Kasus proliferasi nuklir secara horisontal oleh Korea Utara dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya perlombaan senjata baru di antara negara di kawasan Asia Timur. Memang, sejak berakhirnya Perang Dingin fungsi senjata nuklir kini bukanlah untuk tujuan militer semata (*the relevance of deterrence*) tapi bergeser pada *the politics of deterrence* atau senjata nuklir sebagai instrumen militer untuk mencapai

tujuan politik.¹⁰¹Perilaku Korea Utara dalam konteks ini Kim Jong-Il selalu menggunakan senjata nuklir sebagai “kartu As” dalam berhubungan dengan setiap negara tidak terkecuali dengan Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan sendiri. Bahkan perilaku itu tetap mencerminkan ketidakpastian dan keragu-raguan rejim Kim Jong-Il dalam menyelesaikan persoalan proliferasi nuklirnya sebagai langkah awal menuju rekonsiliasi dan reunifikasi dengan Korea Selatan.

Diakui oleh para pengamat salah satu faktor penghambat serta mandeknya proses reunifikasi Korea Pasca KTT Pyongyang tahun 2000 lalu adalah ketidakseriusan Kim Jong-Il untuk berunding mencari solusi atas program senjata penghancur massal negaranya untuk mengurangi tingkat ancaman terhadap perdamaian di Semenanjung Korea. Pada satu sisi, setiap tindakan yang diambil Kim Jong-Il mencerminkan taktik dan strategi yang sesuai dengan kepentingan rejimnya, di sisi lain proses rekonsiliasi dan reunifikasi Korea semakin suram akibat ketidakjelasan dan ketidakpastian keamanan di Semenanjung Korea. Karena itu, prinsip yang dijalankan oleh pemerintahan Kim Dae-Jung di Korea Selatan sekarang ini bertumpu pada upaya menciptakan perdamaian sebagai landasan pelaksanaan negosiasi dan dialog kedua Korea. Tidak akan mungkin reunifikasi tercapai apabila masih terdapat ancaman senjata nuklir yang pada gilirannya akan menciptakan ketidakstabilan keamanan di Semenanjung Korea.

Tindakan saling mengancam yang dilakukan oleh Korea Utara dan Korea Selatan akhir-akhir ini juga menunjukkan betapa sulitnya meyakinkan akan posisi dan peran masing-masing dalam proses reunifikasi Korea.

¹⁰¹ Kusnanto Anggoro, “ Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Keamanan Pasca Perang Dingin,” dalam *Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hal. 74

Ancaman Korea Utara adalah akan membangun lagi reaktor nuklirnya jika Korea Selatan terlebih lagi Amerika Serikat tidak membayar kompensasi bagi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang tertunda akibat memburuknya hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat belakangan ini. Jika masalah ini tidak bisa dipecahkan, maka Korea Utara tidak bisa memilih lain dari memulai pembangunan reaktor grafit.¹⁰²

Ancaman tersebut bukan hanya sekali-dua kali diucapkan oleh Kim Jong-Il, tapi berkali-kali ketika pihaknya memandang ketidakseriusan Korea Selatan sebagai penyandang dana terbesar (sekitar 70 persen yaitu lebih dari tiga milyar dollar) dalam kerangka kesepakatan tahun 1994 lalu untuk membangun dua reaktor air ringan pengganti reaktor yang digunakan Korea Utara selama ini. Korea Utara terus berupaya agar para pihak yang terlibat segera merealisasikan janjinya untuk mendorong Korea Utara kembali berdialog mengenai masa depan reunifikasi dengan Korea Selatan.

Di sisi lain, Korea Selatan juga mengancam akan menghentikan bantuan keuangan kepada Korea Utara apabila pemimpin negara Komunis itu, Kim Jong-Il tidak memenuhi janjinya untuk melakukan kunjungan balasan ke Seoul.¹⁰³ Pemerintah Korea Selatan memiliki dana 269 juta dollar AS untuk kerjasama antar Korea yang akan diberikan kepada Korea Utara, jika Kim Jong-Il datang dan memulai dialog dengan pihak Seoul mengenai kelanjutan proses reunifikasi yang tertunda.

Melalui kebijakan *the Sunshine Policy* itulah Korea Selatan menyadari pentingnya bantuan yang akan diberikan kepada Korea Utara yang mengalami krisis pangan berupa kelaparan jutaan penduduknya. Sekitar lima juta penduduk Korea Utara menderita krisis kelaparan yang hampir

¹⁰² Kompas, 7 Juni 2001

2.3.1. Strategi Militer Korea Utara

Besarnya pengaruh ideologi *Juche* yang telah mendarah daging dalam setiap elite politik dan militer Korea Utara mengakibatkan mereka seperti menutup mata akan penderitaan rakyatnya sendiri, bahkan kontradiksi dengan apa yang dicapai dalam bidang militer sekarang ini. Indikator ekonomi pun menunjukkan rasio (%) GNP (*Gross National Product*) Korea Utara terhadap pengeluaran militernya selama tujuh tahun belakangan (dari tahun 1993-1999) mengalami penurunan yang kecil dari 27,3 % menjadi 27 % terhadap GNP. Namun rasio (%) total anggaran terhadap pengeluaran militer mengalami peningkatan yang cukup tajam dari 30 milyar dollar AS atau sekitar 11,4 % tahun 1993 menjadi 51 milyar dollar (14,5 %) pada tahun 1999. Walaupun GNP perkapita Korea Utara dari tahun 1997 dan 1998 adalah 74,1 milyar dollar turun menjadi 57,3 milyar dollar dengan perbandingan 12,8 dan 11,9 kali GNP perkapita Korea Selatan.¹⁰⁶

Namun secara empiris, Korea Utara bahkan mampu meningkatkan jumlah personel serta perlengkapan militernya dari tahun 1998-2000 dibandingkan dengan Korea Selatan. Karena, strategi yang dikembangkan oleh Kim Jong-Il adalah strategi serangan kilat (*blitzkrieg*) oleh pasukan yang secara kuantitas jumlahnya lebih banyak dari Korea Selatan. Maka dari itu, kebijaksanaan keamanan suatu negara akan dipengaruhi oleh doktrin strategis yakni “ *seperangkat kepercayaan operatif (operative beliefs), nilai dan penilaian yang secara signifikan mengarahkan perilaku para pelaksana kebijaksanaan dalam hal pengembangan yang bersifat strategis, pemilihan senjata, kekuatan,*

¹⁰⁶ The Ministry of National Defense, *The Republic of Korea Defense White Paper 1999*, hal. 244

rencana operasional, pengawasan senjata."¹⁰⁷ Sehingga doktrin strategis yang dimiliki oleh suatu negara dapat ditelusuri dari pengalaman sejarah, ideologi dan budaya yang bersangkutan.

Kebijaksanaan militer memiliki dua unsur utama yakni strategi militer dan struktur kekuatan (*force structure*). Strategi militer dapat diartikan sebagai rencana penggunaan kekuatan militer bersama-sama dengan prinsip doktrin yang menjadi pedoman bagi cara-cara penggunaan kekuatan militer. Sedangkan struktur kekuatan mengacu pada organisasi, tentara dan peralatan dalam angkatan bersenjata serta kapabilitas yang dimiliki untuk menjalankan strategi militer.¹⁰⁸

Maka dari itu, strategi militer yang disebutnya *the "united front" strategy* yang berhubungan dengan reunifikasi Korea adalah "membebaskan Korea Selatan dari pengaruh imperialisme Amerika Serikat" setelah itu menyatukan seluruh Semenanjung Korea kedalam satu pemerintahan Komunis. Konsep strategi ini dijelaskan dalam piagam Partai Pekerja Korea yang ditulis ulang tahun 1980 selama kongres partai yang keenam. Adapun bunyi mukadimah piagam tersebut adalah :

*"The Party heightens the leadership role of the working class and fight for the consolidation of the united front of all segments of patriotic and democratic forces behind the banner of the worker-peasant alliance. The Party carries out the struggles for both expelling American imperialist forces from South Korea and frustrating the return of Japanese militarism to the Korean Peninsula; ardently supports the struggle of the South Korea people for social democracy and national existence; and fights for the accomplishment of a sey-reliant and peaceful reunification of the fatherland, based on the principle of national unity, thus enabling the nation and the pepole to prosper under reunified conditions."*¹⁰⁹

¹⁰⁷ Rizal Sukma, *Pemikiran Strategis Cina dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1995, hal. 11

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 12

¹⁰⁹ Dikutip dalam Chong Bong-Uk (ed.), *op.cit.*, hal. 219

Lebih jauh diuraikan, untuk mencegah serangan mendadak bersama-sama dari depan maupun belakang, strategi militer Korea Utara adalah menggunakan pasukan pemukul cepat yang dapat menyusup seluruh Semenanjung Korea dengan pasukan infantri mekanik dan tank, kendaraan tempur serta roket yang dapat masuk ke Korea Selatan sebelum ada bantuan perkuatan dari pasukan USFK (pasukan Amerika Serikat yang ada di Korea Selatan). Strategi gerak cepat model Korea Utara inilah mengakibatkan peningkatan kegiatan militernya sebanyak 65 % kekuatan tempur Korea Utara disebar sepanjang garis demarkasi.¹¹⁰ yang paling berbahaya dari keberadaan pasukan Korea Utara di dekat DMZ adalah propaganda, agitasi dan provokasi yang dapat menyulut insiden bersenjata di sepanjang garis demarkasi seperti yang pernah dilakukan pasukan Korea Utara dengan melanggar garis batas kedua negara dekat Kosung di ujung timur zona demiliterisasi, sehingga memaksa pasukan Korea Selatan untuk melepaskan tembakan peringatan untuk menghalau mundur pasukan Korea Utara.¹¹¹

Untuk memperkuat strategi militernya, Korea Utara kemudian menggunakan empat pedoman militer yaitu :¹¹²

- 1) Mempersenjatai seluruh penduduk.
- 2) Memperkuat dan membentengi seluruh wilayah kedaulatan negara.
- 3) Menghormati seluruh pimpinan militer yang potensial.
- 4) Modernisasi tentara.

Dari pedoman militer di atas, maka secara keseluruhan kebijaksanaan militer Korea Utara dirangkum sebagai berikut : pertama,

¹¹⁰ Laporan Tahunan 1999/2000, Kedutaan Besar Republik Indonesia-Seoul, *op.cit.*, hal. 138

¹¹¹ *Kompas*, 29 September 2001

¹¹² Laporan Tahunan 1999/2000, *op.cit.*

Tabel-8
Perbandingan Kapabilitas Militer Korea Selatan dan Korea Utara

Klasifikasi				Korea Selatan		Korea Utara	
Pasukan	Angkatan Darat ¹			560.000	690.000	1.000.000	1.170.000
	Angkatan Laut ²			67.000		60.000	
	Angkatan Udara			63.000		110.000	
Kapabilitas Pasukan Utama	AD	Unit	Korp	11	20		
			Divisi	49 ²	67 ³		
			Brigade ⁴	19	78		
	Peralatan		Tank	2.360	3.800		
			Kend. Lapis Baja	2.400	2.300		
			Artileri Medan ⁵	5.180	12.500		
			Helikopter	600	-		
	AL		Perang Darat	160	430		
			Kapal Pendukung	20	470 ⁶		
			Kapal Selam	10	90 ⁷		
Pesawat			70	-			
AU		Pesawat Tempur	540	870			
		Pesawat Khusus	40				
		Pesawat Pendukung	230		840 ⁸		
Pasukan Cadangan			3.040.000 ⁹	7.480.000 ¹⁰			

Sumber : The Ministry of National Defense, The Republic of Korea Defense White Paper 2000, *op.cit.*, hal. 272

¹ Termasuk Korps Marinir

² Termasuk Divisi Korps Marinir

³ Termasuk satu Divisi Peluru Kendali

⁴ Brigade Mobil termasuk infantri ringan, infantri mekanik, tank, perang khusus dan patroli laut

⁵ Artileri Medan termasuk roket, senjata-senjata penuntun dan MRLS

⁶ Termasuk 170 pasukan Bot Patroli Darat

⁷ Termasuk sekitar 40 kapal selam klas Sang-O

⁸ Seluruh pesawat (helikopter) Korea Utara dioperasikan oleh Angkatan Udara (*KPA Air Force*)

⁹ Termasuk cadangan umur 18 tahun

¹⁰ Termasuk Unit Pelatihan Militer Cadangan, Tentara Pekerja Merah, Tentara Remaja Merah dan Agen Keamanan Sosial.

karena infantri pada dasarnya menggabungkan tugas artileri yaitu merusak dan menghancurkan kekuatan tembak lawan serta kavaleri yang dapat meningkatkan mobilitas pasukan sehingga merupakan pasukan yang sangat mudah digerakkan. Disamping itu, kenyataan menunjukkan bahwa masing-masing tergantung pada sektor ekonomi nasional yang berbeda dimana infantri berhubungan dengan populasi manusia, kavaleri berkaitan dengan pasukan berkuda dan artileri dipengaruhi oleh keuangan.

Dengan itu pula, Clausewitz kemudian menyimpulkan bahwa :¹¹⁵

- 1) Infantri adalah cabang utama pelaksana militer sedangkan dua lainnya adalah pelengkap.
- 2) Lebih sulit bekerja tanpa artileri daripada kavaleri, artileri adalah agen penghancur utama dimana tugasnya lebih mudah dikoordinasikan dengan infantri.
- 3) Umumnya, artileri masih merupakan agen penghancur yang paling kuat sedangkan kavaleri berada pada pihak yang terlemah daya hancurnya.

Gabungan dari ketiga unit ini akan memberikan kekuatan yang besar pada suatu negara. Hubungan yang kuat antara tujuan strategi militer Korea Utara dengan tujuan Partai Pekerja yang didasarkan pada pemikiran *Juche*, mengakibatkan keduanya saling mempengaruhi dalam implementasinya di lapangan. Strategi *Juche* Kim Il-Sung yaitu :¹¹⁶(1) strategi perang total; (2) strategi perpaduan perang reguler dan irreguler; (3) strategi serangan

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 346

¹¹⁶ Baek, Jong-Chun, *op.cit.*, hal. 291-292

mendadak *pre-emptive*¹¹⁷ yang berjangkauan luas; (4) strategi perang *blitzkrieg*. Strategi perang total adalah perang singkat yang terdiri dari taktik ofensif damai dengan menggabungkan unsur ekonomi-militer, diplomatik-militer dan psikologi-militer dalam peperangan. Strategi kedua adalah memukul musuh dimana pun untuk meninggalkan seluruh daerah Korea Selatan kembali ke medan tempur. Sedangkan strategi ketiga jelas jangkauannya sangat luas dimana terjadi penambahan pasukan reguler dan komando unit gerilya dari pasukan ireguler, dalam serangan *pre-emptive* itu ditekankan kecepatan adalah hal yang terpenting. Terakhir, suatu daerah harus dikuasai dulu dalam serangan cepat itu selanjutnya baru dilakukan negosiasi.

Dari pembahasan kebijaksanaan dan strategi militer Korea Utara tersebut, data menunjukkan bahwa besarnya jumlah personel militer (1.040.000) dari total populasi yang ada sekitar dua puluh tiga juta jiwa pada tahun 1995, dapat diterangkan dari setiap dua puluh penduduk terdapat satu orang militer. Lebih jelasnya seperti dilaporkan *U.S. Arms Control and Disarmament Agency 1996*¹¹⁸ berdasarkan variabel (*pasukan militer per 1000 orang*), maka Korea Utara menempati ranking pertama dengan 44,3 poin dari 167 negara yang dilaporkan. Jumlah ini jauh di atas Korea Selatan hanya berada di posisi ke-19 dengan 14,6 poin bahkan Amerika Serikat pun masih dilampauinya dengan 6,2 poin pada posisi 59 dari keseluruhan negara. Berikutnya berdasarkan variabel (*persentase total ekspor senjata*), Korea Utara melakukan ekspor senjata 3,6 % pertahun yang membuatnya berada pada

¹¹⁷ Penghancuran lebih dulu (*pre-emptive strike*) adalah serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh kekuatan nuklir negara tertentu terhadap sasaran-sasaran (yang secara logis adalah fasilitas-fasilitas militer dan industri dan bukan pusat-pusat tempat tinggal penduduk) di negara lain. Dikutip dalam Theodore A. Coulombis and James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional (Keadilan dan Power)*, Mercedes Marbun (alih bahasa), Putra Abardin, 1999, hal. 227

¹¹⁸ United States Arms Control and Disarmament Agency, *World Military Expenditures and Arms Transfers 1996*, Washington, D.C., hal. 41-42

posisi ke-6 di bawah Rusia (3) dengan 4,3 % dan Belarus (5) yaitu 4,0 %. Amerika Serikat sendiri dengan total 2,7 % menempati posisi ke-10, sebaliknya Korea Selatan di urutan ke-39 yang tidak diketahui jumlahnya.

Dengan demikian, maka sangat rasional dan beralasan apabila Korea Utara ingin menjadi negara dengan kekuatan hegemoni militernya di kawasan Asia Timur Laut umumnya bahkan di Semenanjung Korea pun Pyongyang ingin tampil mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan bekas Uni Soviet dengan ideologi Komunis dan kapabilitas militernya ingin menyebarkan paham tersebut melalui cara revolusi kepada Korea Selatan.

2.3.2. Peran Militer dalam Melaksanakan Kebijakan Proliferasi Nuklir

Untuk memudahkan realisasi dari setiap strategi dan kebijaksanaan militernya, maka diperlukan sistem kontrol, komando dan komunikasi disingkat dengan c3. Infrastruktur telekomunikasi yang modern akan meningkatkan kemampuan rejim dengan cepat untuk menjalankan tugas pengaturan pada saat damai maupun perang. Korea Utara saat ini sedang memodernisasi infrastruktur telekomunikasinya dalam mempercepat ekspansi komunikasi domestik dan internasionalnya seperti kabel serat optik yang menghubungkan Pyongyang dan Hamhung selesai awal tahun 1995 dengan fungsi utama membantu pasukan dekat garis demarkasi menginformasikan tugas dan terget dengan cepat dari pemimpin militer.¹¹⁹

Tidak hanya komunikasi, sistem komando militer Korea Utara juga bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuatan dari Komite Pertahanan

¹¹⁹ FAS, "Command and Control," dalam <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/facility/c3i.htm>, 15 Juni 2000

Nasional (NDC) sebagai badan pemerintahan tertinggi yang mengatur proyek pertahanan nasional. *The National Defense Committee* ini diketuai oleh Kim Jong-Il sebagai komandan tertinggi Tentara Rakyat Korea Utara dan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan perang atau operasi militer penting lainnya. Disamping itu masih ada Kementrian Angkatan Bersenjata Rakyat (MPAF) yang berada di bawah kontrol langsung NDC (lihat bagan-2). Menurut Konstitusi Korea Utara yang direvisi pada 5 Oktober 1998, NDC adalah organ komando militer dan pengaturan pertahanan nasional tertinggi negara, ditambahkan ketua NDC adalah pemimpin tertinggi negara yang mengontrol seluruh sistem ekonomi, politik dan militer Korea Utara.¹²⁰

Kementrian Angkatan Bersenjata (*The Ministry of People's Armed Forces-MPAF*) adalah bertanggung jawab terhadap pengaturan dan implementasi seluruh aktivitas korps reguler di bawah Biro Politik Umum, Departemen Staf Jenderal dan organisasi lainnya di bawah MPAF. Departemen Staf Jenderal memiliki otoritas komando nyata terhadap operasi militer. Struktur komando dalam bagan-2 dibawah ini menunjukkan besarnya pengaruh Kim Jong-Il dengan kekuasaannya yang mengontrol semua aktivitas militer Korea Utara, karena disamping sebagai anggota Presidium Biro Politik dan Sekretaris Partai Pekerja Korea, ia juga komandan tertinggi Tentara Rakyat Korea (KPA) serta ketua Pertahanan Nasional (NDC) Korea Utara sejak April 1993.

¹²⁰ The Republic of Korea Defense White paper 1999, *op.cit.*, hal. 32

yang ditargetkan untuk menghantam Jepang dan pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Selanjutnya resimen ke-110 dan ke-115 MCB membangun pangkalan rudal di Mayang-ri selatan Provinsi Hamgyong akhir tahun 1980 dengan tujuan menjangkau bagian barat Jepang. Terakhir pembangunan pangkalan rudal jarak menengah (*intermediate range ballistic missile*) dilakukan oleh MCB sendiri berlokasi di Gunung Kanggamchan, selatan Provinsi Pyongan.¹²¹

Jelas sekali bahwa proliferasi nuklir dan peluru kendali Korea Utara tidak hanya mengancam stabilitas keamanan di Semenanjung Korea, tapi meluas sampai Jepang serta kota-kota utama di kawasan Asia Selatan, Eropa bahkan Amerika Utara.¹²² Potensi ancaman rudal balistik Korea Utara inilah membuat khawatir negara-negara yang dianggap musuh potensialnya, karena selama ini secara diam-diam Pyongyang mengembangkan rudal jarak dekatnya seperti (FROGs, 240 mm MRLs, SS-215 dan HQ-2) yang mampu menjangkau Seoul dan daerah tempur utama lainnya, begitu pun rudal jarak menengah (Scud-B, Scud-C dan pengembangan Scud-C) yang tidak hanya menjangkau lapangan udara militer Korea Selatan tapi juga beberapa bagian Jepang. Yang terakhir adalah rudal balistik IRBM dan ICBM (No Dong, TaepoDong-1 dan Taepo Dong-2) mencapai sasaran di luar Asia Timur seperti Alaska (lihat tabel-9).

Proliferasi rudal balistik Korea Utara inilah menjadi faktor utama instabilitas di Timur Tengah, Mediterania dan Asia Selatan seperti yang ditunjukkan dalam (tabel-9) dimana negara itu mengarahkan sasarannya pada kota-kota utama yang berpenduduk padat dengan luas ribuan

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Bruce Bennett, *op.cit.*, hal. 202

kendali Korea Utara yang selama ini digunakannya untuk menghadapi ancaman senjata nuklir India dalam konflik Kashmir yang berkepanjangan.

Melalui uji coba peluncuran Taepo Dong-1 serta transfer teknologi rudalnya kepada negara lain dalam hal ini Pakistan, Korea Utara turut menciptakan instabilitas keamanan regional bahkan pada taraf tertentu menjadi ancaman global pasca Perang Dingin. Karena, program senjata nuklir dan peluru kendali Korea Utara bertujuan mengacaukan situasi keamanan sehingga kepentingannya untuk menjual senjata serta mencari dukungan atas krisis ekonomi dalam negeri guna mempertahankan keberadaan rejim Kim Jong-Il. Sehingga setiap negara yang berkepentingan dengan senjata nuklir harus berhubungan atau minimal menjalin kerjasama strategis untuk mengembangkan teknologi rudal dengan negara pengikut Stalin itu.

2.3. Reaksi Korea Selatan Terhadap Ancaman Nuklir Korea Utara

Bagi Korea Selatan, tidak ada jalan selain memperkuat keamanan dalam negerinya serta tetap siaga penuh menyusul ancaman-ancaman yang dilontarkan pihak Pyongyang untuk menjadikan Seoul dan kota-kota penting lainnya di Korea Selatan sebagai sasaran potensial senjata nuklir dan peluru kendali balistik Korea Utara, disamping terus berupaya mencari dukungan dari negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina dan Jepang untuk mendorong Korea Utara menciptakan perdamaian bagi proses reunifikasi Korea.

Proses ini mengalami kemandekan pasca KTT Pyongyang tahun 2000 lalu, karena Kim Jong-Il sampai saat ini belum melakukan kunjungan balasan

sebagai negara penganut paham Sosialis-Komunis, serta keterlibatan Rusia dalam pembagian kedua Korea.¹²⁶

Disamping itu, masih ada kunjungan delegasi tingkat tinggi Uni Eropa (UE) ke Pyongyang dalam usahanya untuk menggalang proses reunifikasi yang rawan di Semenanjung Korea yang terbagi dua itu.¹²⁷ Kepada Kim Jong-Il, delegasi yang dipimpin Perdana Menteri Swedia Goran Persson menjelaskan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa mendukung terciptanya perdamaian di Semenanjung Korea serta upaya Kim Jong-Il untuk membuka diri negaranya dengan berhubungan terhadap dunia luar pada saat berlangsungnya KTT Pyongyang tahun 2000 lalu. Korea Utara juga menerima rencana hubungan diplomatik ke-15 anggota Uni Eropa selain Prancis dan Irlandia untuk membantu memelihara perdamaian di Asia Timur Laut. Dijelaskan pula, keputusan itu merupakan keputusan independen masing-masing negara dengan kebijakan luar negeri yang independen pula.¹²⁸

Untuk menghadapi sikap keras kepala Korea Utara mengenai proliferasi nuklir serta peluru kendalnya yang mempengaruhi keamanan regional dan internasional, maka Korea Selatan mengambil beberapa strategi penting dalam mempertahankan kedaulatan serta integritas teritorialnya dari ancaman serangan kilat (*blitzkrieg*) Korea Utara. Menyadari bahwa negaranya jauh di bawah kapabilitas militer dan senjata ofensif yang dimiliki Korea Utara, para pemimpin militer Korea Selatan memfokuskan strategi peningkatan keamanan *deterrence* melawan invasi militer asing daripada

¹²⁶ *The Jakarta Post*, 28 Februari 2001

¹²⁷ *Kompas*, 3 Mei 2001

¹²⁸ *Surya*, 23 Oktober 2000

menggunakan kekuatan militer sebagai cara untuk mencapai kepentingan politik.

Selama lebih dari tiga puluh tahun, Korea Selatan melaksanakan strategi *deterrence* defensif untuk menghadapi strategi komunisasi Semenanjung Korea. Konsep strategi ini didasarkan pada pertahanan linier dengan menyiapkan tank-tank untuk mencegah serangan kilat Korea Utara. Tapi karena perkembangan senjata ofensif dan keunggulan personel militer Korea Utara, Korea Selatan akhirnya merubah strategi terdahulu menjadi strategi *deterrence* ofensif.¹²⁹ Strategi ini berupaya mengecek pergerakan musuh pada tahap paling awal melalui operasi konprehensif dari seluruh kapabilitas militer diikuti dengan upaya menghadang tindakan ofensif. Dengan kata lain, provokasi militer dihadapi pada tahap paling awal baik di area depan, belakang, di udara maupun di laut, sehingga sistem komando musuh dilumpuhkan di area depan sebelum pasukan musuh dihancurkan dalam serangan besar-besaran.¹³⁰

Untuk itu strategi militer Korea Selatan dibagi dia yaitu : pada saat damai maupun perang. Masa damai diantaranya menjamin keamanan nasional dan kesejahteraan rakyat dengan mencegah ancaman dan serangan dari luar serta membantu upaya pencapaian reunifikasi secara damai.¹³¹ Sedangkan pada masa perang, dilakukan melalui strategi pertahanan dari kombinasi pasukan Korea Selatan-Amerika Serikat dan mengusir musuh yang akan mengganggu landasan pembangunan unifikasi nasional.

Bagi Korea Selatan, kesiapan militer dan kemampuan pertahanan sendiri merupakan landasan utama untuk mencegah provokasi musuh di

¹²⁹ Baek, Joong-Chun, *op.cit.*, hal. 292-293

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Laporan Tahunan 1997/1998 Kedutaan Besar Republik Indonesia-Seoul, hal. 123

masa damai, sambil tetap mempertahankan kerjasama dan postur pertahanan Korea Selatan-Amerika Serikat untuk mengimbangi kekuatan militer Korea Utara. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Angkatan Bersenjata Korea Selatan adalah :¹³²

- 1) Mempertahankan negara dan bangsa terhadap ancaman dan agresi militer dari luar.
- 2) Membantu mewujudkan reunifikasi Korea secara damai.
- 3) Menjaga stabilitas regional dan berperan dalam perdamaian dunia.

Untuk mencapai hal ini, Angkatan Bersenjata Korea Selatan melakukan upaya diantaranya : mencegah provokasi musuh dalam masa damai, sambil membangun kesiapan tempur yang solid guna menghadapi segala bentuk provokasi musuh.¹³³ Selain itu pula, Korea Selatan memandang kurangnya forum kerjasama bilateral untuk membahas persoalan keamanan di Semenanjung Korea menyangkut isu nuklir Korea Utara sebagai salah satu reaksi positif terhadap ketidakpastian keamanan di kawasan tersebut. Memang sebelumnya telah ada perjanjian *the South-North Joint Declaration on Denuclearization* pada tahun 1991 yang bertujuan melarang masing-masing pihak untuk memproduksi, memiliki, menjual, menyimpan dan menggunakan senjata nuklir dan yang paling penting adanya inspeksi bersama antara pihak Utara dan Selatan mengenai permasalahan ini.

Kemudian berdasarkan perjanjian itu pula, dibentuklah Komisi Pengawasan Nuklir Bersama (*the Joint Nuclear Control Commission-JNCC*) pada bulan Maret 1992 untuk melaksanakan secara mendetail inspeksi bersama kedua Korea. Akan tetapi, pada akhirnya sulit

¹³² *Ibid.*





BAB III

UPAYA PROSES REUNIFIKASI DAMAI di SEMENANJUNG KOREA

3.1. Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan Sebelum KTT Pyongyang

Korea Utara dan Korea Selatan sejak lama sudah menjadi satu negara dengan identitas kebangsaan yang kuat dimana masyarakatnya telah memegang nilai-nilai Budha sebagai *way of life* mereka, namun dalam perjalanan sejarahnya negara di Semenanjung dekat Cina ini beberapa kali mengalami perpecahan, setelah itu bersatu lagi. Perpecahan terakhir terjadi setelah Perang Dunia II tepatnya pasca Perang Korea tahun 1950-1953 yang akhirnya membagi kedua negara di belahan utara berdiri Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) yang berideologi Komunis, sedangkan Republik Korea (ROK) yang berhaluan Liberal berdiri pada 15 Agustus 1948 menyusul pemilihan umum di bawah pengawasan PBB untuk membentuk pemerintahan demokratis.

Awal mula terjadinya Perang Korea selama tiga tahun itu adalah diawali ambisi internal Kim Il-Sung untuk menguasai Korea Selatan sebagai bagian dari ideologi Komunis yang dianut negaranya untuk membentuk pemerintahan sentralistis-militeristis.¹Penyerbuan oleh pasukan Korea Utara yang didukung Uni Soviet pada 25 Juni 1950 secara mendadak telah mengakibatkan kekacauan yang luas di wilayah selatan yang secara geografis

¹ Markus Duan Allo, "Reunifikasi Korea dengan Damai atau Paksaan?," *Kompas*, 5 April 1997

Denmark, India, Italia, Norwegia dan Swedia juga menyediakan bantuan medis.⁴

Perang Korea itu pada akhirnya berhenti ketika pada 27 Juli 1953 diadakan gencatan senjata yang ditandatangani di desa kecil Panmunjom tempat pertempuran terakhir terjadi dan secara politis dijadikan tempat penyelesaian peperangan. Meskipun tembak-menembak telah berakhir, pasukan tetap berada di tempatnya dan masing-masing mundur sejauh 2.000 meter dari garis terakhir kontak militer yang dimaksudkan untuk dapat menjamin perdamaian, mengawasi zona demiliterisasi dan untuk mencegah kemungkinan munculnya pertikaian baru.⁵

Keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada waktu itu hanya sebagai pihak yang mewakili kepentingan kedua Korea, dimana Soviet menerima penyerahan pasukan di utara garis lintang 38 derajat, sedangkan pasukan Amerika Serikat menjalankan fungsi serupa di bagian selatan garis lintang tersebut. Amerika Serikat sebenarnya tidak bermaksud membagi Korea menjadi dua secara permanen dan sejalan dengan kesepakatan sekutu ditetapkan bahwa Korea harus bersatu dan menjadi negara merdeka. Namun, karena tidak tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat-Uni Soviet disusul kemudian antara Uni Soviet-PBB tentang pemilihan umum dan unifikasi, mengakibatkan kemacetan total dan melahirkan rejim berbeda di Utara dan Selatan.⁶

Korea Utara yang menganut ideologi dan sistem ekonomi Sosialis-Komunis berhadapan dengan sistem politik-ekonomi Liberal Korea Selatan yang secara praktis pula menjadi penghalang keinginan untuk menyatukan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Tabel-10
Jajak Pendapat Mengenai Reunifikasi Korea

Reunifikasi Korea	Persentase
5 Tahun	31,8 %
10 Tahun	35,7 %
11-20 Tahun	13,2 %
20 Tahun Lebih	8,7 %
Tidak akan pernah terjadi	6,4 %

N = 500 Responden

Sumber : Korea Gallup, dikutip dalam Markus Duan Allo, *Kompas*, 5 April 1997. Data diolah oleh penulis.

Terlepas dari hasil jajak pendapat di atas, bahkan jauh sebelumnya pada Agustus 1971 keinginan reunifikasi Korea telah ada yang berusaha direalisasikan oleh organisasi Palang Merah di kedua negara Korea. Misi palang Merah ini adalah memulai perundingan penyatuan kembali keluarga yang terpisah oleh Perang Korea (1950-1953), dimana pertemuan itu diadakan bergantian di Seoul dan Pyongyang dari tahun 1972 sampai 1973. Kemudian pada bulan Juli 1972, Korea Utara dan Korea Selatan menandatangani komunike bersama pencarian resolusi damai mengenai reunifikasi dari negara yang terpisah itu. Misi Palang Merah selanjutnya adalah mengadakan perundingan di Panmunjom pada September 1984 tentang pemberian bantuan korban banjir oleh Korea Selatan kepada Korea Utara. Upaya menemukan keluarga yang terpisah untuk pertama kali terjadi pada September 1985 setelah 14 tahun usaha yang dilakukan Palang Merah Korea Utara dan Korea Selatan.⁸

⁸ Lihat Misalnya Appendix III : "History of Inter Korean Dialogues and Accords," dalam *Korea and World Affairs*, Vol. XXIV, No. 2, Summer 2000, hal. 317

hubungan kedua negara kembali mengalami kemunduran dan semakin jauh dari cita-cita awal perundingan.¹⁰

Berdasarkan catatan peristiwa tersebut, sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan kemunduran hubungan Korea Selatan-Korea Utara yaitu *pertama*, munculnya Kim Jong-Il sebagai pengganti kepemimpinan ayahnya Kim Il-Sung di Korea Utara ternyata tidak didukung oleh legitimasi politik yang kuat. Karena, ia hanya mengandalkan kharisma mendiang ayahnya untuk menjadi orang nomor satu di negara pengikut Stalin tersebut. Sehingga perlu dilakukan konsolidasi politik tanpa memperhitungkan hubungan negaranya dengan pihak Selatan demi kelangsungan rejimnya supaya tetap mendapatkan legitimasi dan pengakuan dari rakyat Korea Utara. Hal itu dilakukannya dengan memperkuat ketahanan militernya sebagai instrumen politik untuk menekan pihak-pihak yang tidak loyal dengan kepemimpinannya. Sehingga program senjata nuklir, peluru kendali bahkan senjata penghancur massa lainnya yang selama ini menjadi keunggulan pembangunan militer tetap dilanjutkan mengingat besarnya manfaat pengembangan senjata ofensif itu dalam mempertahankan keberadaan rejimnya.

Kedua, yaitu munculnya krisis ekonomi setelah kepemimpinan Kim Il-Sung, dimana jutaan rakyat Korea Utara mengalami kelaparan akibat kegagalan panen serta bencana alam lainnya seperti banjir yang melanda negara tersebut.¹¹ Maka dari itu, Kim Jong-Il berupaya untuk memperoleh bantuan ekonomi dari negara lainnya seperti dari Korea Selatan, Jepang bahkan Amerika Serikat guna memperbaiki pembangunan ekonomi nasional negaranya. Dengan persoalan domestik yang begitu berat serta ambisi tetap

¹⁰ History of Inter Korean Dialogues and Accords, *op.cit.*

South and North Korea, dikenal dengan *the "Basic Agreement"* merupakan suatu dokumen penting yang terdiri dari 4 Bab dan 25 Pasal menjelaskan poin-poin penting dari masing-masing bahasan seperti Bab I mengenai Rekonsiliasi Korea Utara-Korea Selatan. Kemudian Bab II tentang Non-agresi Korea Utara dan Korea Selatan, Bab III Pertukaran dan Kerjasama Korut-Korsel dan terakhir Bab IV perihal Amandemen dan Pelaksanaannya.¹³

Inti dari perjanjian *the Basic Agreement* ini adalah terbagi menjadi tiga bidang yaitu bidang politik sebagaimana diuraikan dalam bab I, bidang militer terangkum dalam Bab II dan bidang ekonomi yang juga diuraikan dalam Bab III. Bidang politik misalnya, menyadari adanya perbedaan masing-masing sistem yang dijalankan di kedua Korea (Pasal-1), dimana keduanya tidak akan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing (Pasal-2), tidak akan memfitnah dan merendahkan (Pasal-3) dan (Pasal-4) kedua belah pihak tidak akan melakukan upaya sabotase terhadap yang lainnya. Sedangkan pasal yang terpenting adalah tentang dibentuknya suatu Komite Politik Korea Utara dan Korea Selatan dalam kerangka Perundingan Tingkat Tinggi untuk mendiskusikan cara implementasi rekonsiliasi Utara-Selatan (Pasal-8).¹⁴

Bidang politik ini penting sebagai dasar untuk mencari pemahaman akan perbedaan sistem Komunis di Korea Utara dan sistem Liberal yang ada di Korea Selatan sehingga upaya rekonsiliasi dan reunifikasi dapat dilakukan melalui mekanisme diplomasi damai dalam Komite Politik yang dibentuk oleh kedua belah pihak. Hal ini kelihatannya normatif dan masih sulit untuk

¹³ Lihat misalnya : Agreement on Reconciliation, Nonaggression and Exchanges and Cooperation between the South and North Korea, P'nmunjom Korea, 13 Desember 1991, dalam *Korea : A Nation Transformed II, Selected Speeches of President Roh Tae Woo*, The Presidential Secretariat the Republic of Korea, Seoul, 1992, hal. 364

¹⁴ *Ibid.*

diimplementasikan mengingat sudah begitu kuatnya ideologi dan sistem politik Komunis dan Liberal yang dijalankan oleh masing-masing pihak sampai menjadi doktrin negara yang sah untuk mempengaruhi rakyatnya. Akibatnya adalah kedua belah pihak tetap bertahan pada prinsipnya masing-masing dalam memandang rekonsiliasi dimana perbedaan yang ada bukannya segera dikurangi untuk selanjutnya mencarikan persamaan visi dan misi bersama mengenai masa depan penyatuan kembali Korea.

Faktor yang membedakan keberhasilan penyatuan kembali Jerman (Jerman Barat dan Jerman Timur) dengan proses reunifikasi Korea (Korea Utara dan Korea Selatan) adalah rejim Korea Utara (tidak seperti negara-negara Eropa Timur) sangat bergantung pada legitimasi politik bekas Uni Soviet dan pengalaman ekonomi pasar atau suatu demokrasi parlementer hampir tidak pernah ada di negara itu. Walaupun Korea Utara menunjukkan tanda-tanda sedang berubah secara perlahan di beberapa bidang, rejim tersebut berupaya mengasingkan demokrasi politik dan melanjutkan penyebaran ideologi *Juche* (*self-reliance*) sebagai dasar legitimasi politik untuk mengasingkan rakyatnya dari dunia luar.¹⁵ Sehingga kesempatan bagi keberhasilan reunifikasi bergantung pada performa ekonomi Korea Utara, kemampuan menerima informasi luar dan fleksibilitas rejim dalam mengakomodasi aspirasi masyarakatnya.¹⁶

Begitu pula seperti pemisahan Jerman, pembagian Semenanjung Korea adalah hasil dari Perang Dunia II tapi tidak seperti masyarakat Jerman, rakyat Korea telah mengalami perang bersaudara yang sangat berdarah dan polarisasi serta antagonisme yang sangat mendalam di antara mereka.

¹⁵ Woo Sik Kee, "The Path Towards a Unified Korean Economy," *Korea and World Affairs*, Vol. XV, No. 1, Spring 1991, hal. 22

¹⁶ *Ibid.*

yang menghambat terciptanya perdamaian sebagai landasan penting bagi proses reunifikasi damai yang lebih diinginkan oleh Korea Selatan.

Memang Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berada dalam suasana perang, karena Perang Korea (1950-1953) lalu tidak pernah diakhiri secara formal melalui perjanjian perdamaian oleh kedua belah pihak dan hanya dilakukan lewat gencatan senjata yang bersifat temporal tanpa mengikat kedua negara.²² Atas dasar inilah, maka perjanjian non-agresi Korea Utara-Korea Selatan yang tertuang dalam Bab II tersebut dilaksanakan dengan harapan mencegah salah satu pihak melancarkan konfrontasi, agitasi dan propaganda militer yang dapat menyulut konflik serta perang baru di Semenanjung Korea seperti yang pernah terjadi belakangan ini bahkan pasca KTT Pyongyang tahun 2000 lalu pun, menurut *Laporan Tahunan 1999/2000 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul*,²³ menjelaskan masih adanya upaya-upaya provokasi oleh tentara Korea Utara di dekat zona demiliterisasi untuk menciptakan suasana kacau dalam upayanya memulai serangan kilat (*blitzkrieg*) ke Korea Selatan. Juga terjadinya insiden Korea Utara-Korea Selatan di Laut Kuning, dimana kapal Angkatan Laut (AL) Korsel melepaskan tembakan peringatan untuk mengusir sebuah kapal nelayan Korut yang melanggar perbatasan di Laut Kuning.²⁴

Kondisi tidak menentu dan ketidakpastian keamanan di Semenanjung Korea mengakibatkan masing-masing pihak berjaga-jaga dan selalu siap siaga terutama di desa Panmunjom yang merupakan garis demarkasi tentara Korea Utara dan Korea Selatan. Selain itu, masih adanya keinginan Korea Utara dalam konteks ini Kim Jong-Il untuk tetap mempertahankan

²² Kompas, *op.cit.*

²³ Laporan Tahunan 1999/2000 *Kedutaan Besar Republik Indonesia-Seoul*, hal. 120

²⁴ Kompas, 25 Juni 2001

mengimplementasikan kesepakatan *The South-North Exchanges and Cooperation* ini.²⁵

Dari isi perjanjian *the "Basic Agreement"* antara Korea Utara dan Korea Selatan di atas, dapat dirangkum dua hal penting yaitu : *pertama*, baik pihak Pyongyang maupun pihak Seoul sama-sama menyadari bahwa setiap permasalahan yang dihadapi dalam upayanya mencapai reunifikasi Korea adalah tanggung jawab kedua negara. Karena, rakyat Korea sebagai 'master' dari Semenanjung Korea tidak menginginkan campur tangan secara langsung dari pihak lain untuk memaksakan kepentingannya dalam proses reunifikasi yang sedang berlangsung. Sehingga apapun yang terjadi akan dihadapi bersama oleh rakyat kedua negara. *Kedua*, adalah disepakatinya pembentukan suatu komite yang menangani masing-masing bidang (politik, ekonomi dan militer) antara Korea Utara dan Korea Selatan sebagai forum tertinggi dari perundingan kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi, non-agresi dan kerjasama Korea Utara-Korea Selatan bersifat gradual dan bertahap berdasarkan aspirasi rakyat kedua negara yang bisa saja mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhannya melalui amandemen yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3.1.2. Perjanjian *the Joint Declaration on Denuclearization of the Korean Peninsula*

Dalam perkembangan selanjutnya dimana situasi keamanan di Semenanjung Korea mengarah pada instabilitas dan ketidakpastian hubungan kedua negara akibat berlanjutnya program senjata nuklir Korea Utara yang sangat meresahkan serta nasib reunifikasi Korea yang tidak

²⁵ Agreement on Reconciliation, *op.cit.*

kunjung tiba, maka kedua Korea kembali mengadakan perjanjian untuk mengurangi kemungkinan bahaya perang nuklir menuju pada denuklirisasi Semenanjung Korea yang dapat menciptakan kondisi kondusif bagi reunifikasi damai. Memang dalam sejarahnya, belum pernah terjadi dalam perang modern penggunaan senjata nuklir secara langsung oleh negara-negara senjata nuklir (*the nuclear states*) untuk menghancurkan musuh setelah peristiwa Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada tahun 1945 yang sekaligus mengakhiri Perang Dunia II.

Dengan demikian, senjata nuklir itu sendiri juga bisa berfungsi sebagai pencegah (*deterrence*) kemungkinan munculnya perang nuklir serta bahayanya bagi negara-negara non-nuklir (*non-nuclear weapon states*). Karena, bagi negara yang secara potensial memiliki senjata nuklir seperti Korea Utara tentu berlaku baginya kebijakan tidak menggunakan pertama (*no first use policy*) senjata nuklir dimana negara-negara non-senjata nuklir menjamin bahwa negara senjata nuklir tidak akan memulai menggunakan senjata penghancur massa kepada negara nuklir lainnya yang akan dibalas oleh negara tersebut dengan berbagai cara bahkan lebih dahsyat dari penggunaan yang pertama.²⁶ Sehingga siapapun yang menggunakan dan yang membalasnya sama-sama mengalami kehancuran akibat efek yang ditimbulkan oleh senjata nuklir tersebut.

Berangkat dari kekhawatiran dan ketakutan akan ancaman serangan nuklir Korea Utara itulah, Seoul lalu mengajak pihak Pyongyang untuk bersama-sama menciptakan perdamaian tanpa penggunaan senjata nuklir di Semenanjung Korea. Perjanjian yang disebut *the Joint Declaration on Denuclearization of the Korean Peninsula* ini ditandatangani oleh Perdana

²⁶ Proliferation of War, Centre for Strategic and International Studies

²⁷ Debuta dalam Appendix: "Joint Declaration on Denuclearization

and World Affairs, Vol. XVI, No. 1, Spring 1975, 61

Menteri Republik Korea Chung Won-shik dengan Yong Hyong-muk Menteri Dewan Administrasi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) pada tanggal 20 Januari 1992, menyatakan sebagai berikut :²⁷

1. *The South and the North shall not test, manufacture, produce, receive, possess, store, deploy or use nuclear weapons.*
2. *The South and the North shall use nuclear energy solely for peaceful purposes.*
3. *The South and the North, in order to verify the denuclearization of the Korean peninsula, shall conduct inspection of the objects selected by the other side and agreed upon between the two sides, in accordance with procedures and methods to be determined by the South-North Joint Nuclear Control Commission.*
4. *The South and the North, in order to implement this joint declaration, shall establish and operate a South-North Joint Nuclear Control Commission with in one (1) month of the effectuation of this joint declaration.*
5. *This Joint Declaration shall enter into force as of the day the two sides exchange appropriate instruments following the completion of their respective procedures for bringing it into effect.*

Melalui perjanjian ini, maka masing-masing pihak diharapkan menyadari akan pentingnya denuklirisasi di Semenanjung Korea untuk tidak membuat, memproduksi, menerima, memiliki, menjual, memperbanyak bahkan mempergunakan senjata nuklir sendiri. Disamping itu, bagi Korea Utara dan Korea Selatan nuklir hanya dapat digunakan untuk tujuan damai sebagai energi pembangkit listrik yang diperlukan oleh rakyat kedua Korea. Yang terpenting dari enam poin perjanjian di atas adalah Korea Utara dan Korea Selatan diikat secara formal melalui kesepakatan dengan segala konsekuensi yang ditimbulkannya.

Adanya dua perjanjian yaitu *the Basic Agreement* dengan *the Joint Declaration on Denuclearization of the Korean Peninsula* ini merupakan

²⁶ Ralph A. Cossa, "Proliferation and Regional Security," dalam Ramesh Thakur (ed.), *Keeping Proliferation at Bay*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1996, hal. 111

²⁷ Dikutip dalam Appendix : "Joint Declaration on Denuclearization of the Korean Peninsula," *Korea and World Affairs*, Vol. XVI, No. 1, Spring 1992, hal. 149

instrumen politik serta moral kedua negara untuk mencapai tujuan jangka panjang berupa reunifikasi damai di Semenanjung Korea. Hal ini merupakan langkah maju dari sejarah hubungan kedua negara yang bermusuhan selama setengah abad akibat perbedaan ideologi, sistem politik dan sistem ekonomi yang tidak pernah merasakan kedamaian atas persaudaraan mereka.

Masalah proliferasi nuklir pasca Perang Dingin saat ini bukannya semakin berkurang tapi mengalami akumulasi, sehingga apapun upaya untuk mengurangi bahkan menghentikan penyebaran senjata nuklir selalu mengalami pro-kontra seputar isu krusial ini.²⁸ Seperti yang dikemukakan oleh beberapa kelompok pemikir yang telah mengamati permasalahan ini berdasarkan kajian keilmuan, fakta yang berkembang di lapangan serta sedikit prediksi mengenai masa depan proliferasi nuklir dewasa ini. Menurut Nicholas J. Wheeler,²⁹ terdapat empat aliran pemikiran yang memberikan pendapat berbeda beserta alasan pendukungnya masing-masing tentang proliferasi nuklir pasca Perang Dingin yaitu : Fatalis, Mitigator Unilateral, Mitigator Kooperatif dan Abolisionis.

Adapun kaum Fatalis dan Mitigator Unilateral merupakan kelompok pemikir yang pesimis terhadap kontrol dan pengawasan mengenai proliferasi nuklir dari suatu negara atau masyarakat internasional, sedangkan Mitigator Kooperatif dan Abolisionis sesuai dengan namanya sangat optimis dan kooperatif terhadap peran yang dimainkan negara-negara berkaitan dengan proliferasi nuklir guna mencegah perang nuklir terutama fungsi

²⁸ Nicholas J. Wheeler and Simon J. Davies, "Security, Nuclear Proliferation and the End of the Cold War," dalam M. Jane Davies (ed.), *Security Issues in the Post-Cold War World*, Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 1996, hal. 146

²⁹ *Ibid.*

deterrence (pencegahan) yang dimainkan oleh suatu negara. Lebih lanjut argumentasi keempat kelompok pemikir itu diuraikan di bawah ini.

Kaum Fatalis meyakini sedikit sekali usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada upaya untuk menghentikan kapabilitas penyebaran senjata nuklir tiap tahun. Karena, tidak semua negara mempunyai sumber keuangan yang cukup untuk memproduksi senjata nuklir. Namun jika suatu negara mempunyai dana yang cukup, maka dia akan berupaya untuk memiliki senjata nuklir itu.³⁰ Pemikiran inilah yang disebut dengan pesimisme mengenai kontrol dan pengawasan penyebaran nuklir.

Adalah Colin Gray, salah seorang tokoh pemikiran Fatalis mencoba menganalisa lingkungan keamanan nuklir pasca Perang Dingin yang dideskripsikannya sebagai rimba dimana ketidakamanan ada di mana-mana serta negara-negara predator memiliki senjata nuklir sebagai instrumen intimidasi dan ancaman kepada negara lainnya yang pada gilirannya perang nuklir akan merusak secara periodik tatanan keamanan global. Berbeda dengan pandangan Rather (seorang realis) yang meyakini kemandirian adalah kondisi alami politik dalam negeri suatu negara dan membantah bahwa penyebaran senjata nuklir dapat memberikan keuntungan bagi keamanan regional maupun keamanan internasional.³¹

Pendapat kaum Fatalis di atas sah-sah saja apabila dikaitkan dengan makin 'maraknya' proliferasi nuklir secara horisontal tentunya yang dilakukan oleh negara-negara Dunia Ketiga yang hampir pasti ditujukan untuk meningkatkan prestise regional dan internasionalnya bagi

³⁰ *Ibid.*, hal. 148

³¹ *Ibid.*

proliferasi mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap keputusan suatu negara untuk memiliki senjata nuklir. Karena, begitu sedikitnya kerjasama yang dilakukan oleh negara senjata nuklir untuk membentuk rejim pengontrol senjata regional atau internasional sehingga pada akhirnya memainkan peran yang kecil dalam menciptakan stabilitas dan keamanan yang sudah diperankan oleh negara senjata nuklir tersebut. Selama senjata nuklir efektif sebagai penangkal serangan negara lain, maka keberadaan rejim pengontrol senjata nuklir regional itu pun makin terpinggirkan.

Pemikiran ketiga adalah Mitigator Kooperatif yang mempunyai argumentasi berbeda dengan Fatalis dan Mitigator Unilateral, dimana para pendukung pemikiran ini berkeyakinan bahwa rejim keamanan regional dan global mempunyai peran yang penting dalam mencegah penyebaran nuklir.³³ Mitigator kooperatif lebih menekankan pada kekuatan legitimasi politik dari setiap perjanjian non-nuklir yang dilakukan oleh masyarakat internasional seperti NPT (*Non Proliferation Treaty*) ataupun peran Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam menciptakan stabilitas keamanan regional maupun internasional. Untuk itu, Mitigator Kooperatif menganjurkan dua faktor penting dalam menciptakan stabilitas nuklir yaitu :³⁴

Pertama, kekuatan-kekuatan nuklir harus memberikan konsistensi dan rasionalitas dari kebijakannya untuk menyediakan bantuan bagi proyek tenaga nuklir sipil di negara-negara berkembang.³⁵ Tujuannya adalah mencegah pembangunan reaktor grafit untuk mengembangkan senjata nuklir seperti yang dilakukan oleh Korea Utara sehingga mengkhawatirkan negara lainnya seperti Korea Selatan dan Jepang akan ancaman penggunaan senjata

³³ *Ibid.*, hal. 150

³⁴ *Ibid.*, hal. 151

³⁵ *Ibid.*

nuklirnya untuk menghantam kota-kota utama di kedua negara itu. Disamping itu pula, rejim NPT seharusnya tidak membeda-bedakan perlakuan antara negara senjata nuklir utama seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis dan Cina dengan kemungkinan tindakan radikal yang diambil oleh suatu negara potensi nuklir seperti Korea Utara yang cenderung pasif atas segala inspeksi IAEA.

Kedua, yaitu negara-negara senjata nuklir harus lebih giat lagi mengusahakan pengurangan senjata nuklir melalui perjanjian START II (*Strategic Arms Reduction Talks*) atau perundingan pengurangan senjata strategis termasuk juga CTBT (*Comprehensive Test Ban Treaty*) yaitu perjanjian pelarangan uji coba nuklir komprehensif pada tahun 1996.³⁶ Melalui dua perangkat perjanjian internasional itu nantinya memberikan dampak yang positif terutama bagi negara yang secara politik-ekonomi mengalami krisis di dalam negerinya, sehingga ia dapat berbuat apa saja seperti ancaman untuk terus membangun reaktor nuklir yang diperlihatkan oleh Korea Utara belakangan ini. Adapun perjanjian START II antara Rusia dan Amerika Serikat bertujuan untuk mengurangi hulu ledak nuklir masing-masing negara sebanyak 3.000-3.500 unit.³⁷

Terakhir, adalah pemikiran kaum Abolisionis yang menyatakan adanya dua perbedaan mendasar dari pendekatan untuk menyelesaikan perlucutan senjata nuklir global, yaitu keadaan pasca deterren (*post-existential deterrence*) dan penghapusan nuklir (*transcending*).³⁸ Adapun kunci perbedaan di antara keduanya adalah peran yang dimainkan oleh ancaman kekuatan dalam hubungan antar negara. Jonathan Schell misalnya, mengungkapkan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Kompas*, 5 Juni 2000

³⁸ Nicholas J. Wheeler and Simon J. Davies, *op.cit.*, hal. 154

negara senjata nuklir. Sehingga apapun situasinya, pasti memberikan legalitas suatu negara untuk lebih berperan di tingkat regional maupun global.

Dengan demikian, untuk memahami fenomena proliferasi nuklir pasca Perang Dingin dewasa ini diperlukan lebih dari satu pendekatan untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif. Karena, setiap negara tentu mempunyai latar belakang dan tujuan yang berbeda dalam kepemilikan senjata nuklirnya yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan regional maupun lingkungan internasional dimana interaksi berbagai negara banyak terjadi di dalamnya.

Kasus proliferasi nuklir Korea Utara dipandang lebih menarik terutama setelah runtuhnya Uni Soviet serta menurunnya rasa solidaritas di antara negara-negara Komunis di dunia. Dalam konteks klasifikasi di atas, Korea Utara lebih memfokuskan pada keinginan menjadi negara yang kuat dan mandiri secara militer tanpa bergantung pada payung keamanan (*security umbrella*) negara lain. Disamping itu, senjata nuklir bagi Pyongyang bertujuan untuk mengimbangi secara strategis (*strategic equalizer*) kemampuan konvensional Amerika Serikat-Korea Selatan yang dianggapnya sebagai musuh potensial untuk mencapai tujuannya mengkomunikasikan seluruh Semenanjung Korea melalui kekuatan militer.

Sehingga tidak mengherankan apabila hubungan Korea Utara-Korea Selatan selama ini sering diwarnai tarik-ulur kepentingan kedua negara untuk mempertahankan prinsip yang dianut masing-masing pihak. Namun demikian, sejarah hubungan kedua Korea setidaknya menyadarkan mereka akan perang masing-masing dalam setiap perjanjian yang dilakukan menuju pada rekonsiliasi dan reunifikasi damai yang sekarang digemakan.

3.2. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pyongyang dan Reunifikasi Korea

Salah satu fenomena internasional yang penting dalam membangun tata hubungan baru antar negara adalah peristiwa runtuhnya imperium Uni Soviet tahun 1991 yang terjadi tanpa melalui peperangan dan tidak pernah dibayangkan para pengamat politik internasional sebelumnya. Memang tepat apabila ambruknya Uni Soviet yang berimplikasi pada perubahan peta persaingan ideologi Timur-Barat adalah peristiwa politik daripada militer. Karena, Uni Soviet yang sejak kemunculannya sebagai salah satu negara adikuasa (disamping Amerika Serikat) telah mengalami masalah ekonomi-politik yang sangat pelik di dalam negerinya kontras dengan keunggulan militer negara *Beruang Merah* itu sebagai instrumen kekuasaan dalam menghadapi pesaing strategisnya (*strategic competitor*) secara global pasca Perang Dunia II yaitu Amerika Serikat.

Hancurnya Uni Soviet lebih dikarenakan ketidakmampuan negara itu untuk menandingi kebijakan (*counter policy*) jangka panjang Amerika Serikat untuk terus membendung penyebaran ideologi Komunis Uni Soviet di tingkat global. Kebijakan pembendungan (*containment policy*) yang dilakukan Amerika Serikat ternyata efektif menangkal meluasnya pengaruh Uni Soviet di negara-negara Eropa (khususnya Eropa Timur), Asia bahkan dengan aliansi tradisionalnya seperti Cina dalam konteks persaingan ideologi dan politik Timur-Barat. Amerika Serikat dengan keunggulan ekonominya berupaya menarik simpati negara-negara Dunia Ketiga dengan memberikan bantuan ekonomi melalui mekanisme pengenalan ekonomi pasar dan ideologi Kapitalisme, sehingga berhasil mempengaruhi beberapa negara baru merdeka di berbagai kawasan.

serta semakin meningkatnya hubungan ekonomi antar Korea sejak tahun 1988.⁴²

Begitu pula situasi yang terjadi di Semenanjung Korea sebagai satu-satunya tempat di dunia dimana kepentingan empat negara *major powers* Amerika Serikat, Jepang, Cina dan Rusia berada dan saling berkaitan dalam lingkup hubungan geografis yang sangat dekat juga mengalami perubahan, minimal upaya mengurangi ketegangan dan permusuhan kedua Korea selama setengah abad pemisahan Korea Utara-Korea Selatan. Fenomena ini disikapi sebagai babak baru dalam hubungan bilateral Pyongyang-Seoul untuk kembali mengadakan perundingan dan dialog mengenai masa depan Semenanjung Korea seperti yang pernah dilakukan keduanya melalui perjanjian *the Agreement on Reconciliation, Nonaggression, Exchanges and Cooperation between the South and North Korea* atau lazimnya disebut *the "Basic Agreement"* pada 13 Desember 1991 lalu, serta disusul dengan perjanjian *the Joint Declaration on Denuclearization of the Korean Peninsula* pada 20 Januari 1992.

Berdasarkan dua perjanjian di atas, serta adanya keinginan yang kuat kedua negara untuk kembali mengupayakan terjadinya proses rekonsiliasi yang mengarah pada penciptaan suasana damai bagi reunifikasi Korea, maka dicapailah kesepakatan di antara kedua pemimpin Korea yaitu Presiden Kim Dae-Jung dari Korea Selatan dan Kim Jong-Il sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara untuk mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Pyongyang (Korea Utara) pada 13-15 Juni 2000.⁴³ Pertemuan puncak kedua pemimpin Korea ini merupakan peristiwa bersejarah bagi kedua Korea,

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

karena untuk pertama kalinya secara pribadi kedua pemimpin negara bertemu dan mengadakan dialog untuk menandatangani sebuah perjanjian penting selama lima puluh tahun sejak pemisahan kedua negara. Sehingga wajar apabila pertemuan puncak di Pyongyang disambut gembira oleh rakyat Korea yang larut dalam eforia dan tidak hanya itu, masyarakat internasional pun menanggapi positif atas suksesnya pertemuan puncak Korea Utara-Korea Selatan yang dinilai akan melapangkan jalan bagi upaya rekonsiliasi dan reunifikasi di Semenanjung Korea.⁴⁴

Dalam pertemuan puncak selama tiga hari di Pyongyang itu, Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung dan Kim Jong-Il, Ketua Komisi Pertahanan Nasional Republik Demokratik Rakyat Korea bertujuan mendorong pemahaman bersama dan menetapkan hubungan dalam merealisasikan reunifikasi damai di antara kedua negara, menyatakan sebagai berikut :⁴⁵

- 1) *The North and the South, in their capacities as masters, have agreed to resolve the question of unifying the country independently through their own joint efforts as anation.*
- 2) *The North and the South, recognizing that the two different formulas that the two sides respectively have for unification of the country, the South's "confederation" formula and the North's "federal" formula in its early stage version, each share certain "common features," have agreed to pursue unification along these lines in the days ahead.*
- 3) *The North and the South, have agreed to resolve humanitarian problems between them as soon as possible, taking advantage of the National Liberation Day of August 15 this year as an occasion to exchange groups of separated family members and relatives and to settle the issue of those who continue to refuse to switch their allegiance after release from longterm imprisonment (in the South).*
- 4) *The North and the South have agreed to pursue the balanced development of a national economy through economic cooperation and solidify their mutual trust*

⁴⁴ *Kompas*, 17 Juni 2000

⁴⁵ Dikutip dalam Dong-bok Lee, "Inter-Korean Summitry," *Korea and World Affairs*, Vol. XXIV, No. 2, Summer 2000

through the revitalization of cooperation and exchanges in social, cultural, sports, health and environmental as well as other fields.

- 5) *The North and South have agreed to hold the dialogue between their respective authorities at an early date in order to put the above agreement to implementation.*

Dalam perjanjian *the 2000 South-North Summit* seperti yang dikutip di atas secara jelas menunjukkan bahwa pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan menyatakan : *pertama*, setuju untuk memecahkan masalah reunifikasi di negeri masing-masing secara independen dengan upaya terpadu bangsa Korea.⁴⁶ Secara "independen" dalam poin pertama mengandung makna yang berbeda berdasarkan konteks masing-masing pihak. Korea Utara terutama menginginkan "independensi" ini dengan maksud untuk melakukan revolusi anti-imperialis bagi pembebasan nasional Korea Selatan yang dianggapnya masih dipengaruhi oleh bangsa asing dalam konteks ini Amerika Serikat yang segera memperoleh "independensi" untuk menjadi negara berdaulat.⁴⁷

Sedangkan Kim Dae-Jung menjelaskan konsep "independensi" itu berbeda dengan apa yang dimaksud Kim Jong-Il di atas, karena independen itu bukan menolak pengaruh asing dalam proses reunifikasi Korea, tapi bagaimana menyeimbangkan kepentingan dan juga dukungan pihak asing tersebut dengan pengambilan keputusan akhir (*the last decision making*) oleh kedua Korea mengenai reunifikasi yang tidak dipengaruhi oleh keputusan negara lain.⁴⁸ Jadi, independen dalam konteks ini mengacu pada kebebasan mengambil keputusan akhir oleh Korea Utara dan Korea Selatan, walaupun

⁴⁶ *Kompas*, 16 Juni 2000

⁴⁷ Dong-bok Lee, *op.cit.*, hal. 218

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 219

awalnya banyak mendapatkan kritikan, pandangan serta koreksi dari negara lain, namun hal itu dianggap bentuk solidaritas sesama negara berdaulat yang tidak akan mempengaruhi keputusan akhir bangsa Korea. "Masalah reunifikasi adalah masalah bangsa Korea sendiri," itulah arti independen menurut Kim Dae-Jung.⁴⁹

Selanjutnya pada poin kedua isi perjanjian KTT Pyongyang tahun 2000 yang dianggap penting untuk dielaborasi adalah : mengetahui adanya usulan federasi yang diajukan pihak Utara dan proposal konfederasi yang diajukan pihak Selatan untuk menyatukan Semenanjung Korea di masa mendatang.⁵⁰ Konsep federasi oleh Korea Utara dan konfederasi bagi Korea Selatan adalah mewakili kepentingan masing-masing negara dalam proses reunifikasi. Kedua negara sama-sama mengharapkan perbedaan konsep reunifikasi tidak akan mengakibatkan perubahan tujuan dan cita-cita bersama bangsa Korea untuk menyelesaikan masalah ini secara bertahap.

Namun yang menarik dari terselenggaranya KTT Pyongyang tahun 2000 lalu adalah berdasarkan motivasi dan kepentingan yang berbeda dari masing-masing pemimpin Korea. Menurut Laporan Tahunan 2000 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul menjelaskan bahwa motivasi Kim Jong-Il dalam pertemuan puncak antar Korea adalah untuk mendapatkan bantuan ekonomi serta dukungan masyarakat internasional dalam memperbaiki perekonomian negaranya.⁵¹ karena, runtuhnya Uni Soviet yang selama ini menjadi penyedia utama kebutuhan Korea Utara akan sumber-sumber strategis seperti minyak, barang-barang industri, berbagai peralatan bagi industri kimia dan industri berat termasuk baja, tekstil dan pupuk turut

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Kompas, *op.cit.*

⁵¹ Laporan Tahunan 2000 Kedutaan Besar Republik Indonesia-Seoul, hal. 113

lenyap. Disamping itu, dukungan Rusia sebagai negara pengganti Uni Soviet terhadap Korea Utara saat ini didasarkan pada jual-beli dengan meminta bayaran kas atas berbagai komoditas ekspornya. Begitupun Cina melakukan hal yang sama terhadap perdagangannya dengan Korea Utara yang mengakibatkan Kim Jong-Il menyadari realitas apabila pihaknya tetap menutup diri terhadap dunia internasional, maka sangat sedikit dukungan dan transaksi ekonomi yang dapat membantu Korea Utara memperoleh devisa.

Di lain pihak, Presiden Kim Dae-Jung juga menyadari jika reunifikasi berlangsung dengan cepat akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi, seperti pengalaman reunifikasi Jerman Barat-Jerman Timur. Oleh karena itu, Korea Selatan tidak akan melaksanakan reunifikasi dalam waktu dekat semasih tingkat perbedaan ekonomi kedua Korea masih jauh.⁵² Yang dikehendaki Presiden Kim Dae-Jung saat ini adalah adanya simpati dan penghargaan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi partainya *Millennium Democratic Party (MDP)* dalam menghadapi pemilihan presiden berikutnya di Korea Selatan.⁵³ Hal ini terbukti dengan hadiah Nobel Perdamaian tahun 2000 yang diterima Kim Dae-Jung atas kebijakan *The Sunshine Policy* (Sinar Matahari) yang turut memacu demokrasi dan hak-hak asasi manusia di Korea Selatan dan Asia Timur pada umumnya serta rekonsiliasi dan peredaan ketegangan menuju perdamaian dengan Korea Utara khususnya.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ Chun Chaesung, *op.cit.*, hal. 38

⁵⁴ *Jawa Pos*, 14 Oktober 2000

rekonsiliasi dan reunifikasi Korea. Sehingga hasil KTT Pyongyang tetap memegang peran penting sebagai dokumen resmi perjanjian yang mengikat seluruh rakyat Korea atas motivasi dan kesadaran sebagai satu bangsa yang terpisah oleh kekuatan eksternal pasca Perang Korea lalu.

3.2.1. Kebijakan *The Sunshine Policy* Kim Dae-Jung

Di atas telah disinggung mengenai suatu kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintahan Kim Dae-Jung di Korea Selatan yaitu kebijakan "Sinar Matahari" atau *The Sunshine Policy*.⁵⁶ Kebijakan *Sunshine Policy* ini bukanlah hal yang baru bagi Kim Dae-Jung, karena jauh sebelum dirinya terpilih menjadi Presiden Korea Selatan, pada tahun 1994 ia telah memberikan pidato pada Yayasan Warisan di Washington D.C. Amerika Serikat, pernyataannya adalah :

*"American must patiently adhere to the "Sunshine Policy" which proved to be the only effective way to deal isolated countries such as North Korea."*⁵⁷

Melalui pidato tersebut, Kim Dae-Jung yang waktu itu menjadi salah satu kandidat presiden pada pemilihan umum tahun 1997 bermaksud memperkenalkan kebijakan partainya yaitu Partai Demokratik Millennium (MDP) kepada masyarakat Amerika Serikat agar pemerintah negara itu sabar menjalin hubungan dengan negara terisolasi tersebut dan diharapkan

⁵⁶ *The Sunshine Policy is the mainstay of the Republic of Korea's North Korea policies aimed at achieving peace on the Korean peninsula through reconciliation and cooperation with the North.* Dikutip dalam "The Government of the People" *Sunshine Policy toward North Korea and Plans for Implementation*, <http://www.atimes.com/> 12 April 1999

⁵⁷ Dikutip dalam Moon Chung-in, "The Sunshine Policy and the Korean Summit," [http://www.nis.go.kr/National Security/Reunification Policies](http://www.nis.go.kr/National_Security/Reunification_Policies) tahun 2001

Dari paparan di atas, jelas Korea Selatan meyakini bahwa reunifikasi tanpa kemerdekaan, perdamaian dan demokrasi akan kehilangan arti sebagai reunifikasi nasional. Karena, partisipasi dan persatuan seluruh anggota masyarakat suatu bangsa menunjukkan demokrasi dimana pandangan ini jelas bersumber dari pemikiran demokrasi liberal yang selama ini dijalankan oleh pemerintah Korea Selatan yang menjiwai seluruh aktivitas negara dan rakyatnya.

Kebijakan *The Sunshine Policy* dipandang sebagai suatu kebijakan yang proaktif untuk mendorong perubahan sukarela secara bertahap di Korea Utara menuju pada perdamaian, keterbukaan, rekonsiliasi, pertukaran dan kerjasama. Maka dari itu, terdapat tiga prinsip dasar dalam kebijakan tersebut yaitu : *pertama*, prinsip tidak mentolerir ancaman militer dan provokasi bersenjata oleh Korea Utara. *Kedua*, menolak ide reunifikasi melalui paksaan dan *ketiga*, mendorong pertukaran dan kerjasama berdasarkan perjanjian *the Agreement on Reconciliation, Nonaggression and Exchanges and Cooperation* atau disebut *the "Basic Agreement"* pada tahun 1991 lalu.⁶⁰

Dari ketiga prinsip dasar *the Sunshine Policy* ini kemudian dijabarkan ke dalam empat prinsip operasional sebagai kebijakan paling ofensif dan proaktif yang pernah dijalankan secara resmi oleh pemerintah Korea Selatan. Karena, pada masa lalu kebijakan Seoul terhadap Pyongyang sangat reaktif dimana kebijakan itu didiktekan oleh Korea Utara sedangkan Seoul hanya tinggal menerima dan menjalankan apa yang disebutnya "konsensus bersama", sehingga terlihat kebijakan Seoul itu tidak konsisten dan tidak

⁶⁰ Moon Chung-in, *op.cit.*

berkesinambungan seiring dengan perubahan sikap melalui taktik negosiasi yang dijalankan Korea Utara. Karena, perilaku negosiasi Korea Utara selama Perang Dingin dicirikan melalui pendekatan negoisasi model Komunis.

Maka dari itu, Korea Utara menggunakan strategi *brinkmanship*⁶¹ untuk memperoleh konsesi dalam bentuk keuntungan dari keikutsertaanya dalam negosiasi tanpa harus membayar konsesi tersebut. Disamping itu pula, pasca negosiasi Korea Utara menggunakan intimidasi dan ancaman untuk mencapai tujuan unilateralnya yang merupakan kelanjutan dari persaingan *zero-sum game* bagi legitimasi politiknya daripada perjanjian yang bersifat "*win-win agreements*".⁶² Salah satu contoh adalah *the Joint Communique* tahun 1972 antara Korea Utara dan Korea Selatan yang lebih bersifat taktik dari pada keseriusan Pyongyang untuk bernegosiasi. Dengan demikian, segala bentuk dialog, perjanjian dan kerjasama antara Korea Utara dan Korea Selatan selama Perang Dingin sedikit sekali memberikan manfaat terhadap Seoul dan lebih mengarah pada "*pseudo negotiation*".

Berdasarkan pengalaman sejarah itulah, maka pemerintah Kim Dae-Jung ingin merubah kebijakan pasif dan reaktif ini dengan mengambil inisiatif sendiri menuju pertukaran dan kerjasama walaupun mendapat respon negatif dari Korea Utara pada awalnya. Namun pemerintahan Kim Dae-Jung yakin kebijakan proaktif ini akan mencairkan kebekuan pemikiran para pemimpin Korea Utara untuk membuka diri dan bekerjasama bagi

⁶¹ *The Brinkmanship Strategy* (strategi *brinkmanship*) adalah suatu taktik yang dijalankan oleh suatu negara dalam proses negosiasi atau dialog dengan tujuan mendapatkan konsesi berupa materi dari keikutsertaannya dalam negosiasi itu. Cara-cara yang dijalankan di antaranya intimidasi dan ancaman, seperti terlihat melalui kebiasaan negosiasi Korea Utara selama ini dengan *partner of negotiation*-nya. Dikutip dalam *ibid*.

⁶² Chun Chaesung, *op.cit*.

bantuan 198.050 ton beras oleh Korea Selatan. Begitu pula pada bulan September 2000, untuk mendorong upaya produktivitas pertanian Korea Utara maka pemerintah Korea Selatan menyediakan bantuan 100.000 ton pupuk urea dari 200.000 ton yang telah diberikan bulan Mei dan Juni lalu.⁶⁴

Disamping itu, sektor swasta juga memberikan bantuan 3,54 milyar won selama bulan Juli 2000 yang merupakan bantuan swasta terbesar terhadap Korea Utara sejak pemerintah Korea Selatan mengizinkan pihak swasta memberikan bantuan langsung tanpa melalui jalur pemerintah. Adapun bantuan sektor swasta terhadap Korea Utara tercatat sejumlah 835 juta won perbulan (termasuk bantuan pupuk) tahun 1999 dan 1,82 milyar won pada pertengahan tahun 2000. Tidak hanya itu saja, Yayasan Kesejahteraan Korea (*The Korean Welfare Foundation*) juga memberikan bantuan kesehatan berupa obat-obatan dan alat-alat rumah sakit sekitar 831.000 dollar AS.⁶⁵

Dengan mengutamakan bidang ekonomi dari pada politik ini, Kim Dae-Jung sebenarnya berharap reunifikasi Korea akan terjadi secara bertahap dimana perbedaan ekonomi kedua Korea tidak begitu jauh sehingga akan memperkuat basis perekonomian Korea. Akan tetapi reunifikasi Korea yang begitu cepat dan tiba-tiba akan membebani pemerintah Korea Selatan sebanyak 1,2 trilyun dollar serta akan menyebabkan pengangguran sebanyak 30 persen di Korea Utara dan pengungsian 4,5 juta penduduk Korea Utara ke Seoul sehingga akan melumpuhkan ibu kota berpenduduk dua belas juta orang tersebut.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 51

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 52

⁶⁶ Kent E. Calder, *Asia's Deadly Triangle (Segitiga Maut Asia)*, Prenhallindo, Jakarta, 1996, hal. 39

Terakhir adalah prinsip adanya konsensus domestik dari rakyat Korea Selatan sendiri mengenai kebijakan yang diambil pemerintahan Kim Dae-Jung sehingga dapat dilaksanakan secara kontinu dan konsisten. Konsensus ini penting, mengingat masih ada kelompok masyarakat, partai oposisi seperti *Grand National Party* (Partai Nasional Raya) serta kelompok-kelompok lainnya yang pesimis terhadap kebijakan *the Sunshine Policy* yang juga perlu diakomodasi kepentingannya. Dalam suatu survey terhadap opini publik pada 25 Pebruari 1999, terdapat 93,8 persen masyarakat mendukung kebijakan pemerintah terhadap Korea Utara. Namun ketika survey dilakukan setelah terjadinya penyerbuan kapal selam Korea Utara bulan Juni, sebanyak 62,4 persen masyarakat tetap mendukung *the Sunshine Policy*, dimana hal ini kontras dengan 93,8 persen dukungan masyarakat pada awal pemerintahan Kim Dae-Jung dan sebelum insiden kapal selam Korea Utara terjadi.⁷¹

Begitupula perbedaan pandangan dari dua kelompok yang optimis dan pesimis terhadap aktivitas yang dilakukan Pyongyang sekarang ini.⁷² Kaum optimis yakin, Korea Utara saat ini sedang berada di tengah transformasi berjangkauan panjang dimana KTT Pyongyang lalu hanyalah merupakan langkah awal dalam proses yang akan memunculkan inisiatif lain. Mereka menjelaskan bahwa Korea Utara siap merundingkan program nuklir dan peluru kendalinya serta mengurangi ancaman militernya, jika Amerika Serikat menghentikan sanksi ekonominya kepada Korea Utara untuk mulai mengakomodasi Pyongyang.⁷³ Sebaliknya kaum pesimis menolak berbagi bentuk perdamaian dengan Korea Utara saat ini sebagai

⁷¹ "The Government of the People's Sunshine Policy toward North Korea and Plans for Implementation." Dalam <http://www.atimes.com/12April1999>

⁷² Choong Nam Kim, "Pyongyang's Dilemma of Reform and Opening," *Korea and World Affairs*, Vol. XXIV, No. 2, Summer 2000, hal. 249

⁷³ *Ibid.*, hal. 250

Jung terhadap Korea Utara (Lim Dong-won) Menteri Unifikasi Korea Selatan, sehingga mengancam hubungan kedua negara Korea.⁷⁶ Padahal lebih dari 70 persen opini dalam *polling* mendukung *the Sunshine Policy* dan lebih dari 90 persen responden menyambut kedatangan Kim Jong-Il untuk berkunjung kembali ke Seoul.⁷⁷ Memang, *polling* itu tidak mencerminkan realitas nyata dari kebijakan Kim Dae-Jung yang sedikit “ditinggalkan” pendukungnya, namun yang jelas masa depan *the Sunshine Policy* dan pemerintahan MDP bergantung pada kunjungan balasan Kim Jong-Il ke Seoul segera, sehingga akan menjawab keraguan terhadap “Sinar Matahari” serta akan memperkuat posisi MDP dalam pemilihan presiden akhir tahun 2002 ini.

Berdasarkan kebijakan “Sinar Matahari” itu pula, Korea Selatan kemudian mengusulkan suatu formula bagi reunifikasi yang disebut dengan Formula Unifikasi Masyarakat Nasional Korea (*the Korean National Community Unification Formula*) yang berupaya membentuk suatu “Republik Demokratik” yang bersatu menuju pada Persemakmuran Korea sebagai tahap awal berdasarkan prinsip independen, perdamaian dan demokrasi.⁷⁸ Karena, kepentingan keamanan Korea Selatan adalah membangun perdamaian, maka Seoul kemudian membagi kepentingan itu menjadi empat yaitu : (1) sistem perdamaian yang solid; (2) non-proliferasi senjata nuklir; (3) stabilitas regional; dan (4) reunifikasi damai di Semenanjung Korea.⁷⁹

⁷⁶ *Bali Post*, 5 September 2001

⁷⁷ *Newsweek*, 23 April 2001

⁷⁸ Seo-Hang Lee, “Seoul’s Unification Approach and Perspectives on Peace and Security,” dalam Amos A. Jordan (ed.), *Korean Unification Implications for Northeast Asia*, Centre for Strategic and International Studies, Washington, D.C., 1993, hal. 24

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 20

Kepentingan ketiga adalah stabilitas regional dimana kehadiran negara-negara *major powers* seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina dan Rusia sangat penting untuk menjamin stabilitas di Semenanjung Korea serta mencegah munculnya ambisi militer Jepang yang juga sangat berbahaya bagi keamanan Asia Timur Laut. Maka dari itu, Korea Selatan tetap menghendaki kehadiran sekitar 37.000 tentara Amerika Serikat di Seoul selama situasi keamanan serta interaksi antar negara masih mempertahankan pertentangan dan persaingan sebagai warisan dari sejarah Perang Dingin lalu.⁸²

Terakhir adalah reunifikasi damai yang merupakan kepentingan utama Korea Selatan, karena keamanan Korea tidak dapat tercipta tanpa melalui perdamaian yang artinya reunifikasi itu dilakukan melalui perjanjian dan dialog kedua belah pihak. Sehingga proses reunifikasi Korea ini tidak akan menghasilkan instabilitas keamanan di Semenanjung Korea juga kawasan Asia Timur Laut secara keseluruhan.⁸³

Adapun Formula Unifikasi Masyarakat Nasional Korea (*the Korean National Community Unification Formula*) pertama kali diumumkan oleh Presiden Roh Tae Woo pada sidang Majelis Nasional Reguler tanggal 11 September 1989 yang menjelaskan diantaranya tiga prinsip reunifikasi dan organisasi serta peran sistem unifikasi yang bersifat sementara. Tiga prinsip itu adalah *independence, peace and democracy*.⁸⁴ Sementara itu Korea Utara juga menggunakan tiga prinsip bagi reunifikasi yang disebutnya dengan *independence, peace and grand national unity*.⁸⁵

⁸² *Ibid.*, hal. 22

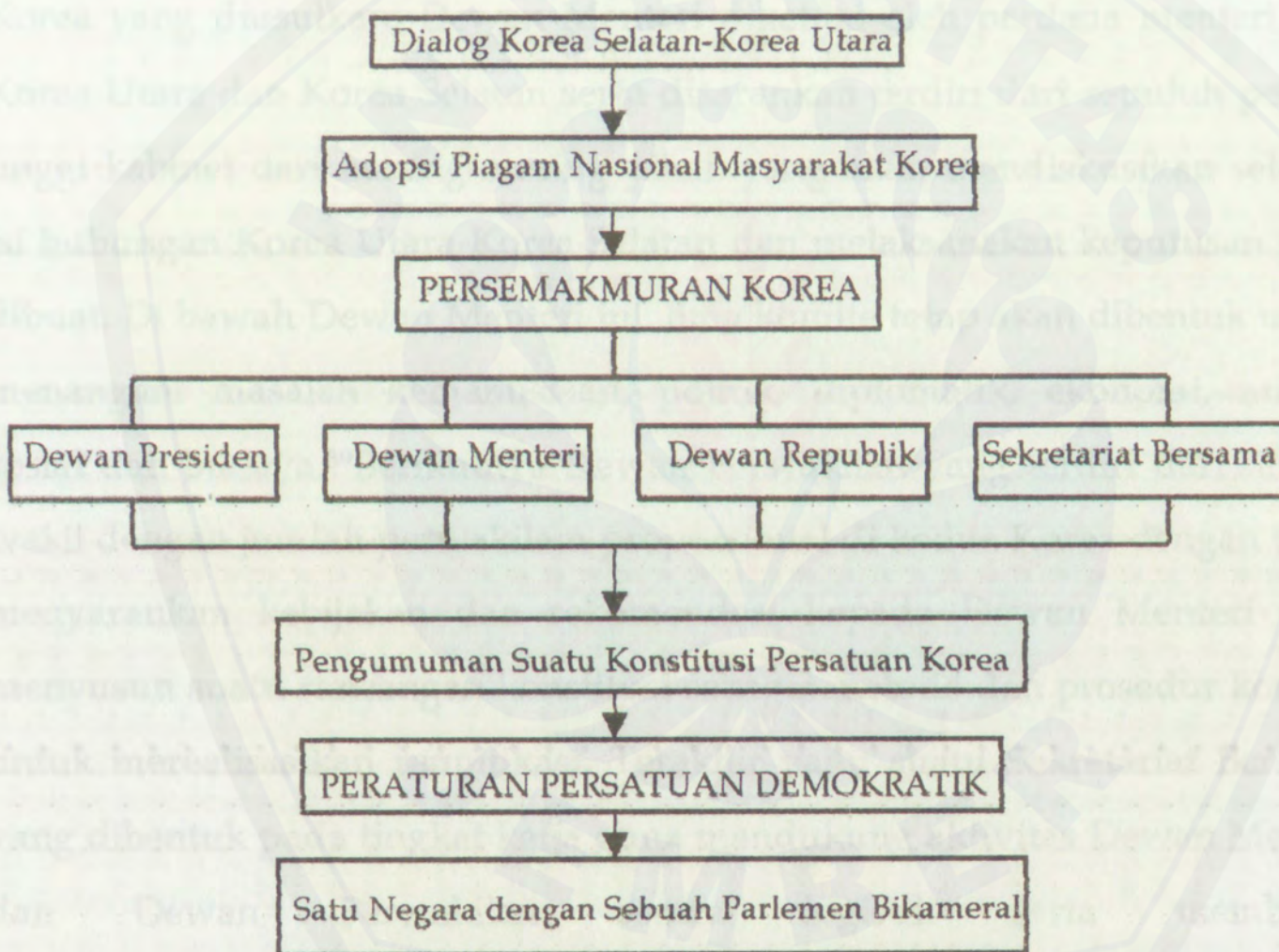
⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ A Comparison of Unification of South and North Korea, *op.cit.*, hal. 122

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 123

Nasional (*National Community Charter*) dimana kedua pihak menyadari perbedaan sistem politik. Tahap kedua yaitu membentuk suatu persemakmuran Korea yang menyatakan perasaan bersama kehidupan nasional untuk mendorong homogenitas nasional. Terakhir adalah ditetapkannya suatu Republik Demokratik Bersatu berdasarkan pemilihan umum. Adapun tiga tahap proses reunifikasi digambarkan dalam (bagan-3) di bawah ini.

Bagan-3
Gambaran Formula Unifikasi Masyarakat Nasional Korea



Sumber : Seo-Hang Lee, "Seoul's Unification Approach and Perspectives on Peace and Security," dalam Amos A. Jordan (ed.), *Korean Unification Implications for Northeast Asia*, Centre for Strategic and International Studies, Washington, D.C., 1993, hal. 25

3.2.2. Kebijakan Kim Jong-Il dengan *Juche Ideology*

Setelah kebijakan *the Sunshine Policy* pemerintahan Kim Dae-Jung di Korea Selatan kita jelaskan, selanjutnya perlu dieksplanasi lebih jauh reaksi Korea Utara dari kebijakan Seoul tersebut serta bagaimanakah Pyongyang menetapkan kebijakannya yang tentunya dilandasi oleh ideologi *Juche* dalam proses reunifikasi Korea. Sehingga dapat dibandingkan kedua kebijakan itu untuk selanjutnya dianalisa sebagai fokus bahasan dari persoalan proliferasi nuklir Korea Utara yang berimplikasi pada proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea.

Reaksi Korea Utara dalam konteks ini Kim Jong-Il atas kebijakan "Sinar Matahari" Kim Dae-Jung pada awalnya sangat ditentang dan dipandang tidak realistis, karena selama ini Pyongyang memandang setiap kebijakan reunifikasi Seoul bertujuan menghalangi keinginan Korea Utara untuk menyatukan kembali Semenanjung Korea kedalam pemerintahan sentralistis-militeristis yang tentunya sesuai dengan filosofi *Juche* (paham swadaya) negara Komunis itu.⁹¹ *The Sunshine Policy* dianggap Kim Jong-Il sebagai taktik dan strategi Kim Dae-Jung untuk mencegah hegemoni militer Korea Utara di Semenanjung Korea. Oleh karena itu, Kim Jong-Il lalu menyikapi situasi ini melalui kebijakan yang bertentangan dengan "Sinar Matahari" dan dipandang lebih realistis yaitu ideologi *Juche*.⁹²

Filosofi *Juche* ini diilhami oleh pemikiran Karl Marx tentang Materialisme Dialektika yaitu teori mengenai perkembangan masyarakat melalui revolusi dimana menurut hukum ilmiah dunia Kapitalis akan

⁹¹ The *Juche Philosophy* is a Revolutionary Philosophy, Theoretical Magazine of the Central Committee of the Worker's Party of Korea, Pyongyang, 26 Juli 1996

⁹² *Ibid.*

mengalami revolusi (revolusi proletar) yang akan menghancurkan sendi-sendi masyarakatnya dan akan meratakan jalan untuk timbulnya masyarakat Komunis.⁹³ Maka dari itu, orientasi ideologi *Juche* ini didasarkan pada perjuangan kelas untuk mencapai independensi dari suatu negara. Menurut Kim Jong-Il, suatu bangsa harus memiliki *independence*-nya sendiri yang bergantung pada karakter nasional, tradisi, semangat dan persatuan untuk menjalankan kehidupannya. Lebih lanjut ia menerangkan bahwa :

*"A nation with a strong sense of national dignity and revolutionary pride is unconquerable, but a nation without these attributes is powerless. The people of small countries who long suffered oppression by foreign forces must have a strong sense of national dignity and revolutionary pride."*⁹⁴

Begitu pula pandangan Kim Jong-Il terhadap bangsa Korea yang berdasarkan persamaan darah dan bahasa, katanya :

*"Our people is a homogeneous nation who have inherited one bloodline, language and culture in one territory from olden times, and it is a wise nation with 5.000 years of history, a brilliant culture and splendid traditions."*⁹⁵

Kim Jong-Il yang lahir tanggal 16 Februari 1942 dari keluarga yang sangat patriotik dan revolusioner adalah anggota Presidium Biro Politik dan Sekretaris Komite Sentral Partai Pekerja Korea yang terpilih pada kongres KWP (*Korean Worker's Party*) keenam bulan Oktober 1980 dan pada April 1993 terpilih menjadi Ketua Komisi Pertahanan Nasional Republik Demokratik Rakyat Korea.⁹⁶ Ayahnya, Kim Il-Sung adalah mantan presiden pertama

⁹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 80

⁹⁴ Dikutip dalam Kimilsungism, "Full Embodiment of National Independence," *Foreign Languages Publishing House*, Pyongyang, 1997

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

suatu rejim pro-Komunis di Selatan. Dengan kata lain, kutipan kata tersebut mengandung arti mengkomuniskan seluruh Semenanjung Korea berdasarkan ideologi *Juche* dilakukan setelah "membebaskan" Korea Selatan dari pengaruh imperialisme Amerika Serikat yang dilakukan melalui revolusi, sehingga perjuangan tersebut merupakan bagian dari "revolusi Korea." Adapun mekanisme perjuangan itu pada awalnya adalah melawan imperialisme Amerika Serikat, kemudian disusul dengan perjuangan kelas antara Sosialisme dan Kapitalisme serta revolusi dengan kontra-revolusi. Setelah semua pergumulan itu terjadi, pada akhirnya reunifikasi damai itu terlaksana jika kepentingan para pekerja, petani dan masyarakat buruh lainnya diadopsi dalam masyarakat Komunis yang terbentuk itu. Inilah yang selanjutnya disebut "*Theories on Revolution in South Korea and Unification of the Fatherland on Basis of Juche Thought*," dipublikasikan di Korea Utara tahun 1975, seperti dikutip di bawah ini :

*"Struggles to achieve unification of the fatherland constitute pan-national struggles against the American imperialist and, at the same time, fierce class struggles between socialism and capitalism and between revolution and counter-revolution. Peaceful unification, too, can be attained only on a principle that suits the interest of workers, farmers and other broad-ranging working people."*¹⁰⁰

Di samping itu, Korea Utara mengkombinasikan baik cara damai (*peaceful method*) maupun tidak damai (*non-peaceful method*) dalam proses reunifikasi Korea.¹⁰¹ Cara damai dilakukan melalui integrasi kedua rejim pasca revolusi rakyat demokratik (*a people's democratic revolution*) di Korea Selatan atau melalui kolaborasi kedua pihak setelah pemerintah Korea

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 44-45

¹⁰¹ *Ibid.*

Selatan diganti dengan suatu rejim pro-Komunis.¹⁰² Hal ini merupakan ide dari "Republik Konfederasi Demokrasi Koryo" sebagai metode reunifikasi. Lebih jauh kebijakan reunifikasi Korea Utara ini disebut dengan "revolusi di Korea Selatan terlebih dahulu, selanjutnya kolaborasi Utara-Selatan atau (*revolution in South Korea first and unification through South-North collaboration later*)."¹⁰³

Bagi Korea Selatan, jelas kondisi yang ada di Semenanjung Korea sekarang ini dimana ketidakpastian keamanan dan ancaman militer tetap adamustahil reunifikasi Korea dapat dilakukan secara tiba-tiba yang pada gilirannya nanti akan menanggung biaya sosial yang besar pula dari perbedaan sistem ekonomi-politik di kedua Korea. Maka dari itu, reunifikasi hanya bisa dilakukan secara bertahap melalui dialog Korea Utara-Korea Selatan serta kerjasama keduanya untuk mengurangi ketegangan yang mengarah pada terciptanya suasana damai dengan tingkat ancaman militer telah direduksi kedalam kerjasama tersebut. Sehingga landasan bagi penyatuan kembali Korea akan mudah dilakukan.

Akan tetapi, selain metode damai, Korea Utara juga menggunakan "*non-peaceful method*" yaitu melalui intervensi militer serta penggunaan senjata penghancur massa seperti nuklir, senjata biologi, kimia dan peluru kendali balistik sebagai instrumen melaksanakan revolusi kekerasan di Korea Selatan yang pada akhirnya akan membentuk pemerintahan Komunis di sana.¹⁰⁴ Justru bagi pihak Seoul, intervensi militer inilah yang dapat mengakibatkan instabilitas keamanan di Semenanjung Korea bahkan di

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 43

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 47

kawasan Asia Timur Laut sehingga mengakibatkan kegagalan reunifikasi itu sendiri.

Adapun secara garis besar perbedaan proposal reunifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan serta Formula Tiga Tahap Reunifikasi yang harus dilalui kedua Korea sebagai berikut :¹⁰⁵ pertama, nama formula dan unifikasi itu sendiri. Seperti dijelaskan sebelumnya, pemerintah Korea Selatan menyebut formula ini dengan "Tiga Tahap Unifikasi" untuk membentuk Masyarakat Nasional Korea, sedangkan pemerintah Korea Utara secara tradisional menyebut rencana untuk membangun Republik Konfederasi Demokratik Koryo (Korea) yaitu konsep dasar sebuah pemerintahan sentral dengan otoritas diplomatik dan militer, serta pemerintah regional yang secara administratif mengendalikan dua wilayah konfederasi.¹⁰⁶ Bagi Presiden Kim Dae-Jung, formula unifikasi itu sesuai dengan proposal pemerintah Korea Selatan yaitu "Tiga Tahap Unifikasi".

Kedua, yaitu tahap unifikasi yang akan dilalui oleh kedua Korea dimana menurut Korea Selatan tiga tahap itu meliputi rekonsiliasi, kerjasama dan konfederasi Korea Utara dan Korea Selatan penyatuan Korea yang tentunya lebih sesuai dengan kondisi keamanan di Semenanjung Korea sekarang ini tanpa harus menciptakan instabilitas yang berbahaya bagi proses reunifikasi sendiri. Namun pemerintah Korea Utara sesuai dengan ideologi *Juche* sebagai landasan kebijakan reunifikasi Korea hanya menyebutkan satu tahap yang harus dilalui kedua Korea yaitu penyatuan negara kedalam bentuk Federasi. Kim Dae-Jung mengusulkan tiga tahap unifikasi dengan menggabungkan proposal Korea Selatan-Korea Utara

¹⁰⁵ Young Ho Park, "The 2000 South-North Summit," *Korea and World Affairs*, Vol. XXIV, No. 2, Summer 2000, hal. 315

¹⁰⁶ *Kompas*, 15 Juni 2000

menjadi tahap Konfederasi Utara-Selatan dan terakhir penyelesaian unifikasi secara menyeluruh, seperti ditunjukkan dalam (tabel-11) di bawah ini :

Tabel-11
Perbandingan Proposal Unifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara serta "Tiga Tahap Formula Unifikasi"

Kategori	Pemerintah Korea Selatan	Pemerintah Korea Utara	Presiden Kim Dae-Jung
Nama Formula	"Tiga Tahap Unifikasi" Rencana Membentuk Masyarakat Nasional Korea	Rencana Membentuk Republik Konfederasi Demokratik Koryo (Korea)	Formula "Tiga Tahap Unifikasi.
Tahapan	Tiga Tahap : Rekonsiliasi, Kerjasama Konfederasi Utara-Selatan Penyatuan Korea	Satu Tahap : Penyatuan Negara ke-dalam bentuk Federasi	Tiga Tahap : Konfederasi Utara-Selatan, Federasi dan Penyelesaian Unifikasi
3 Prinsip Filosofi Dasar	Self-reliance, Perdamaian dan Demokrasi Liberal (Mengutamakan Manusia	<i>Juche (self-reliance)</i> Mengutamakan Kelas, Perdamaian dan Penyatuan Nasional Raya	<i>Self-reliance</i> , Perdamaian dan Demokrasi
Tahap Pertama	Tahap Rekonsiliasi dan Kerjasama (1 bangsa, 2 pemerintahan independen). Menyadari dua entitas Politik. Perluasan pertukaran dan kerjasama. Pemahaman rasa saling Mempercayai politik dan menciptakan struktur perdamaian.	Penyatuan negara dalam bentuk Federasi (1 bangsa 1 negara, 2 sistem, 2 pemerintahan regional yg otonom). Kongres Federal Nasional Tertinggi dan Komite Federal yang mengatur pertahanan nasional, hubungan luar negeri dan Isu unifikasi.	Tahap Konfederasi antar Korea (1 konfederasi, 1 bangsa, 2 negara, 2 sistem, 2 pemerintahan independen). Implementasi panduan kebijakan, koeksistensi perdamaian, pertukaran dan unifikasi. Penetapan KTT antar Korea dan Dewan Konfederasi antar Korea yg menangani pemisahan nasional. Proses Unifikasi. Pertama, membangun struktur perdamaian melalui perjan.

(independensi), perdamaian dan demokrasi liberal yang mengutamakan manusia bukan *class centered*.

Kepentingan politik Korea Selatan dalam reunifikasi adalah menangkal keinginan Korea Utara untuk mengkomunikasikan seluruh Semenanjung Korea dengan ideologi *Juche* melalui revolusi berdasarkan kekuatan militer yang akan memberikan kejayaan bagi negara Sosialis-Komunis itu di tingkat regional maupun internasional. Dengan cara bertahap melalui pemberian bantuan ekonomi dengan syarat Korea Utara bisa mereformasi sistem ekonomi dan politiknya untuk dapat menerima pengaruh ekonomi pasar dan demokrasi liberal yang diharapkan Korea Selatan sekarang ini.

Akan tetapi, Korea Utara justru lebih mengutamakan pembentukan pemerintahan federasi, karena dengan bentuk pemerintahan tersebut, Pyongyang dapat dengan mudah mengontrol dan menguasai entitas politik dan militer yang menjadi instrumen kekuasaannya agar tetap berada di bawah pengaruh serta indoktrinasi ideologi *Juche* terhadap pemerintahan regional yang ada dalam federasi tersebut. Sehingga akan menjadi bagian dari pemerintahan pusat yang sentralistis-militeristis untuk mengatur hubungan politik-diplomatik dari pemerintahan regional.

Begitu pula, tiga tahap yang harus dilalui kedua Korea dalam proses reunifikasi lebih mengarah pada taktik dan strategi politik masing-masing pihak, dimana pemerintah Korea Selatan lebih realistis memandang situasi keamanan di Semenanjung Korea sekarang ini yang mengarah pada suasana "tidak perang, tidak damai." Karena, dengan kondisi *status quo* keamanan sekarang akan lebih menguntungkan Korea Utara untuk segera merealisasikan satu tahap reunifikasi yaitu penyatuan negara kedalam

3.2.3. Arti dan Peran KTT Pyongyang dalam Mendorong Kerjasama Kedua Korea

Analisa akhir mengenai perundingan *the June Summit Talks* antara Kim Dae-Jung dan Kim Jong-Il di Pyongyang (Korea Utara) tahun 2000 lalu masih banyak memunculkan pertanyaan. Karena, pertemuan kedua pemimpin Korea pada awalnya memang membawa harapan besar akan segera berakhirnya permusuhan Korea Utara dan Korea Selatan selama lima puluh tahun untuk melakukan hubungan kerjasama di segala bidang. Akan tetapi harapan itu makin lama makin menyusut seiring dengan kenyataan bahwa sampai saat ini Kim Jong-Il belum juga melakukan kunjungan balasan ke Seoul untuk bernegosiasi dengan Kim Dae-Jung mengenai kelanjutan hubungan kedua Korea pasca KTT Pyongyang. Perubahan sikap Kim Jong-Il seperti yang ditunjukkan dengan kembali menutup diri negaranya dari perundingan dan upaya kerjasama dengan negara lain serta bertahan pada prinsip selama Amerika Serikat dan Korea Selatan belum merealisasikan pembangunan dua reaktor air ringan (*light water reactor-LWR*) sebagai pengganti reaktor grafit sekarang ini, maka pihaknya tidak akan melakukan perubahan apapun.¹⁰⁸

Perubahan sikap Kim Jong-Il tersebut tentu membawa pengaruh negatif (kontras dengan sikapnya pada saat KTT Pyongyang) baik terhadap dirinya maupun reunifikasi itu sendiri, sehingga memunculkan pertanyaan jang-jangan KTT Pyongyang lalu tidak lebih sebagai taktik Kim Jong-Il menjadikan momentum tersebut dalam upayanya mencari dukungan

¹⁰⁸ Kompas, 7 Juli 2001

mengkomunikasikan seluruh Semenanjung Korea. Karena, tidak ada pihak yang berani menjamin bahwa bantuan ekonomi itu benar-benar diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan yang selama ini sangat timpang akibat kebijakan "*military first policy*" Kim Jong-Il. Kenyataan menunjukkan sampai saat ini belum ada badan atau lembaga pengawas pelaksanaan bantuan ekonomi tersebut sampai pada kebutuhan pangan sebagian besar rakyatnya yang mengalami kelaparan. Dengan demikian, bisa saja terjadi penyalahgunaan bantuan rejim Kim Jong-Il dengan memanfaatkan kekuatan militer untuk menekan rakyatnya, sehingga pelan tapi pasti rejim Pyongyang akan menampilkan wajah "bermuka dua" dalam setiap interaksi dengan negara lain.

Akan tetapi, lebih dari pada dua kemungkinan di atas, pelaksanaan *the June Summit Talks* yang menghasilkan *North-South Joint Declaration* tersebut tetap dianggap penting oleh rakyat Korea, setidaknya karena empat alasan berikut. *Pertama*, Deklarasi Bersama Korea Utara-Korea Selatan adalah perjanjian pertama yang ditandatangani oleh kedua pemimpin Korea selama lima puluh tahun sejak pemisahan kedua negara.¹¹⁰ Karena, bagi Korea Utara khususnya dengan sistem politik yang ketat dan monolitik, maka deklarasi bersama itu bisa menjadi panduan baru bagi kebijaksanaannya terhadap Korea Selata terutama karena ditandatangani oleh Pemimpin Besar mereka. Dengan demikian, taktik negoisasi yang selama ini dilakukan Korea Utara melalui berbagai perjanjian sebelumnya bisa jadi menhgalami perubahan seiring dengan tuntutan akan keseriusan negara itu untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Korea Selatan pasca Perang Dingin.

¹¹⁰ Young Ho Park, *op.cit.*, hal. 198

Kedua, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pyongyang itu sendiri dan Deklarasi Bersama merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk menempatkan hubungan antar Korea pada jalurnya yang tepat serta mempertahankan dialog terhadap isu-isu unifikasi nasional.¹¹¹ Karena, kedua Kim sepakat menguatkan kembali prinsip-prinsip yang tertuang dalam perjanjian seperti *the South-North Joint Communique of 1972* dan *the South-North Basic Agreement of 1992* untuk diimplementasikan secara bertahap melalui tugas-tugas yang lebih mudah dahulu. Kedua Kim juga menyadari tidak mungkin mencapai tujuan jangka menengah KTT selama perbedaan masih ada, untuk itu mereka sepakat perbedaan formula reunifikasi itu sebagai landasan bersama dalam mewujudkan reunifikasi Korea dimana kedua negara memiliki potensi yang sama untuk melakukan hubungan. Untuk itulah, langkah pertama sebagai dasar unifikasi dilakukan melalui koeksistensi perdamaian, rekonsiliasi dan kerjasama.

Ketiga, melalui perjanjian *the June Summit Talks* ini bertujuan untuk mencegah peperangan dan membangun perdamaian di Semenanjung Korea.¹¹² Melalui semangat mencegah peperangan baru, kedua Korea akan berusaha untuk mengimplementasikan cara-cara seperti pembukaan jalur militer secara langsung dan mencegah upaya provokasi, propaganda¹¹³ yang dapat menimbulkan ketegangan. Dengan demikian, diharapkan kedua Korea

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 199

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Definisi propaganda seperti yang dikemukakan oleh Terrence Qualter adalah : "... Usaha sengaja oleh individu atau kelompok lain dengan penggunaan alat komunikasi dengan maksud bahwa dalam suatu situasi tertentu reaksi orang atau kelompok yang telah dipengaruhi akan berupa reaksi yang diinginkan propagandis Dalam ungkapan "usaha sengaja" terletak kunci gagasan propaganda. Ini satu hal yang membedakan propaganda dari yang bukan propaganda Oleh karena itu, tampaknya jelas bahwa setiap tindakan promosi dapat menjadi propaganda hanya jika dan bila ia menjadi bagian kampanye sengaja untuk mendorong tindakan melalui pengendalian sikap." Terrence H. Qualter, *Propaganda and Psychological Warfare*, New York, 1962, dikutip dalam K.J. Holsti, *op.cit.*, hal. 212.

dapat mencapai tujuan dengan mengakhiri sisa-sisa Perang Dingin di Semenanjung Korea seperti yang ditunjukkan oleh kedua Kim guna membangun perdamaian berdasarkan kepercayaan bersama mengurangi ancaman militer satu sama lain.

Keempat, yaitu KTT antar Korea pertama tersebut juga akan memberikan kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Timur Laut secara keseluruhan.¹¹⁴ Karena, jika Kim Jong-Il mengambil langkah-langkah positif terhadap isu nuklir dan senjata penghancur massa lainnya pada tahap yang paling awal, maka hubungan Pyongyang dengan Washington juga Tokyo dapat diperbaiki. Dengan demikian, implementasi *the Joint Declaration* ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hubungan bilateral dengan beberapa negara untuk merubah ketidakpastian keamanan di Asia Timur Laut serta mendorong Korea Utara menjadi anggota masyarakat internasional.

Untuk melaksanakan hasil-hasil KTT yang sekiranya masih memerlukan dialog lebih lanjut, maka ditetapkanlah beberapa agenda pasca KTT diantaranya pertemuan tingkat menteri Korea Utara-Korea Selatan, pertukaran ekonomi antar Korea, reuni keluarga yang terpisah dan yang paling krusial adalah kontak militer kedua Korea.¹¹⁵

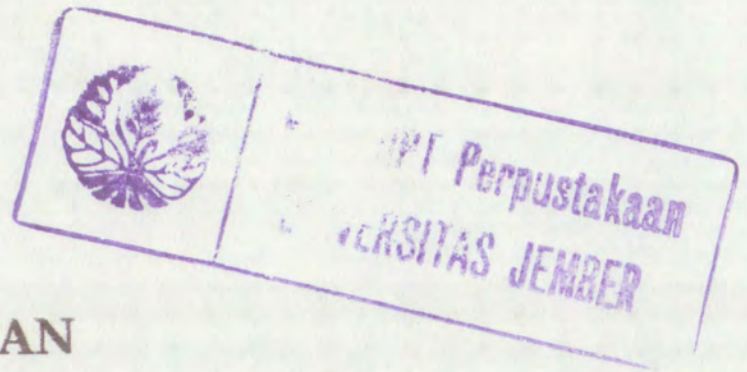
Agenda pertama yaitu Perundingan Tingkat Menteri Korea Utara-Korea Selatan (*the South-North Ministerial Level Talks-SNMLT*) yang ditetapkan untuk mengimplementasikan kesepakatan KTT seperti pembangunan jalan bebas hambatan antara Munsan (Korsel) dan Kaesung (Korut) serta restorasi rel kereta api Kyongui yang hancur selama Perang

¹¹⁴ Young Ho Park, *op.cit.*, hal. 201

¹¹⁵ Chi-Won Kang, "Historic Inter-Korean Summit and Its First Anniversary," *Korea and World Affairs*, Vol. XXV, No. 2, Summer 2001, hal. 174

Pyongyang itu, sulit bagi pihak mana pun untuk melakukan investasi apalagi bekerjasama dengan negara Komunis yang penuh ketidakpastian dan ketidakamanan terhadap negara lainnya. Keinginan untuk merekonstruksi ekonomi serta perdagangan Korea Utara dengan Korea Selatan membuat pihak Pyongyang berharap bisa membuka kembali jalan raya serta jalur kereta yang menghubungkan kedua Korea kepada pusat-pusat industri juga perdagangan antar Korea. Karena, hubungan ekonomi luar negeri Korea Utara telah mengalami perubahan terutama dengan *partner* dagang tradisionalnya seperti Cina dan Rusia serta perdagangan antar Korea secara signifikan dapat meningkatkan ekonomi Korea Utara sendiri.

Demikianlah pembahasan dalam Bab III yang memfokuskan pada upaya proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pyongyang tahun 2000 beserta segala instrumen pendukung upaya tersebut seperti kebijakan *the Sunshine Policy* atau "Sinar Matahari" oleh Presiden Kim Dae-Jung di Korea Selatan untuk mendorong pemerintahannya lebih proaktif bagi kelangsungan reunifikasi, serta pelaksanaan ideologi *Juche* (paham swadaya) oleh Kim Jong-Il di Korea Utara yang selama ini diyakini kebenaran ajarannya dan dipertahankan oleh rejim Pyongyang sampai saat ini. Sehingga kebijakan kedua pemerintah baik Korea Selatan maupun Korea Utara selalu menjadi analisa bagi pembahasan dalam Bab III ini. Adapun implikasi kebijakan proliferasi nuklir Korea Utara terhadap proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea yang merupakan inti dari permasalahan penulisan ilmiah ini dijelaskan dalam Bab IV selanjutnya.



BAB V KESIMPULAN

Berakhirnya Perang Dingin tidak secara langsung pula mengakhiri permusuhan Korea Utara dan Korea Selatan yang selama ini dipicu oleh perbedaan sistem politik, ideologi dan ekonomi kedua Korea serta sisa-sisa Perang Korea tahun 1950-1953 yang masih bertahan di Semenanjung Korea. Sisa-sisa Perang Korea seperti terpisahnya anggota keluarga generasi pertama dan kedua pasca perang tersebut, juga upaya-upaya provokasi dan agitasi terutama militer Korea Utara di sepanjang zona demiliterisasi (*Demilitarized Zone-DMZ*) serta taktik perang kilat (*blitzkrieg*) yang dianut militer Korea Utara untuk menyerang Korea Selatan apabila *deterrence* nuklir pecah, telah menjadi kekhawatiran mengenai kelanjutan upaya reunifikasi damai di Semenanjung Korea.

Tujuan utama strategi nuklir Korea Utara secara militer adalah menyatukan Semenanjung Korea kedalam pemerintahan Komunis melalui kekuatan senjata secara revolusioner yang akan memberikan kejayaan negara Sosialis-Komunis itu baik di tingkat regional maupun global. Terlebih lagi, Kim Jong-Il telah menekankan bahwa senjata nuklirnya adalah sebagai pengimbang strategis (*strategic equalizer*) atas kemampuan konvensional Amerika Serikat dan Korea Selatan yang masih dianggapnya penghalang dalam mewujudkan cita-cita reunifikasi Korea Utara.

Proliferasi nuklir secara horisontal yang dilakukan Korea Utara merupakan variabel independen atau variabel penyebab dari mandeknya proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea. Karena, semakin tinggi tingkat proliferasi nuklir Korea Utara akan meningkatkan persepsi ancaman

militer terhadap Korea Selatan yang dapat mengurangi keyakinan Seoul atas keseriusan Pyongyang dalam melaksanakan reunifikasi damai. Sehingga kebijakan mengutamakan militer daripada bidang lainnya (*the military-first policy*) oleh Korea Utara tersebut membuat khawatir Korea Selatan apabila reunifikasi damai benar-benar dilakukan secara paksa.

Persepsi ancaman militer yang dimiliki Korea Selatan berkaitan dengan konsep *the security dilemma*. Dalam konsep *the security dilemma* peningkatan kapabilitas militer suatu negara akan ditanggapi sebagai ancaman dan tindakan provokatif untuk mengurangi ancaman negara lainnya. Sehingga kecurigaan pun semakin tinggi, apabila salah satu pihak tetap mempertahankan kebijakan mengutamakan militer. Dalam konteks ini, Korea Selatan tetap merasa tidak aman dengan ancaman nuklir Korea Utara untuk mengkomunikasikan Semenanjung Korea sehingga memicu peningkatan kapabilitas militer Seoul secara terbatas disamping adanya jaminan keamanan di bawah payung nuklir Amerika Serikat. Sehingga pada akhirnya *the security dilemma* itu mengakibatkan mandeknya proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea.

Kebijakan mengutamakan militer daripada bidang lainnya (*the military-first policy*) oleh Korea Utara terbukti meningkatkan persepsi ancaman militer terhadap Korea Selatan yang memunculkan kekhawatiran Seoul atas keseriusan Pyongyang dalam proses reunifikasi damai. Kekhawatiran Seoul itu apabila reunifikasi Korea terjadi melalui paksaan secara militer sehingga menciptakan instabilitas keamanan yang mengakibatkan mandeknya proses reunifikasi Korea. Dalam jangka panjang, kebijakan proliferasi nuklir Korea Utara juga menghambat semua upaya yang telah ditempuh kedua Korea untuk mengakhiri permusuhan dan

menciptakan perdamaian sebagai syarat reunifikasi Korea seperti yang diamanatkan dalam *the Joint Declaration* pada saat KTT Pyongyang tahun 2000 lalu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku dan Literatur

- Anonim, *Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Pembuatan, Penimbunan dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Pemusnahannya (Terjemahan I)*, Departemen Luar Negeri, Direktorat Organisasi Internasional, Jakarta, 1995/1996
- , *A Comparison of Unification Policies of South and North Korea*, National Unification Board, Seoul, 1990
- Ahmad, Muhammad, *Untuk Para Remaja*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997
- A.Riff, Michael (ed.), *Kamus Politik Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995
- Anggoro, Kusnanto, "Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Keamanan Pasca Perang Dingin," dalam Juwono Sudarsono (et.al), *Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- , "Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara : Relevansi, Peluang dan Kendala Implementasinya," dalam Bantarto Bandoro (ed.), *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1996
- Byung Joon-Ahn, "Semenanjung Korea dan Keamanan Asia Timur," dalam Robert A. Scalapino, Seizaburo Sato dan Jusuf Wanandi (penyunting), *Masalah Keamanan Asia*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1990
- Bajpai, Kanti, "Proliferation Challenges Today and the Consequences International Study," dalam Ramesh Thakur (ed.), *Keeping Proliferation at Bay*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1998
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996
- Budiman, Arief, *Teori Negara (Negara, Kekuasaan dan Ideologi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Bennet, Bruce, "The Emerging Ballistic Missile Threat : Global and Regional Ramifications," dalam Natalie W. Crawford and Chung-In Moon (eds.), *Emerging Threat, Force Structures, and Role of Air Power in Korea*, RAND, Washington, D.C., 2000
- Chong Bong-uk, "North Korea Mass Producing Chemical Weapons," dalam Chong Bong-uk (ed.), *North Korea : Uneasy, Shaky Kim Jong-Il Regime*, Naewoe Press, Seoul, 1997

- Jong-Chun Baek, *A Comparative Study of South and North Korea*, national Unification Board, Seoul, 1988
- Mas'ood, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994
- Mohan C. Raja, "Global Nuclearisation," dalam K. Subrahmanyam (ed.), *Nuclear Proliferation and International Security*, Institute for Defense Studies and Analysis (IDSA), Washington, D.C., 1985
- Rahardjo, Iman Toto K. dan Herdianto W.K. (editor), *Bung Karno dan Tata Dunia Baru (Kenangan 100 tahun Bung Karno)*, PT. Grasindo, Jakarta, 2001
- Ro-Li Sam, "The Reunification of Korea and Peace and Security in Asia," dalam Amos A. Jordan (ed.), *Korean Unification Implication for Northeast Asia*, Centre for Strategic and International Studies, Washington, D.C., 1993
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik*, CV Tarsito, Bandung, 1994
- Subrahmanyam, K., "The Real Proliferation," dalam K. Subrahmanyam (ed.), *Nuclear Proliferation and International Security*, Institute for Defense Studies and Analysis (IDSA), Washington, D.C., 1985
- Sukma, Rizal, *Pemikiran Strategis Cina dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1998
- Seo-Hang Lee, "Seoul's Unification Approach and Perspectives on Peace and Security," dalam Amos A. Jordan (ed.), *Korean Unification Implication for Northeast Asia*, Centre for Strategic and International Studies, Washington, D.C., 1993
- Sung-Han Kim, *Inter Korean Relations & Prospects of Korean Unification*, Seoul Forum, Seoul, 1992
- The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gadjah Mada University Pres, Yogyakarta, 1979
- Thakur, Ramesh, "Introduction," dalam Ramesh Thakur (ed.), *Keeping Proliferation at Bay*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1998
- Tri Hartono, Agus, *Proliferasi Nuklir dan Implikasinya di Asia Selatan Studi Kasus : India dan Pakistan*, Depdikbud, Lembaga Penelitian Universitas Jember, Jember 1997
- Utgoff, Victor A., "The Biotechnology Revolution and Its Potential Military Implications," dalam Brad Roberts (ed.), *Biological Weapons : Weapons of the Future ?*, The Centre for Strategic and International Studies, Washington, D.C., 1993

Wheeler, Nicholas J., and Simon J. Davis, "Security, Nuclear Proliferation and the End of the Cold War," dalam M. Jane Davis (ed.), *Security Issue in the Post Cold War World*, Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 1996

Yusuf, Suffri, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1984

Yong-Sup Han, *Nuclear Disarmament and Non-Proliferation in Northeast Asia*, United States, New York and Geneva, 1995

—————, "Going into the "Unification Tunnel" : Strategic and Military Implications," dalam Natalie W. Crawford and Chung-In Moon, (eds.), *Emerging Threats, Force Structures and the Role of Air Power in Korea*, RAND, Washington, D.C., 2000

Jurnal dan Terbitan Berkala

Alexandre Y. Mansourov, "The Origins, Evolution and Future of the North Korean Nuclear Program," *Korea and World Affairs*, Vol. XIX, No. 1, Spring 1995

Dong-Bok Lee, "Remembering and Forgetting" : The Political Culture of Memory in Divided Korea," *Korea and World Affairs*, Vol. XIX, No. 3, Fall 1995

Choong Nam Kim, "Pyongyang's Dilemma of Reform and Opening," *Korea and World Affairs*, Vol. XXIV, No. 2, Summer 2000

Oknim Chung, "The Sunshine Policy," *Korea and World Affairs*, Vol. XXIV, No. 1, Spring 2000

—————, "Regional Perspectives and Roles on the Korean Peninsula," *Korea and World Affairs*, Vol. XXII, No. 2, Summer 1998

Young-Ho Park, "North Korea Under Kim Jong-Il Regime and South Korea's Policy toward North Korea," *Korea and World Affairs*, Vol. XXI, No. 4, Winter 1997

Michael Ertman, "North Korean Arms Capabilities and Implications," *Korea and World Affairs*, Vol. XX, No. 2, Winter 1996

Young-Tai Jeung & Sung Hee Yoo, "North Korea's Suspicious Arms Buildup and Military Threats for Regime Security," *Korea and World Affairs*, Vol. XX, No. 4, Winter 1996

Narushige Michishita, "Role of Force in North Korean Diplomacy," *Korea and World Affairs*, Vol. XXI, No. 2, Summer 1997

- Jing Huang, "Why is Pyongyang so Defiant on the Nuclear Issues ?", *Korea and World Affairs*, Vol. XX, No. 3, Fall 1996
- Sung-Han Kim, "Exploring Confidence-Building Measures in Northeast Asia," *Korea and World Affairs*, Vol. XXI, No. 3, Fall 1997
- Jin-Hyun Paik, "Building a Peace Regime on the Korean Peninsula," *Korea and World Affairs*, Vol. XIX, No. 3, Fall 1995
- Woo Sik Kee, "The Path Towards a Unified Korean Economy," *Korea and World Affairs*, Vol. XV, No. 1, Spring 1991
- Chi-Won kang, "Historic Inter-Korean Summit Revisited on Its First Anniversary," *Korea and World Affairs*, Vol. XXV, No. 2, Summer 2001
- Yong-Ok Park, "Korea's Defense for the 21st Century," *Korea and World Affairs*, Vol. XX, No. 1, Spring 1996
- Fei-Ling Wang, "China and Korean Unification," *Korea and World Affairs*, Vol. XXII, No. 2, Summer 1998
- Jongchul Park, "US-ROK-DPRK Tripartite Relations in Dissolving the Cold War Structure in the Korean Peninsula," *Korea and World Affairs*, Vol. XX, No. 3, Fall 2000
- Michael J. Green, "Japan and the Future of the Korean Peninsula," *Korea and World Affairs*, Vol. XXII, No. 2, Musim Panas 1998
- Hyun-Ik Hong, "Kim Jong-Il's Russia Visit and South Korea's Diplomatic Strategy," *Korea and World Affairs*, Vol. XXV, No. 3, Fall 2001
- Kap-Young Jeong, "Joint Declaration of Denuclearization of the Korean Peninsula," *Korea and World Affairs*, Vol. XVI, No. 1, Spring 1992
- Ted Greenwood, George W. Rathjens and Jack Ruina, "Nuclear Power and Weapons Proliferation," *Adelphi Papers*, No. 130, 1977
- Kenneth N. Waltz, "The Spread of Nuclear Weapons : More Be Better," *Adelphi Papers*, No. 171, 1981
- Mankwon Nam, "Dealing with North Korea's Nuclear and Missile Proliferation," *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. XII, No. 1, Summer 2000
- United States Arms Control and Disarmament Agency, *World Military Expenditures and Arms Transfers 1996*, Washington, D.C.
- Morimoto Satoshi, "Confronting the North Korean Threat," *Japan Echo*, Volume 26, Number 1, Februari 1999
- Young-Yoon Kim, "The North Korean Economic Crisis and Our Policies," *The Korean Journal of National Unification*, Seoul, Vol. 15, 1996
- Seong Ho Jhe, "How to Build a New Peace Structure on the Korean Peninsula," *The Korean Journal of National Unification*, Vol. 4, 1995

- *Kompas*, 14 Desember 2001
- *Kompas*, 13 Maret 2001
- *Kompas*, 16 Maret 2001
- *Kompas*, 15 Agustus 2001
- *Kompas*, 5 Mei 2001
- *Kompas*, 30 April 2001
- *Kompas*, 19 mei 2001
- *Kompas*, 7 Agustus 2001
- *Kompas*, 8 mei 2001
- *Kompas*, 28 Februari 2001
- *Kompas*, 2 Februari 2002
- *Kompas*, 7 Februari 2002
- *Kompas*, 3 Januari 2002
- *Kompas*, 1 Februari 2002
- *Jawa Pos*, 27 Juni 2000
- *Jawa Pos*, 25 Juni 2000
- *Bali Post*, 8 September 2001
- *Bali Post*, 22 Juni 2001
- *Bali Post*, 6 September 2001
- *Bali Post*, 9 September 2001
- *Bali Post*, 2 September 2001
- *The Jakarta Post*, 28 Februari 2001
- *The Jakarta Post*, 18 Mei 2001
- *Republika*, 28 Februari 2001
- *Merdeka*, 8 Februari 1994
- *Merdeka*, 15 Februari 1994
- *Kedaulatan Rakyat*, 16 April 1996
- *Gatra*, 1 Juni 1996
- *Gatra*, 18 Agustus 2001
- *Asiaweek*, 24 Juni 2001
- *Asiaweek*, 24 Agustus 2001
- *Newsweek*, 23 April 2001
- *Far Eastern Economic Review*, 25 Agustus 1994
- *Far Eastern Economic Review*, 25 Oktober 2001
- *Far Eastern Economic Review*, 10 Agustus 2000
- *Far Eastern Economic Review*, 25 Januari 2001
- *Far Eastern Economic Review*, 5 Juli 2001

Internet

- Foreign Association Scientist (FAS), "The Nuclear Option," dalam <http://www.fas.org/> Juni 1993
- Foreign Association Scientist (FAS), "Biological Weapons Program," dalam <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/bw/> 1998
- Foreign Association Scientist (FAS), "Chemical Weapons Programs," dalam <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/cw/> 28 Nopember 2000
- Foreign Association Scientist (FAS), "Chemical Weapons," dalam <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/facility/cw.htm> 1 Maret 2000
- Foreign Association Scientist (FAS), "Nuclear Facilities," dalam <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/facility/nuclear.htm> 1998
- Foreign Association Scientist (FAS), "Command and Control," dalam <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/facility/c3i.htm> 15 Juni 2000
- Foreign Association Scientist (FAS), "Missile Facilities," dalam <http://www.fas.org/nuke/guide/dprk/facilitymissile.htm> 1998
- The Korean Basic Agreement, dalam <http://www.korea.net/issue/sn/summit/snsummit/snsummit01-27.htm>
- Joint Declaration of Denuclearization of the Korean Peninsula, dalam <http://www.fas.org/news/korea/1992/appendix17.htm>

ran-1

and Materials for the Press

The 1992 Basic Agreement
**Agreement on Reconciliation, Nonaggression,
and Exchanges and Cooperation Between South and North Korea**

South and North Korea,

In keeping with the longing of the entire Korean race for the peaceful unification of our divided fatherland;

Reaffirming the three basic principles of unification set forth in the South-North Joint Communiqué of July 4, 1972;

Determined to end the state of political and military confrontation and achieve national reconciliation;

Also determined to avoid armed aggression and hostilities, and to ensure the lessening of tension and the establishment of peace;

Expressing the desire to realize multi-faceted exchanges and cooperation to promote interests and prosperity common to the Korean people.;

Recognizing that their relationship, not being a relationship as between states, is a special one constituted temporarily in the process of unification;

Pledging themselves to exert joint efforts to achieve peaceful unification;

Hereby agreed as follows;

CHAPTER 1 : SOUTH-NORTH RECONCILIATION

1. South and North Korea shall recognize and respect the system of each other.
2. South and North Korea shall not interfere in the internal affairs of each other.
3. South and North Korea shall not slander or defame each other.
4. South and North Korea shall refrain from any acts of sabotage or insurrection against each other.
5. South and North Korea shall together endeavour to transform the present state of armistice into a firm state of peace between the two sides and shall abide by the present Military Armistice Agreement until such a state of peace is realized.
6. South and North Korea shall cease to compete with or confront each other, and instead shall cooperate and endeavour to promote the racial dignity and interests of Korea in the international arena.
7. South and North Korea shall establish and operate a South-North Liaison Office at Panmunjom within three months of the entry into force of this Agreement to ensure close liaison and consultations between the two sides.

8. South and North Korea shall establish a South-North Political Committee within the framework of the South-North High-Level Negotiations within one month of the entry into force of this Agreement to consider concrete measures to ensure the implementation and observance of the agreement on South-North reconciliation.

CHAPTER 2 : AGREEMENT OF NONAGGRESSION BETWEEN SOUTH AND NORTH KOREA

9. South and North Korea shall not use force against each other and shall not undertake armed aggression against each other.

10. South and North Korea shall resolve peacefully, through dialogue and negotiation, any differences of views and disputes arising between them.

11. The South-North demarcation line and the areas for nonaggression shall be identical with the Military Demarcation Line provided in the Military Armistice Agreement of July 27, 1953, and the areas that each side has exercised jurisdiction over until the present time.

12. In order to implement and guarantee nonaggression, the South and the North shall establish a South-North Joint Military Commission within three months of the entry into force of this Agreement. In the said Commission, the two sides shall discuss problems and carry out steps to build up military confidence and realize arms reduction, in particular, the mutual notification and control of large-scale movements of military units and major military exercises, the peaceful utilization of the Demilitarized Zone, exchanges of military personnel and information, phased reductions in armaments including the elimination of weapons of mass destruction and attack capabilities, and verifications thereof.

13. South and North Korea shall install and operate a telephone line between the military authorities of each side to prevent the outbreak and escalation of accidental armed clashes.

14. South and North Korea shall establish a South-North Military Sub-Committee within the framework of the South-North High-Level Negotiations within one month of the entry into force of this Agreement to discuss concrete measures for the implementation and observance of the agreement on nonaggression and to remove the state of military confrontation.

CHAPTER 3 : EXCHANGES AND COOPERATION BETWEEN SOUTH AND NORTH KOREA

15. In order to promote the integrated and balanced development of the national economy and the welfare of the entire people, the South and the North shall engage in economic exchanges and cooperation, including the joint development of resources, the trade of goods as intra-Korean commerce and joint ventures.

16. South and North Korea shall carry out exchanges and promote cooperation in various fields such as science and technology, education, literature and the arts, health, sports, the environment, journalism and media including newspapers, radio, television broadcasts, and other publications.

17. South and North Korea shall implement freedom of intra-Korean travel and contact among the members of the Korean people.

18. South and North Korea shall permit free correspondence, movement between the two sides, meetings, and visits between dispersed family members and other relatives, promote their voluntary reunion, and take measures to resolve other humanitarian issues.

19. South and North Korea shall reconnect the railway and the previously severed roads, and shall open sea and air routes.

20. South and North Korea shall establish and link facilities for exchanges by post and telecommunications, and shall guarantee the confidentiality of intra-Korean mail and telecommunications.

21. South and North Korea shall cooperate in the international arena in the economic, cultural and other fields, and shall advance abroad together.

22. In order to implement the agreement on exchanges and cooperation in the economic, cultural, and other fields, South and North Korea shall establish joint commissions for each sector, including a Joint South-North Economic Exchanges and Cooperation Commission, within three months of the entry into force of this Agreement.

23. A Sub-committee on South-North Exchanges and Cooperation shall be established within the framework of the South-North High-Level Negotiations within one month of the entry into force of this Agreement, to discuss concrete measures for the implementation and observance of the agreement on South-North exchanges and cooperation.

CHAPTER 4 : AMENDMENTS AND EFFECTUATION

25. This Agreement may be amended or supplemented by agreement between the two sides.

26. This Agreement shall enter into force from the date the South and the North exchange the appropriate instruments following the completion of the respective procedures necessary for its implementation.

Signed on December 13, 1991*

Chung Won-shik

Yon Hyong-muk

Chief Delegate of the South
delegation to the South-North High-
Level Negotiations

Head of the North delegation to the
South-North High-Level Negotiations

Prime Minister of the Republic of
Korea

Premier of the Administration Council
of the Democratic People's Republic
of Korea

* This Agreement entered into force on February 19, 1992.

LIST

81

ampiran-2

Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula

To enter into force as of February 19, 1992

The South and the North, desiring to eliminate the danger of nuclear war through denuclearization of the Korean peninsula, and thus to create an environment and conditions favorable for peace and peaceful unification of our country and contribute to peace and security in Asia and the world, declare as follows:

1. The South and the North shall not test, manufacture, produce, receive, possess, store, deploy or use nuclear weapons.
2. The South and the North shall use nuclear energy solely for peaceful purposes.
3. The South and the North shall not possess nuclear reprocessing and uranium enrichment facilities.
4. The South and the North, in order to verify the denuclearization of the Korean peninsula, shall conduct inspections of the objects selected by the other side and agreed upon between the two sides, in accordance with procedures and methods to be determined by a South-North joint nuclear control commission.
5. The South and the North, in order to implement this joint declaration, shall establish and operate a South-North joint nuclear control commission within one (1) month of the effectuation of this Joint Declaration.
6. This Joint Declaration shall enter into force as of the day the South and the North exchange notifications of completion of the procedures for the entry into force of this declaration.

January 20, 1992

Chung Won-shik

Yon Hyong-muk

Prime Minister of the
Republic of Korea

Premier of the Administration
Council of the Democratic
People's Republic of Korea

Chief delegate of the South Head of the North delegation to
delegation to the South- the South-North High-Level Talks
North High-Level Talks

Chronology of Major Events Related to North Korean Nuclear Issues

Date	Contents
Jan. 1962	<ul style="list-style-type: none"> • North Korea builds IRT-2000 type research reactor: construction started by support from the Soviet Union
Sep. 1974	<ul style="list-style-type: none"> • North Korea joins the International Atomic Energy Agency (IAEA)
Sep. 1977	<ul style="list-style-type: none"> • North Korea concludes a safeguards agreement with the IAEA on the research reactor
July 1980	<ul style="list-style-type: none"> • North Korea starts building the 1st atomic reactor with 30MW heat output
Dec. 1985	<ul style="list-style-type: none"> • Soviet Union concludes a technological cooperation agreement with North Korea to support the nuclear power plant (400MW x 4)
Dec. 12	<ul style="list-style-type: none"> • North Korea joins the Nuclear Weapons Non-Proliferation Treaty (NPT)
Dec. 1986	<ul style="list-style-type: none"> • North Korea State Administration Council newly establishes atomic energy department
Feb. 1987	<ul style="list-style-type: none"> • North Korea operates a test run on the 2nd atomic reactor
June 5	<ul style="list-style-type: none"> • IAEA Executive Board forwards the safeguards agreement to North Korea based on INF/CIRC-153
Mar. 6, 1990	<ul style="list-style-type: none"> • IAEA Executive Board advises comprehensive safeguards agreement to North Korea
Nov. 16	<ul style="list-style-type: none"> • North Korean ambassador to UN proposes the simultaneous nuclear facilities inspection of USFK and North Korea for allowing IAEA inspection
June 28, 1991	<ul style="list-style-type: none"> • President Roh Tae Woo expresses the possibility of Denuclearization of the Korean peninsula under the assumption that north-east Asia will be denuclearized
Nov. 8	<ul style="list-style-type: none"> • President Roh Tae Woo declares 5 principles for denuclearization: "Korea will not manufacture, possess, store, deploy, or use nuclear weapons," and that "they shall not possess reprocessing and enrichment facilities"
Dec. 31	<ul style="list-style-type: none"> • Signed the Joint Declaration on the Denuclearization of the Korean peninsula <ul style="list-style-type: none"> • Manufacturing and the use of nuclear weapons will be prohibited • Nuclear energy will be used for maintaining peace • Nuclear reprocessing and uranium enrichment facilities shall not be possessed • Organizes a procedure for inter-Korean inspection • Organizes North-South Joint Nuclear Control Commission (JNCC) within a month • Declaration will be made effective when the text is changed
Jan. 30, 1992	<ul style="list-style-type: none"> • North Korea signs a safeguards agreement with the IAEA
Mar. 14	<ul style="list-style-type: none"> • Organizes the South North Joint Nuclear Control Commission (JNCC)
April 9	<ul style="list-style-type: none"> • North Korea ratifies the IAEA safeguards agreement
May 4	<ul style="list-style-type: none"> • North Korea submits the initial report to the IAEA. North Korea reports the facilities and the possession of 90g of reprocessed plutonium
May 23 - June 5	<ul style="list-style-type: none"> • IAEA undergoes an inspection to verify the accuracy and completeness of the initial report submitted by North Korea
Dec. 12	<ul style="list-style-type: none"> • IAEA informally demands North Korea the access of the 2 areas suspected of nuclear waste storage. North Korea allows the inspection of only 1 area
Feb. 10, 1993	<ul style="list-style-type: none"> • Hans Blix, the secretary-general of the IAEA, urged a special inspection of the 2 undeclared facilities in North Korea
Mar. 12	<ul style="list-style-type: none"> • North Korea announces withdrawal from the NPT

umber : The Ministry of National Defense, The Republic of Korea
 Defense White Paper 2000

Date	Contents
May 11, 1993	<ul style="list-style-type: none"> UN Security Council passes a resolution urging North Korea to (1) accept the IAEA inspection and (2) suspend its withdrawal from the NPT
June 2-June 11	<ul style="list-style-type: none"> US holds the first top-level talks with North Korea in New York
July 1-July 19	<ul style="list-style-type: none"> North Korea agrees to the comprehensive and unbiased safeguard measures by the IAEA US and North Korea hold a second round top-level talks in Geneva, Switzerland
November	<ul style="list-style-type: none"> Discusses the reduction of graphite-moderated reactors and substitution of the related facilities with LWR
November	<ul style="list-style-type: none"> North Korea proposes a packaged management of nuclear problems to the US
May 1994	<ul style="list-style-type: none"> North Korea disobeys the safeguards agreement and unloads fuel from its 5MW nuclear reactor
June 13	<ul style="list-style-type: none"> North Korea submits a withdrawal agreement to the IAEA
June 15-June 18	<ul style="list-style-type: none"> Former US president Carter visits North Korea North Korea proposes reopening of the US-North Korea top-level talks for freezing its nuclear program
July 8-July 10	<ul style="list-style-type: none"> The third US-North Korea top-level talks were held in Geneva, and the issues of North Korea's its nuclear program freeze were discussed
Oct. 21	<ul style="list-style-type: none"> US and North Korea sign an Agreed Framework in Geneva <ul style="list-style-type: none"> Replace the graphite-moderated reactor program with the LWR project (supply two 1000MW level LWR) Deliver 500,000 tons of heavy oil annually Improve US-North Korean relations Achieve denuclearization of the Korean peninsula and reopen inter-Korean talks North Korea's obligation for denuclearization
Nov. 1	<ul style="list-style-type: none"> North Korea agrees to freeze its existing nuclear program
Jan. 18 - Jan. 23, 1995	<ul style="list-style-type: none"> US and North Korea hold a conference to remove fuel rods from the 5MW reactor
Mar. 9	<ul style="list-style-type: none"> Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO) agreement signed in New York <ul style="list-style-type: none"> Executive Board Members: ROK, US, Japan, and EU (4 countries) Non-Executive Board Members: Finland, Canada, New Zealand, Australia, Chile, Argentina and Indonesia (7 countries)
June 20	<ul style="list-style-type: none"> US technology team arrives in North Korea to remove fuel rods from North Korea's 5MW reactor (8000 fuel rods were found)
Dec. 15	<ul style="list-style-type: none"> KEDO and North Korea sign the Light Water Reactor (LWR) Supply Agreement <ul style="list-style-type: none"> 18 full text reorganized / 4 sub-departments
April 27, 1996	<ul style="list-style-type: none"> US NAC International starts canning fuel rods of 5MW atomic reactor

Date	Contents
July 11	<ul style="list-style-type: none"> The Protocols on Exemption of Privileges, Transportation, and Communication are signed between KEDO and North Korea.
Sep. 18	<ul style="list-style-type: none"> Incursion of a North Korean submarine onto the east coast of South Korea
June 24, 1997	<ul style="list-style-type: none"> KEDO and North Korea sign the protocol concerning actions in the event of nonpayment with respect to financial obligations regarding the LWR
July 28	<ul style="list-style-type: none"> Opening of KEDO office in Kumho area of North Korea
Aug. 10, 1998	<ul style="list-style-type: none"> Time Magazine (Aug. 17) suspects underground nuclear facilities in Kumchangri, North Korea
Aug. 31	<ul style="list-style-type: none"> North Korea fires a ballistic missile (Taepodong-1)
Sep. 24	<ul style="list-style-type: none"> IAEA General Assembly adopts a resolution calling for North Korea's allowing nuclear inspections
Nov. 10, 1998	<ul style="list-style-type: none"> The KEDO Executive Board adopts the resolution on cost-sharing for light-water reactors (LWR)
Mar. 16, 1999	<ul style="list-style-type: none"> The US and North Korea conclude an agreement on the inspection of underground facilities in Kumchangri
May 3	<ul style="list-style-type: none"> Japan signs an agreement on extending loans to KEDO
May 18-May 24	<ul style="list-style-type: none"> The US delegation visits the Kumchangri site State Department Korea Division Deputy Manager Joel Wit and 14 other staff members
May 25 ~ May 28	<ul style="list-style-type: none"> US North Korean policy coordinator William Perry pays a visit to the North
July 2	<ul style="list-style-type: none"> Conclusion of the South Korea-KEDO agreement to extend loans worth \$3.22 billion
Aug. 12	<ul style="list-style-type: none"> National Assembly ratifies KEDO agreement to extend loans
Aug. 24	<ul style="list-style-type: none"> North Korea demands countermeasures against the delays in building the LWR
Sep. 12	<ul style="list-style-type: none"> Agreement is reached between US-North Korea on missile issues
Sep. 15	<ul style="list-style-type: none"> William Perry, the special assistant to the President of the US, reports to the US Congress on the policies towards North Korea
Sep. 17	<ul style="list-style-type: none"> Bill Clinton, President of the US, announces partial release of the restrictions against North Korea
Sep. 25	<ul style="list-style-type: none"> In the keynote address of UN General Assembly, Park Nam Soon, the minister of foreign affairs of North Korea declares that North Korea will not fire missiles during the US-North Korea top-level talks
Sep. 30	<ul style="list-style-type: none"> Australia decides to support KEDO, donating 2 million Australian dollars
Oct. 1	<ul style="list-style-type: none"> IAEA adopts a resolution calling North Korea's allowing nuclear inspections
Oct. 5	<ul style="list-style-type: none"> KEDO annual meeting held in New York
Oct. 7	<ul style="list-style-type: none"> US Congress approves \$35 million crude oil budget for the year 2000
Oct. 13	<ul style="list-style-type: none"> US Senate rejects Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) ratification proposal
Oct. 23	<ul style="list-style-type: none"> Radioactivity detected in a Russian train headed for North Korea

Date	Contentis
Oct. 28, 1999	<ul style="list-style-type: none"> • KEDO watches North Korea's heavy oil using ultrasonic flux measuring instrument
Nov. 3	<ul style="list-style-type: none"> • The US Republican Party's policy report points out the possibility of North Korea's developing Nuclear weapons
Nov. 16	<ul style="list-style-type: none"> • KEDO completes the donation of 500,000 tons of heavy oil for 1999
Nov. 23 ~ Nov. 24	<ul style="list-style-type: none"> • A KEDO Executive Board meeting is held to discuss financial plans and issues on concluding contracts
Dec. 15	<ul style="list-style-type: none"> • KEDO signs a Turn-Key Project (TKC) with the Korea Electric Power Corporation (KEPCO) • Estimates the completion dates as the year 2007 for the first, and 2008 for the second
Dec. 28	<ul style="list-style-type: none"> • KEPCO's domestic enterprises conclude an agreement with KEDO
Jan. 22, 2000	<ul style="list-style-type: none"> • US and North Korea hold the Berlin conference, agreeing to hold the Washington top-level talks (Jan. 28)
Jan. 28	<ul style="list-style-type: none"> • KEDO and International Cooperation Bank of Japan agree to loan funds for the construction of LWR
Feb. 2	<ul style="list-style-type: none"> • North Korea warns the possibility of annulment of the Geneva Agreement due to the delay in building the LWR
Feb. 3	<ul style="list-style-type: none"> • Construction of the LWR is commenced
Mar. 7	<ul style="list-style-type: none"> • US and North Korea hold a preliminary top-level talks in New York • North Korea demands its exclusion from the terrorist countries and to improve relations with US • US persuades North Korea to abandon the development of missiles, and to continue the Geneva Agreement
April 1 ~ April 4	<ul style="list-style-type: none"> • KEDO and North Korea negotiate the training protocol (3rd) • Agreement was reached, but signatures still needed
May 25 ~ May 27	<ul style="list-style-type: none"> • US undergoes the 2nd inspection of the Kumchangri area in North Korea
July 3 ~ July 4	<ul style="list-style-type: none"> • KEDO and North Korea negotiate the quality guaranteeing protocol (4th)
July 30	<ul style="list-style-type: none"> • KEDO and EU deliberate over additional contribution issues

PUSAT DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI
JLN TAMAN PEJAMBON NO. 4 (EX. BP 7)
JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN RISET

NOMOR:130/RIS/PERPUST/ X/ 2001/52

Menunjuk Surat Pengantar Riset Nomor : 1230/J25.3.1/PL.5/2001 dari Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

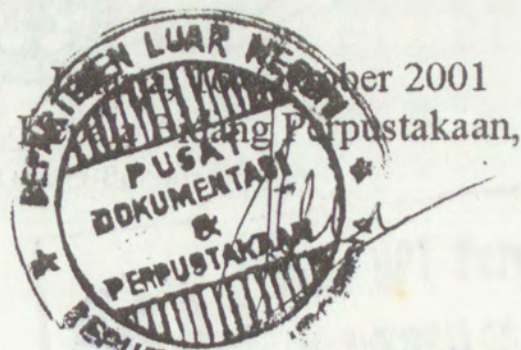
Bersama ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : DIDIK FADLANSYAH
NIRM. : 97-1206
Fakultas/Jurusan : Hubungan Internasional

Telah mengadakan riset/penelitian di Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan Badan Litbang Departemen Luar Negeri Jakarta selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul :

“KEBIJAKAN PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP REUNIFIKASI DAMAI DI SEMENANJUNG KOREA”.

Demikianlah Surat Keterangan Riset ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Tdhi Maryono
NIP. : 020004043.